LAPORAN KINERJA 2019

PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas serta menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Harga Pangan, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan system distribusi, harga dan cadangan pangan pada masa yang akan datang, sehingga dapat berjalan lebih baik. Cara pengukuran penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam penyusunan laporan lebih bersifat *self assessment,* dan disadari masih belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat diperbaiki sesuai kondisi pelaksanaan kegiatan kedepan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan in dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Prof. Dr. Risfaheri, MSi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 2
1.3.1 Kedudukan dan Fungsi 2
1.3.2 Struktur Organisasi Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 3

Bab II Perencanaan Kinerja 4
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 (Revisi IV) 4
2.2 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 5
2.3 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019 6
2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 7

Bab III Akuntabilitas Kinerja 9
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 9
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 9
3.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Tahun 2017 - 2018 11
3.2 Analisis Capaian Kinerja 13
3.2.1 Koefisien Variasi Harga Komoditas Gabah di Tingkat Produsen dan Beras Medium di Tingkat Konsumen 13
3.2.2 Koefisien Variasi Harga Komoditas Jagung di Tingkat Produsen dan Konsumen 14
3.2.3 Koefisien Variasi Harga Komoditas Kedelai di Tingkat Produsen dan Konsumen 14
3.2.4 Koefisien Variasi Harga Komoditas Bawang Merah di Tingkat Produsen dan Konsumen 14
3.2.5 Koefisien Variasi Harga Komoditas Cabai di Tingkat Produsen dan Konsumen 15

3.2.6 Koefisien Variasi Harga Komoditas Daging Sapi di Tingkat Konsumen 15
3.2.7 Koefisien Variasi Harga Komoditas Gula Pasir di Tingkat Konsumen 15
3.3 Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan 16
3.4 Capaian Kinerja Kegiatan Strategis Lainnya Pendukung Ketercapaian Indikator Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 18
3.4.1 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia 18
3.4.2 Toko Tani Indonesia Center (TTIC) 24
3.4.3 Pengembangan E-Commerce 28
3.4.4 Pengadaan *Cold Storage* dan Mobil TTIC 33
3.4.5 Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota) 34
3.4.6 Serapan Gabah Beras Petani mendukung CBP 42
3.4.7 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 43
3.4.8 Prognosa Produksi dan Kebutuhan Pangan Pokok/Strategis 49
3.4.9 Panel Harga Pangan 52
3.4.10 Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan periode HBKN (Rakor, Pantauan Harga, GPM) 56
3.4.11 Subsidi Biaya Distribusi Pangan 59
3.4.12 Penyusunan Kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah 63
3.4.13 Kajian Terkait Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan 68
3.4.14 Jurnal Pilar Ketahanan Pangan 88

Bab IV Penutup 94

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015 - 2019..... 5

Tabel 2. Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015 - 2019..... 6

Tabel 3. Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019 7

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2019 8

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019 10

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2016 – 2019 12

Tabel 7. Hasil Analisis Statistik Sederhana Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun 2019 13

Tabel 8. Target dan Realisasi Bantuan Pemerintah Kegiatan PUPM/TTI Tahun 2019 Tahap Penumbuhan..... 19

Tabel 9. Target dan Realisasi Bantuan Pemerintah Kegiatan PUPM/TTI Tahun 2019 Tahap Pengembangan..... 20

Tabel 10. Target dan Realisasi Bantuan Pemerintah Kegiatan PUPM/TTI Tahun 2019 Tahap Pembinaan..... 20

Tabel 11. Kinerja PUPM 2019 Tahap Penumbuhan 22

Tabel 12. Kinerja PUPM 2019 Tahap Pengembangan 23

Tabel 13. Kinerja PUPM 2019 Tahap Pembinaan 24

Tabel 14. Perkembangan Stok Beras Perum BULOG Tahun 2016 - 2019 36

Tabel 15. Perkembangan CPPD Provinsi Tahun 2017 - 2019 38

Tabel 16. Target Ideal CBPD Provinsi Tahun 2019 39

Tabel 17. Perkembangan CBP Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2019 41

Tabel 18. Pembangunan LPM dan Sarana Pendukungnya 46

Tabel 19. Realisasi pencairan Banper LPM TA 2019..... 47

Tabel 20. Kinerja Nasional Banper LPM Tahun 2019 48

Tabel 21. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2019 50

Tabel 22. Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsoi Tahun 2015 – 2019 …… ... 53

Tabel 23. Lokasi dan Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2015 – 2019..... 54

Tabel 24. Lokasi dan Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan di Jabodetabekkarpur Tahun 2017 – 2019..... 55

Tabel 25. Perkembangan Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2015 – 2019..... 55

Tabel 26. Kriteria Penurunan Mutu Cadangan Beras Pemerintah 68

Tabel 27. Estimasi Kebutuhan Anggaran pembangunan Silo Jagung dan sarana pendukung..... 78

Tabel 28. Perbandingan harga CAS dan Silo..... 82

Tabel 29. Alokasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2019..... 91

Tabel 30. Alokasi Anggaran Setelah Pemblokiran dan Realisasi Anggaran Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan TA.2019..... 92

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 3

Gambar 2. Perkembangan Harga KOmoditas Pangan Pokok/Strategis di TTIC Jakarta 26

Gambar 3. Perkembangan Harga KOmoditas Pangan Pokok/Strategis di TTIC Bogor 27

Gambar 4. Sebaran *Cold Storage* TTIC Propinsi Tahun 2019 33

Gambar 5. Sebaran Mobil TTIC Propinsi Tahun 2019 34

Gambar 6. Peta Kondisi CBPD Propinsi Tahun 2019 37

Gambar 7. Peta Kondisi CBPD Kabupaten/Kota Tahun 2019 40

Gambar 8. Mekanisme Kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan 60

Gambar 9. Kontribusi 10 Provinsi Terhadap Kebutuhan Jagung Nasional..... 73

Gambar 10. Peta Produksi, Kebutuhan Pangan dan Lokasi Silo Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 75

Gambar 11. Peta Produksi, Kebutuhan Pangan dan Lokasi Silo Jagung di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 76

Gambar 12. Konsep Kegiatan Pengelolaan Silo Jagung..... 78

Gambar 13. Peta Surplus/Defisit Produksi Bawang Merah 80

Gambar 14. Peta Surplus/Defisit Produksi Cabai Besar 81

Gambar 15. Peta Surplus/Defisit Produksi Cabai Rawit..... 81

Gambar 16. Kebutuhan Cold Storage Bawang Merah dan Cabai 83

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pertanian yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2015 - 2019 adalah Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Strategik (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019. Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 - 2019 sebagai tindak lanjut dari RPJMN dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan khususnya terkait dengan aspek distribusi, harga, dan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, dijabarkan dalam Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015 – 2019 (Revisi IV). Jangka waktu pelaksanaan Renstra selama 5 tahun diimplementasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Penetapan Kinerja (PK) sebagai pedoman pelaksanaan kinerja selama satu tahun.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, setiap instansi pemerintah harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud harus disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Selain itu, pertanggungjawaban harus dilakukan melalui sistem akuntabilitas secara periodik dan melembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai salah satu unit Eselon II lingkup BKP, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan perlu menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan, serta lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan.

Salah satu implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari capaian kinerja selama tahun 2019 mengacu pada peraturan tersebut.

Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan diwujudkan dalam sistem akuntabilitas yang memuat tentang perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Untuk itu, laporan kinerja ini didasarkan pada Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015 – 2019 (Revisi IV), Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019, Rencana Kerja dan Anggaran Kelembagaan Lembaga (RKAKL) Tahun 2019, Penetapan Kinerja (PK) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019, serta Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

1.3. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

1.3.1 Kedudukan dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan;
b. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi harga pangan; dan
c. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan.

1.3.2 Struktur Organisasi Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan sebagia unit kerja Eselon II terdiri dari 3 Bidang (Eselon III), 6 Sub Bidang (Eselon IV) dan 2 kelompok Jabatan Fungsional , yaitu:

a. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari:
   1) Sub Bidang Jaringan Distribusi Pangan, dan
   2) Sub Bidang Kelembagaan Distribusi Pangan.
b. Bidang Harga Pangan, terdiri dari:
   1) Sub Bidang Analisis Harga Pangan Produsen; dan
   2) Sub Bidang Analisis Harga Pangan Konsumen.
c. Bidang Cadangan Pangan, terdiri dari:
   1) Sub Bidang Cadangan Pangan Masyarakat; dan
   2) Sub Bidang Cadangan Pangan Pemerintah.
d. Kelompok Jabatan Fungsional
   1) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP)
   2) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP)

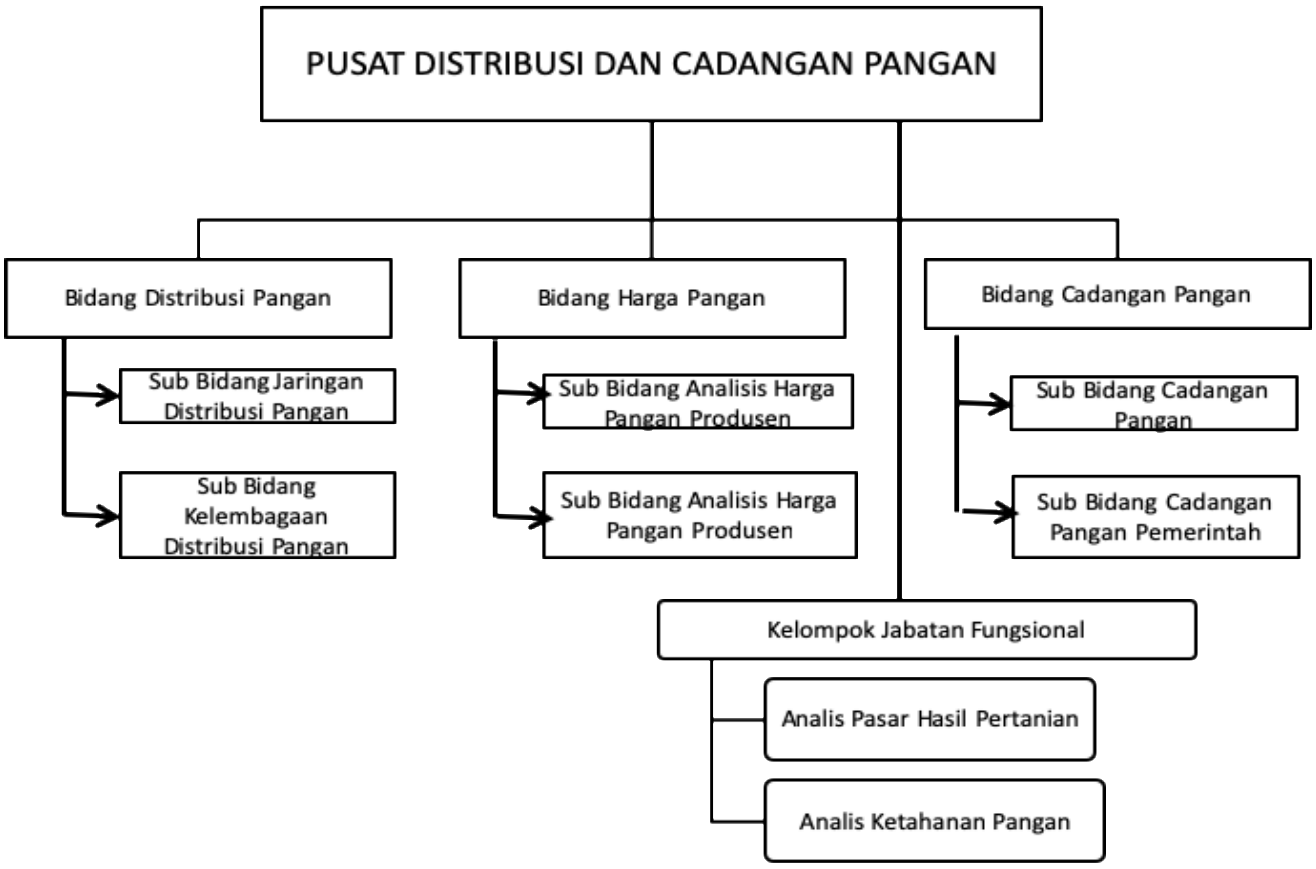

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 (Revisi IV)

Visi

Mengacu kepada tugas pokok, fungsi, dan mandat yang diberikan kepada Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, serta mengacu kepada arah kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015 - 2019 mempunyai visi: ***"Menjadi institusi yang handal dan aspiratif dalam memantapkan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga".***

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan untuk mendukung stabilisasi harga pangan pokok dan strategis; serta
2. Mengembangkan koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan pokok dan strategis.

Tujuan

Tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan periode tahun 2015 - 2019 adalah untuk mewujudkan stabilitas harga pangan pokok dan strategis.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2019 adalah Stabilnya Harga Komoditas Pertanian Strategis di tingkat konsumen dan/atau produsen yang ditunjukan melalui indikator *coefisient variation* (CV), yaitu:

1. Bahan pangan pokok beras dengan CV sebesar 10%.
2. Bahan pangan strategis jagung (CV 10%), kedelai (CV 10%), bawang merah (CV 25%), cabai (CV 30%), daging sapi (CV 10%), dan gula pasir (CV 10%).

Untuk melihat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015 – 2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadi Institusi yang handal dan aspiratif dalam memantapkan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan pokok dan strategis.	1. Mengembangkan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan untuk mendukung stabilisasi harga pangan pokok dan strategis; 2. Mengembangkan koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan pokok dan strategis.	Tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan periode tahun 2015-2019 adalah untuk mewujudkan stabilitas harga pangan pokok dan strategis.	Stabilnya Harga Komoditas Pertanian Strategis di tingkat konsumen dan/atau produsen: 1. Bahan pangan pokok beras dengan CV sebesar 10%. 2. Bahan pangan strategis jagung (CV 10%), kedelai (CV 10%), bawang merah (CV 25%), cabai (CV 30%), daging sapi (CV 10%), dan gula pasir (CV 10%).

2.2. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan, maka kegiatan utama yang akan dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015 - 2019 adalah Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan utama yang dibebankan kepada Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, maka akan ditempuh melalui pelaksanaan kegiatan prioritas, serta kegiatan pendukung program internal maupun eksternal Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. Sasaran program adalah Stabilitas Harga Komoditas Pertanian Strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan adalah koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional meliputi: (a) gabah di produsen; (b) beras, daging sapi dan gula pasir di konsumen; serta (c) jagung, kedelai, cabai dan bawang merah di produsen dan konsumen. Rincian kebijakan, program, kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015 - 2019 terlihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015 - 2019

No	Sasaran Program	Rincian IKSK	2015	2016	2017	2018	2019
1	Stabilnya Harga Komoditas Pertanian Strategis.	Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional (%).	-	-	-	10-30	10-30
		Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%).	-	-	10	10	10
		Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen (%).	-	-	-	10	10
		Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen (%).	-	-	-	10	10
		Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen (%).	-	-	-	10	10
		Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen (%).	-	-	-	10	10
		Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen (%).	-	-	27	30	30
		Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan konsumen (%).	-	-	17	25	25

2.3 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019

Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019 merupakan bagian dari pernyataan kinerja/perjanjian antara Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Menteri Pertanian. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan, penetapan kinerja kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan yang menjadi acuan atau tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 seperti pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target (%)
1	Stabilnya Harga Komoditas Pertanian Strategis di tingkat konsumen dan/ atau produsen.	1	Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%).	10
		2	Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen (%).	10
		3	Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen (%).	10
		4	Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan konsumen (%).	25
		5	Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen (%).	30
		6	Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen (%).	10
		7	Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen (%).	10

Jumlah Anggaran: Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Tahun 2019 sebesar Rp221.693.960.000,-

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Implementasi dari Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagai berikut (Tabel 4):

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen	1-1-Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen	10%
		1-2 Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen	10%
		1-3-Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen	10%
		1-4-Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan konsumen	25%
		1-5-Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen	30%
		1-6-oefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen	10%
		1-7-Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen	10%
		1-8-Rasio jumlah Lembaga distribusi pangan yang dibina terhadap provinsi di seluruh Indonesia	100%
		1-9-Jumlah lumbung pangan masyarakat (akumulatif)	443 unit
		1-10-Jumlah Provinsi yang mengelola cadangan pangan pemerintah	26 Provinsi
		1-11-Jumlah Kab/Kota yang mengelola cadangan pangan pemerintah	150 Kab/Kota

Sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2019, pelaksanaan operasional kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan terangkum dalam 1 (satu) kegiatan utama, yaitu Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan bergantung kepada kriteria capaian kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dilakukan dengan maksud: (1) membantu memperbaiki capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan yang terfokus kepada program unit kerja; (2) ukuran kinerja berguna untuk pengalokasian sumberdaya dan perumusan kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan; dan (3) mempertanggungjawabkan kepada publik khususnya dalam perbaikan pelaksanaan kinerja. Hal tersebut dapat membantu pimpinan dalam menilai suatu pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan/sasaran.

Kriteria keberhasilan capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja lebih besar dari 100 persen;
2. Berhasil : jika capaian kinerja antara 80-100 persen;
3. Cukup berhasil : jika capaian kinerja antara 60-79 persen; dan
4. Tidak berhasil : jika capaian kinerja di bawah 60 persen.

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada Tahun Anggaran 2019 diuraikan berdasarkan sasaran kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, yaitu stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan/atau produsen.

Sasaran kegiatan diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama yaitu: (1) Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%); (2) Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen (%); (3) Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen (%); (4) Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan konsumen (%); (5) Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen (%); (6) Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen (%); (7) Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen (%). Pencapaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target (max)	Realisasi	% Capaian Kinerja
Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen	Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%).	10	gabah (3,34%) beras (0,55%)	capaian CV gabah 299,43% **(sangat berhasil)** capaian CV beras 1814,73% **(sangat berhasil)**
	Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen (%).	10	produsen (5,22%) konsumen (1,01%)	capaian CV jagung produsen 191,40% **(sangat berhasil)** capaian CV jagung konsumen 988,78% **(sangat berhasil)**
	Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen (%).	10	produsen (0,88%) konsumen (2,80%)	capaian CV kedelai produsen 782,03% **(sangat berhasil)** capaian CV kedelai konsumen 368,75% **(sangat berhasil)**
	Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan konsumen (%).	25	produsen (18,06%) konsumen (16,35%)	capaian CV bawang merah produsen 138,43% **(sangat berhasil)** capaian CV bawang merah konsumen 152,87% **(sangat berhasil)**
	Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen (%).	30	produsen (29,98%) konsumen (29,89%)	capaian CV cabai produsen 100,07% **(sangat berhasil)** capaian CV cabai konsumen 100,36% **(sangat berhasil)**
	Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen (%).	10	0,97%	capaian CV daging sapi 1026,81% **(sangat berhasil)**
	Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen (%).	10	3,35%	capaian CV gula 293,36% **(sangat berhasil).**

Indikator kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan yaitu stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan/atau produsen. Stabilnya harga suatu komoditas dapat ditentukan menggunakan koefisien variasi (CV). Koefisien variasi dari data harga secara runtun waktu menggambarkan fluktuasi (simpangan terhadap rata-rata) yang digunakan untuk mengetahui stabilitas harga suatu komoditas. Semakin kecil nilai koefisien variasi dapat diinterpretasikan bahwa harga relatif stabil atau memiliki fluktuasi yang rendah.

Tidak ada standar nasional untuk menentukan besaran CV, sehingga dalam penentuan nilai CV untuk melihat stabilnya harga masing-masing komoditas pangan pokok/strategis maka digunakan trend harga selama 5 tahun terakhir. Dari

hasil trend harga selama 5 tahun tersebut dapat ditentukan target CV untuk masing-masing komoditas pangan pokok/strategis sebagai berikut: (1) Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (≤10%); (2) Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen (≤10%); (3) Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen (≤10%); (4) Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan konsumen (≤25%); (5) Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen (≤30%); (6) Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen (≤10%); dan (7) Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen (≤10%). Pada tahun 2019, masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dari semua komoditas pangan telah tercapai dengan sangat berhasil (>100%).

Pemenuhan target ini diupayakan melalui beberapa kegiatan pendukung, yaitu: (1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) untuk mendukung terjaganya CV gabah di tingkat petani dan CV beras di tingkat konsumen; (2) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah untuk mendukung CV gabah di tingkat petani dan beras di tingkat konsumen; (3) Pembangunan database dan informasi pasokan dan harga pangan sebagai alat analisis dan *early warning system* terjaganya CV harga pangan pokok dan strategis baik di produsen dan/atau konsumen; serta (4) Kajian Distribusi Pangan sebagai alat kebijakan untuk mendukung stabilitas harga pangan pokok dan strategis.

3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan dengan Tahun 2017 - 2018

Capaian kinerja kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2017 - 2018 terkait CV harga pangan pokok/strategis tingkat produsen dan/atau konsumen telah memenuhi kriteria sangat berhasil (>100%) atau melebihi target, begitu juga pada tahun 2019 telah mencapai target. Apabila dilihat per komoditas, capaian cv tahun 2019 lebih berhasil dibanding tahun 2017 - 2018 pada komoditas beras di konsumen, jagung di produsen dan konsumen, kedelai di produsen, bawang merah di konsumen, dan daging sapi di konsumen (**Tabel 6**).

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2016 – 2019.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama[1)]	2016		2017		2018		2019	
		Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen	Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%).	-	-	2,85%	350,88%	gabah 3,24% beras 1,95%	gabah 308,64% beras 512,82%	gabah 3,34% beras 0,55%	gabah 299,43% beras 1814,73%
	Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen (%).	-	-	-	-	produsen 7,66% konsumen 2,79%	produsen 130,55% konsumen 358,42%	produsen 5,22% konsumen 1,01%	produsen 191,40% konsumen 988,78%
	Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen (%).	-	-	-	-	produsen 1,51% konsumen 1,75%	produsen 662,25% konsumen 571,43%	produsen 0,88% konsumen 2,80%	produsen 782,03% konsumen 368,75%
	Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan konsumen (%).	-	-	15,60%	108,97%	produsen 16,99% konsumen 16,39%	produsen 147,15% konsumen 152,53%	produsen 18,06% konsumen 16,35%	produsen 138,43% konsumen 152,87%
	Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen (%).	-		23,18%	116,48%	produsen 20,93% konsumen 10,43%	produsen 143,33% konsumen 287,63%	produsen 29,98% konsumen 29,89%	produsen 100,07% konsumen 100,36%
	Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen (%);	-	-	-	-	konsumen 1,17%	konsumen 854,70%	konsumen 0,97%	konsumen 1026,81%
	Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen (%).	-	-	-	-	konsumen 1,17%	konsumen 854,70%	konsumen 3,35%	konsumen 298,36%
	Lembaga Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia.	493 unit/ 1.320 TTI	98,60%/ 132%	Penumbuhan: LUPM 406 unit Pengembangan: LUPM 483 unit Total LUPM 889 unit/TTI ditumbuhkan 1.113 unit	98,89%/ 111 %	-	-	-	-
	Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan.	323 unit	94,72%	98 unit	96,94%	-	-	-	-
	Data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi.	35 laporan	100%	35 Laporan	100%	-	-	-	-
	Data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan.	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%	-	-	-	-
	Jumlah kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan.	1 Judul	100%	3 laporan	100%	-	-	-	-

Keterangan:

1) Indikator CV komoditas pangan pokok dan strategis sebagai indikator kinerja stabilisasi harga pangan pada Tahun 2017 baru meliputi beras, cabai dan bawang merah di tingkat konsumen, sedangkan pada tahun 2016 Indikator Kinerja Utama belum menggunakan indikator CV harga pangan.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Situasi harga komoditas pangan pokok/startegis di tingkat produsen dan/atau konsumen pada tahun 2019 ditampilkan pada **Tabel 7** berikut.

Tabel 7. Hasil Analisis Statistik Sederhana Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun 2019

Komoditas	Harga Tingkat Produsen				Harga Tingkat Konsumen			
	Min	Max	Rerata	CV (%)	Min	Max	Rerata	CV (%)
Gabah (Gabah Kering Panen)	4.441	4.889	4.678	3,34	-	-	-	-
Beras Medium	-	-	-	-	11.004	11.167	11.076	0,55
Jagung Pipilan Kering	3.833	4.423	3.978	5,22	6.962	7.184	7.054	1,01
Kedelai Biji Kering	6.691	6.891	6.796	0,88	9.416	10.144	9.877	2,8
Bawang Merah	14.104	25.233	19.368	18,06	23.050	38.273	30.737	16,35
Cabai Merah Keriting	13.653	39.830	25.292	29,98	25.370	64.311	40.557	29,89
Daging Sapi Murni	-	-	-	-	118.890	121.817	120.212	0,97
Gula Pasir Lokal/Curah	-	-	-	-	12.059	13.169	12.755	3,35

Sumber : Panel Harga BKP (2019)

Analisis pencapaian target kinerja koefisien variasi (cv) dan penggunaan sumber daya tahun 2019 pada masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

3.2.1. CV Harga Gabah di Produsen dan Harga Beras di Konsumen (%)

Harga gabah di tingkat petani mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan harga beras di tingkat konsumen. Di sisi yang lain, harga gabah juga menentukan tingkat kesejahteraan petani. Kondisi yang diharapkan adalah petani menerima harga jual gabah yang layak dan menguntungkan baik pada masa di luar panen maupun saat puncak panen raya. Dari data Panel Harga BKP 2019, rata-rata harga GKP tingkat petani selama tahun 2019 adalah Rp4.678/kg, relatif stabil dengan nilai CV 3,34%. Harga rata-rata tersebut di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan kebijakan fleksibilitas HPP 10% atau Rp4.070/kg, sehingga dapat disimpulkan jika petani dalam kondisi diuntungkan. Demikian pula dengan perkembangan harga beras di konsumen menunjukkan harga yang stabil, dengan nilai CV 0,55%. Harga rata-rata beras medium Tahun 2019 sebesar Rp11.076/kg, jauh diatas harga eceran tertinggi khususnya di wilayah Jawa Rp9.450/kg.

Dari sisi stabilitas harga, capaian kinerja koefisien variasi harga GKP tingkat petani dan beras medium di konsumen selama Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 (CV GKP 3,24%), pada tahun 2019 (CV GKP 3,34%) sedikit lebih tinggi, sedangkan untuk CV beras medium (CV 0,55%) lebih rendah dibanding tahun 2018 (CV 1,55%). Capaian tahun 2019, baik produsen

maupun konsumen sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10% yang berarti harga GKP maupun beras stabil.

3.2.2 CV Harga Jagung di Produsen dan Konsumen (%)

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, rata-rata harga jagung pipilan kering tingkat petani (kadar air berkisar 17 - 20%) selama tahun 2019 adalah Rp3.978/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga jagung pipilan kering tingkat petani sebesar 5,22% dan di tingkat konsumen 1,01%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 ditingkat produsen (7,66%) dan tingkat konsumen (2,79%), maka capain tahun 2019 jauh lebih rendah yang berarti harga semakin stabil. Capaian tahun 2019, baik di produsen maupun konsumen ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10% yang berarti harga stabil.

3.2.3 CV Harga Kedelai di Produsen dan Konsumen (%)

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, rata-rata harga kedelai biji kering tingkat petani selama tahun 2019 adalah Rp6.851/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga kedelai biji kering tingkat petani sebesar 0,88% dan di tingkat konsumen 2,80%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 ditingkat produsen (1,51%) dan tingkat konsumen (1,75%), maka capaian tahun 2019 ditingkat produsen jauh lebih rendah yang berarti harga semakin stabil, sedang ditingkat konsumen lebih tinggi yang berarti harga lebih berfluktuasi. Meski demikian, capaian tahun 2019 baik di produsen maupun konsumen sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen yang berarti harga stabil. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga kedelai biji kering tingkat petani stabil dengan capaian kinerja baik.

3.2.4. CV Harga Bawang Merah di Produsen dan Konsumen (%)

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, rata-rata harga bawang merah tingkat petani selama tahun 2019 adalah Rp19.368/kg dan di tingkat eceran Rp30.737/kg. Capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah tingkat petani sebesar 18,06% dan di tingkat konsumen 16,35%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 ditingkat produsen (16,99%) dan tingkat konsumen (16,39%), maka capaian tahun 2019 baik di produsen maupun konsumen lebih rendah, yang berarti harga lebih stabil.

Capaian tahun 2019 baik di produsen maupun konsumen sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 25 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga bawang merah tingkat petani dan tingkat konsumen stabil dengan capaian kinerja baik, yang berarti harga stabil

3.2.5. CV Harga Cabai di Produsen dan Konsumen (%)

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, rata-rata harga cabai tingkat petani, dalam hal ini cabai merah keriting selama tahun 2019 adalah Rp26.231/kg dan di konsumen Rp40.557/kg. Capaian kinerja koefisien variasi harga cabai merah keriting tingkat petani sebesar 29,98% dan di konsumen 29,89%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 ditingkat produsen (20,93%) dan konsumen (10,43%), maka capaian tahun 2019 baik di produsen maupun konsumen masih lebih tinggi, yang berarti harga lebih berfluktuasi.

Capaian kinerja koefisien variasi harga cabai merah keriting di tingkat petani masih di bawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤30% yang berarti harga stabil, demikian pula koefisien harga di tingkat konsumen masih dibawah angka maksimal yang berarti harga stabil. Hal ini mengindikasikan harga cabai selama tahun 2019 di tingkat produsen dan konsumen stabil.

3.2.6. CV Harga Daging Sapi di Konsumen (%)

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, rata-rata harga daging sapi tingkat konsumen selama tahun 2019 adalah Rp120.212/kg, dengan capaian kinerja koefisien variasi harga daging sapi sebesar 0,97%. Apabila dibandingkan capaian tahun 2018 ditingkat konsumen (1,17%), maka capaian tahun 2019 masih lebih rendah, yang berarti harga lebih stabil.

Capaian tahun 2019 sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤10%. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga daging sapi tingkat konsumen stabil dengan capaian kinerja baik.

3.2.7. CV Harga Gula Pasir di Konsumen (%)

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, rata-rata harga gula pasir di tingkat konsumen selama tahun 2019 adalah Rp12.755/kg, dengan capaian kinerja koefisien variasi sebesar 3,35%. Apabila dibandingkan capaian tahun 2018 ditingkat konsumen (1,17%), maka capaian tahun 2019 masih lebih rendah, yang berarti harga lebih stabil.

Capaian tahun 2019 sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤10%. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga gula pasir di tingkat konsumen stabil dengan capaian kinerja baik.

3.3. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian stabilitas harga pangan pokok dan strategis tidak lepas dari hasil sinergitas dan langkah koordinatif Badan Ketahanan Pangan, khususnya Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dengan seluruh instansi dan lembaga terkait, seperti:

a. Direktorat Jenderal Teknis di Lingkup Kementerian Pertanian

Dukungan dari Direktorat Jenderal Teknis di Lingkup Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Ditjen Perkebunan) terutama adalah dalam bentuk penyediaan data produksi. Dengan data informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk koordinasi untuk penghitungan prognosa produksi dan kebutuhan pangan pokok/strategis sehingga dapat diketahui kondisi ketersediaan/pasokan/stok serta kebutuhan pangan masyarakat, baik periode tahunan atau bulanan.

Data ini penting untuk mengambil langkah-langkah kebijakan, misalnya apabila dari data prognosa menunjukkan produksi/ketersediaan pangan kurang pada periode tertentu, perlu diupayakan stabilitas pasokan dan distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Koordinasi dilakukan secara kontinyu untuk meng-update data dan informasi produksi dan/atau kebutuhan pangan pokok/startegis.

b. Kementerian Perdagangan

Badan Ketahanan Pangan bersama Kementerian Perdagangan telah mengembangkan beberapa langkah strategis dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok dan strategis, terutama melalui peningkatan efisiensi rantai pasok dan langkah intervensi ketika terjadi fluktuasi harga pangan.

Misalnya selama pelaksanaan Hari-Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya pada Puasa-Idul Fithri maupun Natal-Tahun Baru, yang seringkali terjadi gejolak harga, BKP dan Kementerian Perdagangan bersama-sama menjaga dan mengamankan stabilitas pasokan dan harga pangan. Upaya tersebut antara lain melalui rapat koordinasi di propinsi, monitoring pasokan dan harga di lapangan, serta gelar pangan murah/bazar/Operasi Pasar.

c. Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam perhitungan prognosa produksi dan kebutuhan pangan, salah satu data/informasi yang diperlukan antara lain data realisasi produksi dan data kebutuhan/konsumsi pangan pokok/ strategis. Data konsumsi melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang disediakan oleh BPS secara kontinu setiap tahun. Data lain yang dimanfaatkan dari BPS adalah perkembangan harga

pangan baik produsen maupun konsumen (hanya nasional) dan data inflasi yang sangat diperlukan dalam analisis stabilitas harga pangan.

d. Perum BULOG

Koordinasi yang dilaksanakan antara BKP dan BULOG antara lain terkait data dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, langkah strategis dalam rangka serap gabah dari petani (sergap), serta langkah operasional pengendalian harga saat terjadi fluktuasi harga melalui Operasi Pasar. Koordinasi tidak hanya di tingkat Pusat, namun sudah dilakukan di tingkat daerah, baik propinsi maupun kabupaten/ kota dalam upaya stabilitas pasokan dan harga pangan, terlebih saat HBKN.

e. Satgas Pangan

Kerjasama yang dilaksanakan terutama terkait upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan. Sinergi yang dilaksanakan antara lain melalui rapat koordinasi gabungan stabilisasi harga pangan pada periode HBKN, serta pemantauan dan pengawasan harga pangan langsung ke pasar dan/atau pelaku usaha pangan. Koordinasi tidak hanya dilakukan ditingkat Pusat, namun sudah dilaksanakan ditingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

f. Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) dan PD. Pasar Jaya DKI Jakarta

Kerjasama yang telah dikembangkan dengan instansi pengelola pasar di DKI Jakarta terutama adalah terkait data pasokan, stok dan harga pangan. Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta untuk memantau pasokan, stok dan harga beras. Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta khususnya untuk memantau pasokan dan harga cabai (cabai rawit merah, cabai merah keriting) serta bawang (bawang merah dan bawag putih). Sedangkan PD Pasar Jaya Jakarta untuk memantau harga pangan ditingkat pasar/konsumen yang tersebar di 25 pasar wilayah DKI Jakarta.

PIBC dan PIKJ merupakan salah satu barometer pasokan/stok dan harga pangan nasional, tidak hanya DKI Jakarta, mengingat pemasukan dan pengeluaran bahan pangan tersebut meliputi berbagai wilayah antar propinsi dan/atau kabupaten. Perubahan pasokan/stok dan harga beras di PIBC serta cabai dan bawang di PIKJ sedikit atau banyak akan mempengaruhi harga konsumen baik di DKI Jakarta maupun wilayah lainnya.

3.4. Capaian Kinerja Kegiatan Strategis Lainnya Pendukung Capaian Indikator Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

3.4.1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia

Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui: (a) status distribusi pangan; (b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan; dan (c) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah. Permasalahan utama yang terjadi selama ini adalah tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Sebagai solusi permanen dalam mengatasi disparitas harga pangan tersebut, Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melakukan terobosan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, serta efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga ditingkat produsen pada masa panen raya, dan tingginya harga ditingkat konsumen pada saat paceklik, serta menjadi instrumen yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga pada saat suplai melimpah maupun kurang.

Pada tahun 2019 sasaran Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) berjumlah 1.325 LUPM, terdiri dari: (1) 500 LUPM Tahap Penumbuhan; (2) 455 LUPM Tahap Pengembangan; dan (3) 370 LUPM Tahap Pembinaan. Sasaran TTI berjumlah 3.335 unit di kabupaten/kota yang mengalami ketidakstabilan harga dan pasokan pangan pokok/strategis di 22 provinsi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan 31 Desember 2019 bahwa Gapoktan/LUPM Kegiatan PUPM Tahap Penumbuhan yang sudah mencairkan dana operasional sebesar Rp 60 juta berjumlah 500 Gapoktan/LUPM (100%) dari target. Begitu juga pengadaan mesin pendukung produksi dan pengolahan beras berupa Rice Milling Unit (RMU) atau alat bagian dari RMU untuk Gapoktan/LUPM Tahap Penumbuhan mencapai 100% (**Tabel 8**).

Tabel 8. Target dan Realisasi Bantuan Pemerintah Kegiatan PUPM/TTI Tahun 2019 Tahap Penumbuhan

		Penumbuhan				
		alokasi	realisasi	Pagu Alokasi Rp.(Juta)	Pagu Realisasi Rp (Juta)	%
1	Aceh	8	8	1,280	1,280	100
2	Sumatera Utara	20	20	3,200	3,200	100
3	Sumatera Barat	11	11	1,760	1,760	100
4	Riau	13	13	2,080	2,080	100
5	Jambi	16	16	2,560	2,560	100
6	Sumatera Selatan	44	44	7,040	7,040	100
7	Bengkulu	13	13	2,080	2,080	100
8	Lampung	45	45	7,200	7,200	100
9	Banten	27	27	4,320	4,320	100
10	Jawa Barat	51	51	8,160	8,160	100
11	Jawa Tengah	53	53	8,480	8,480	100
12	DIY	19	19	3,040	3,040	100
13	Jawa Timur	32	32	5,120	5,120	100
14	Bali	10	10	1,600	1,600	100
15	NTB	20	20	3,200	3,200	100
16	Kalimantan Barat	12	12	1,920	1,920	100
17	Kalimantan Tengah	9	9	1,440	1,440	100
18	Kalimantan Selatan	2	2	320	320	100
19	Sulawesi Utara	15	15	2,400	2,400	100
20	Sulawesi Tengah	13	13	2,080	2,080	100
21	Sulawesi Selatan	55	55	8,800	8,800	100
22	Gorontalo	12	12	1,920	1,920	100
Total		**500**	**500**	**80,000**	**80,000**	**100**

Sumber: Bidang Distribusi, BKP

Gapoktan/LUPM yang memasuki Tahap Pengembangan dari alokasi 454 Gapoktan/LUPM yang mendapatkan dana pemerintah berupa biaya operasional sebesar Rp60 juta, pada posisi 31 Desember 2019 tercapai 451 Gapoktan/LUPM yang memenuhi syarat atau sebesar 99,12%. Sedangkan Gapoktan/LUPM Tahap Pembinaan dari alokasi 370 Gapoktan/LUPM yang dialokasikan mendapatkan dana pemerintah sebesar Rp.60 juta, sebanyak 370 Gapoktan yang memenuhi syarat atau sebesar 100% (**Tabel 8**).

Provinsi yang tidak dapat 100% mencairkan alokasi tahap pengembangan adalah: (1) Provinsi Aceh dengan 1 (satu) LUPM, yaitu Gapoktan Pemuda Tani di Kabupaten Aceh Besar dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2019 tidak dapat mencapai target penyaluran; (2) Provinsi Sumatera Utara dengan 2 (dua) LUPM, yaitu Gapoktan Adil di Kota Sidempuan dan Gapoktan Lau Bengap di Kabupaten Karo dikarenakan sampai dengan akhir tahun tidak mencapai target penyaluran, namun Gapoktan Lau Bengap sudah mengembalikan dana modal sebesar Rp 100 juta pada 8 Agustus 2019; serta (3) Provinsi Sumatera Selatan dengan 1 (satu) LUPM, yaitu Gapoktan Giat Prima di Kabupaten Muratara, sehingga realisasi tahap pengembangan adalah 99,12% atau 4 LUPM 2019 (**Tabel 9**).

Tabel 9. Target dan Realisasi Bantuan Pemerintah Kegiatan PUPM/TTI Tahun 2019 Tahap Pengembangan

		Pengembangan				
		alokasi	realisasi	Pagu Alokasi Rp.(Juta)	Pagu Realisasi Rp (Juta)	%
1	Aceh	6	5	360	300	83
2	Sumatera Utara	23	21	1,380	1,260	91
3	Sumatera Barat	6	6	360	360	100
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	46	45	2,760	2,700	98
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	42	42	2,520	2,520	100
9	Banten	24	24	1,440	1,440	100
10	Jawa Barat	78	78	4,680	4,680	100
11	Jawa Tengah	76	76	4,560	4,560	100
12	DIY	10	10	600	600	100
13	Jawa Timur	43	43	2,580	2,580	100
14	Bali	8	8	480	480	100
15	NTB	11	11	660	660	100
16	Kalimantan Barat	10	10	600	600	100
17	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
18	Kalimantan Selatan	5	5	300	300	100
19	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
20	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
21	Sulawesi Selatan	59	59	3,540	3,540	100
22	Gorontalo	8	8	480	480	100
Total		**455**	**451**	**27,300**	**27,060**	**99.12**

Sumber: Bidang Distribusi, BKP

Tabel 10. Target dan Realisasi Bantuan Pemerintah Kegiatan PUPM/TTI Tahun 2019 Tahap Pembinaan

		Pembinaan				
		alokasi	realisasi	Pagu Alokasi Rp.(Juta)	Pagu Realisasi Rp (Juta)	%
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	19	19	1,140	1,140	100
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	33	33	1,980	1,980	100
9	Banten	85	85	5,100	5,100	100
10	Jawa Barat	117	117	7,020	7,020	100
11	Jawa Tengah	65	65	3,900	3,900	100
12	DIY	-	-	-	-	-
13	Jawa Timur	41	41	2,460	2,460	100
14	Bali	-	-	-	-	-
15	NTB	10	10	600	600	100
16	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
17	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
18	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
19	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
20	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
21	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
22	Gorontalo	-	-	-	-	-
Total		**370**	**370**	**22,200**	**22,200**	**100**

Sumber: Bidang Distribusi, BKP

Adapun capaian kinerja PUPM Tahun 2019 berdasarkan laporan kinerja provinsi (e-monev banper BKP) sebagai berikut:

a. Kinerja PUPM Tahap Penumbuhan

Kinerja tahap penumbuhan kegiatan PUPM 2019 berdasarkan laporan kinerja provinsi (e-monev banper BKP) diukur dengan 2 komponen indikator kinerja yaitu realisasi alat sebesar 50% dan kinerja penyaluran beras ke TTI sebesar 50%. Indikator ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk tahap penumbuhan gapoktan tidak mendapatkan bantuan modal berupa uang, akan tetapi berupa barang dan bantuan uang berupa dana operasional.

Sampai dengan posisi laporan per 31 Desember 2019, kinerja kegiatan PUPM khususnya untuk tonase pencapaian target nasional dari 22 provinsi pelaksana kegiatan sebesar 97,11%, dengan posisi capaian target 100% yaitu di Provinsi Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Riau, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Sedangkan posisi capaian target terkecil adalah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 80.83% seperti terlihat pada **Tabel 11**.

Secara rinci, kinerja PUPM tahun 2019 pada Tahap Penumbuhan sebagai berikut:

(1) Kinerja Alat

Sampai dengan 31 Desember 2019 proses pengadaan mesin pendukung produksi dan pengolahan beras untuk Gapoktan/LUPM Tahap Penumbuhan sampai mencapai 100 %. Semua provinsi sudah memanfaatkan bantuan alat yang telah diserahkan ke Gapoktan/LUPM. Dengan adanya bantuan pendukung produksi dan pengolahan beras, produktifitas pengolahan gabah jadi beras menjadi lebih lancar.

(2) Kinerja Penyaluran

Kinerja penyaluran beras oleh Gapoktan/LUPM ke TTI posisi 31 Desember 2019 untuk tonase pencapaian target nasional dari 22 provinsi mencapai 97,11%. Posisi capaian target 100% yaitu di Provinsi Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Riau, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo seluruhnya setara 50 Ton untuk masing- masing LUPM. Sedangkan posisi capaian target terkecil adalah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 80.83% atau rata-rata volume penyaluran beras per Gapoktan/LUPM sebesar 41.6 ton.

Dari 22 Provinsi, 15 diantaranya kinerja penyalurannya sudah diatas rata-rata nasional, yaitu Provinsi Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, D. I. Yogyakarta, Riau, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Barat. Sedangkan 7 Provinsi lainnya masih dibawah rata-rata yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Banten, Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah.

Tabel 11. Kinerja PUPM 2019 Tahap Penumbuhan

NO.	Provinsi	JUMLAH LUPM		INDIKATOR		TOTAL KINERJA (%)
		Target	Realisasi	REALISASI ALAT (50%)	KINERJA PENYALURAN BERAS KE TTI (50%)	
1	BALI	10	10	100.00%	100.00%	100.00%
2	SULAWESI SELATAN	55	55	100.00%	100.00%	100.00%
3	SUMATERA BARAT	11	11	100.00%	100.00%	100.00%
4	BENGKULU	13	13	100.00%	100.00%	100.00%
5	DI YOGYAKARTA	19	19	100.00%	100.00%	100.00%
6	RIAU	13	13	100.00%	100.00%	100.00%
7	KALIMANTAN SELATAN	2	2	100.00%	100.00%	100.00%
8	GORONTALO	12	12	100.00%	100.00%	100.00%
9	JAWA TENGAH	60	60	100.00%	99.84%	99.92%
10	JAWA BARAT	51	51	100.00%	99.80%	99.90%
11	JAWA TIMUR	32	32	100.00%	99.66%	99.83%
12	ACEH	8	8	100.00%	99.50%	99.75%
13	LAMPUNG	45	45	100.00%	98.78%	99.39%
14	SUMATERA UTARA	20	20	100.00%	98.44%	99.22%
15	KALIMANTAN BARAT	12	12	100.00%	98.01%	99.01%
16	NUSA TENGGARA BARAT	13	13	100.00%	94.77%	97.38%
17	JAMBI	16	16	100.00%	93.99%	97.00%
18	SUMATERA SELATAN	44	44	100.00%	92.54%	96.27%
19	SULAWESI TENGAH	13	13	100.00%	91.87%	95.93%
20	BANTEN	27	27	100.00%	89.30%	94.65%
21	SULAWESI UTARA	15	15	100.00%	84.06%	92.03%
22	KALIMANTAN TENGAH	9	9	100.00%	80.83%	90.42%
GRAND TOTAL		**500**	**500**	**100.00%**	**97.11%**	**98.56%**

b. Kinerja PUPM Tahap Pengembangan

Kinerja tahap pengembangan kegiatan PUPM 2019 berdasarkan laporan kinerja provinsi (e-monev banper BKP) diukur dengan 2 komponen indikator kinerja yaitu penggunaan dana operasional sebesar 20% dan kinerja penyaluran beras ke TTI sebesar 80%. Indikator ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk tahap pengembangan gapoktan modal berupa uang ditahun 2018, dan mendapatkan bantuan uang berupa dana operasional di tahun 2019.

Angka kinerja penyaluran beras ke TTI PUPM Tahap Pengembangan 2019 secara nasional telah mencaiapi 97,15% dan penggunaan dana operasional mencapai 97,15%, sehingga total kinerja PUPM Tahap Pengembangan adalah 97,15%. Dengan kinerja penyaluran yang sudah mencapai 100% atau rata rata volume penyaluran beras per Gapoktan/LUPM sudah mencapai 50 Ton diperoleh Provinsi Aceh, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi

Selatan, Sumatera Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan Provinsi yang kinerja penyalurannya paling rendah adalah Provinsi Banten dengan nilai 80,55% atau rata rata volume penyaluran beras per Gapoktan/LUPM 40.21 ton (**Tabel 12**).

Dari 16 Provinsi, 10 diantaranya kinerja penyalurannya sudah diatas rata rata nasional, yaitu Provinsi Aceh, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Lampung. Sedangkan 6 Provinsi lainnya masih dibawah rata-rata yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Banten.

Tabel 12. Kinerja PUPM 2019 Tahap Pengembangan

NO.	Provinsi	JUMLAH LUPM		INDIKATOR		TOTAL KINERJA (%)
		Target	Realisasi	DANA OPERASIONAL (20 %)	KINERJA PENYALURAN BERAS KE TTI (80%)	
1	ACEH	6	5	100.00%	100.00%	100.00%
2	DI YOGYAKARTA	10	10	100.00%	100.00%	100.00%
3	GORONTALO	8	8	100.00%	100.00%	100.00%
4	NUSA TENGGARA BARAT	11	11	100.00%	100.00%	100.00%
5	SULAWESI SELATAN	59	59	100.00%	100.00%	100.00%
6	SUMATERA BARAT	6	6	100.00%	100.00%	100.00%
7	JAWA TENGAH	76	76	99.97%	100.00%	99.99%
8	JAWA BARAT	78	78	100.00%	99.83%	99.86%
9	KALIMANTAN BARAT	10	10	99.21%	99.21%	99.21%
10	LAMPUNG	42	42	97.07%	99.37%	98.91%
11	SUMATERA UTARA	23	21	96.24%	96.24%	96.24%
12	JAWA TIMUR	43	43	95.56%	96.50%	96.31%
13	BALI	8	8	87.75%	100.00%	97.55%
14	SUMATERA SELATAN	46	45	94.51%	89.23%	90.29%
15	KALIMANTAN SELATAN	5	5	88.62%	88.68%	88.67%
16	BANTEN	24	24	79.91%	80.55%	80.42%
GRAND TOTAL		**455**	**451**	**97.15%**	**97.15%**	**97.15%**

c. Kinerja PUPM Tahap Pembinaan

Kinerja tahap pembinaan kegiatan PUPM 2019 berdasarkan laporan kinerja provinsi (e-monev banper BKP) diukur dengan 2 komponen indikator kinerja yaitu penggunaan dana operasional sebesar 20% dan kinerja penyaluran beras ke TTI sebesar 80%. Indikator ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk tahap pengembangan gapoktan modal berupa uang ditahun 2018 dan mendapatkan bantuan uang berupa dana operasional di tahun 2019.

Angka kinerja penyaluran beras ke TTI PUPM Tahap Pembinaan 2019 secara nasional telah mencapai 95,97% dan penggunaan dana operasional mencapai 95,97%, sehingga total kinerja PUPM Tahap Pengembangan adalah 96,77%. Dengan kinerja penyaluran yang sudah memenuhi target yaitu Provinsi Lampung dengan nilai kinerja 100% atau rata rata volume penyaluran beras per Gapoktan/LUPM sudah mencapai 50 Ton. Sedangkan Provinsi yang kinerja penyalurannya paling rendah adalah Provinsi Banten dengan nilai 90,10% atau rata rata volume penyaluran beras per Gapoktan/LUPM 45.05 ton (**Tabel 13**).

Dari 7 Provinsi, 3 diantaranya kinerja penyalurannya sudah diatas rata-rata nasional, yaitu Provinsi Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan 4 Provinsi lainnya masih dibawah rata-rata yaitu Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan dan Banten.

Tabel 13. Kinerja PUPM 2019 Tahap Pembinaan

NO.	Provinsi	JUMLAH LUPM		INDIKATOR		TOTAL KINERJA (%)
		Target	Realisasi	DANA OPERASIONAL (20 %)	KINERJA PENYALURAN BERAS KE TTI (80%)	
1	LAMPUNG	33	33	100.00%	100.00%	100.00%
2	JAWA BARAT	117	117	100.00%	99.82%	99.86%
3	JAWA TENGAH	65	65	99.67%	99.55%	99.57%
4	JAWA TIMUR	41	41	99.81%	95.57%	96.42%
5	NUSA TENGGARA BARAT	10	10	98.15%	96.56%	96.88%
6	SUMATERA SELATAN	19	19	91.90%	93.33%	93.04%
7	BANTEN	85	85	84.82%	91.42%	90.10%
GRAND TOTAL		**370**	**370**	**95.97%**	**96.97%**	**96.77%**

3.4.2. Toko Tani Indonesia Center (TTIC)

Kehadiran TTIC merupakan bagian solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan yaitu Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga agar produsen tidak mengalami kerugian serta konsumen tetap mendapatkan harga. Kegiatan TTIC merupakan kegiatan strategis di BKP Kementerian Pertanian. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi harga dan kemudahan akses pangan di tingkat konsumen.

Dalam rangka memfasilitasi kegiatan PUPM melalui TTI dengan memudahkan konsumen menjangkau komoditas pangan yang langsung berasal dari Gapoktan/LUPM dan memberikan kesempatan Gapoktan/supplier pangan untuk

memasarkan langsung komoditasnya serta upaya pengendalian harga agar sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, maka sejak tahun 2017 dibentuk Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di 5 provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Tahun 2018 ditumbuhkan TTIC di 15 Provinsi lainnya, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara. Pada tahun 2019 dibentuk kembali TTIC di 12 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Total TTIC yang dibangun sampai dengan tahun 2019 di 32 provinsi. Selain TTIC Pasar Minggu, untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan di daerah Bogor pada bulan Mei 2019 telah dibangun TTIC Bogor, melalui dana Kementerian Pertanian.

a. Pelaksanaan Kegiatan di TTIC Pasar Minggu

Total volume pasokan komoditas pangan selama tahun 2019 sebagai berikut: beras 328.350 kg, minyak goreng 53.502 lt, gula pasir 97.387 kg, cabai merah keriting (cmk) 30.305 kg, cabai rawit merah (crm) 16.656 kg, bawang merah 80.949 kg, bawang putih 58.628 kg, daging ayam ras 62.533 kg, daging sapi 470.764 kg, dan telur ayam ras 103.988 kg.

Total volume penjualan komoditas beras sebesar 325.092 kg dengan rerata harga penjualan Rp8.712/kg, minyak goreng 53.629 lt dengan rerata harga penjualan Rp10.310/kg, gula pasir 95.444 kg dengan rerata harga penjualan Rp11.434/kg, CMK 29.610 kg dengan rerata harga penjualan Rp23.598/kg, CRM 16.449 kg dengan rerata harga penjualan Rp26.032/kg, bawang merah 77.467 kg dengan rerata harga penjualan Rp19.427/kg, bawang putih 77.467 kg dengan rerata harga penjualan Rp22.333/kg, daging ayam ras 62.522 kg dengan rerata harga penjualan Rp30.706/kg, daging sapi 289.469 dengan rerata harga penjualan Rp70.000/kg dan telur ayam ras 102.603 kg dengan rerata harga penjualan Rp21.773/kg. Perkembangan harga pangan pokok/strategis di TTIC Pasar Minggu DKI Jakarta pada tahun 2019 seperti terlihat pada **Gambar 2**.

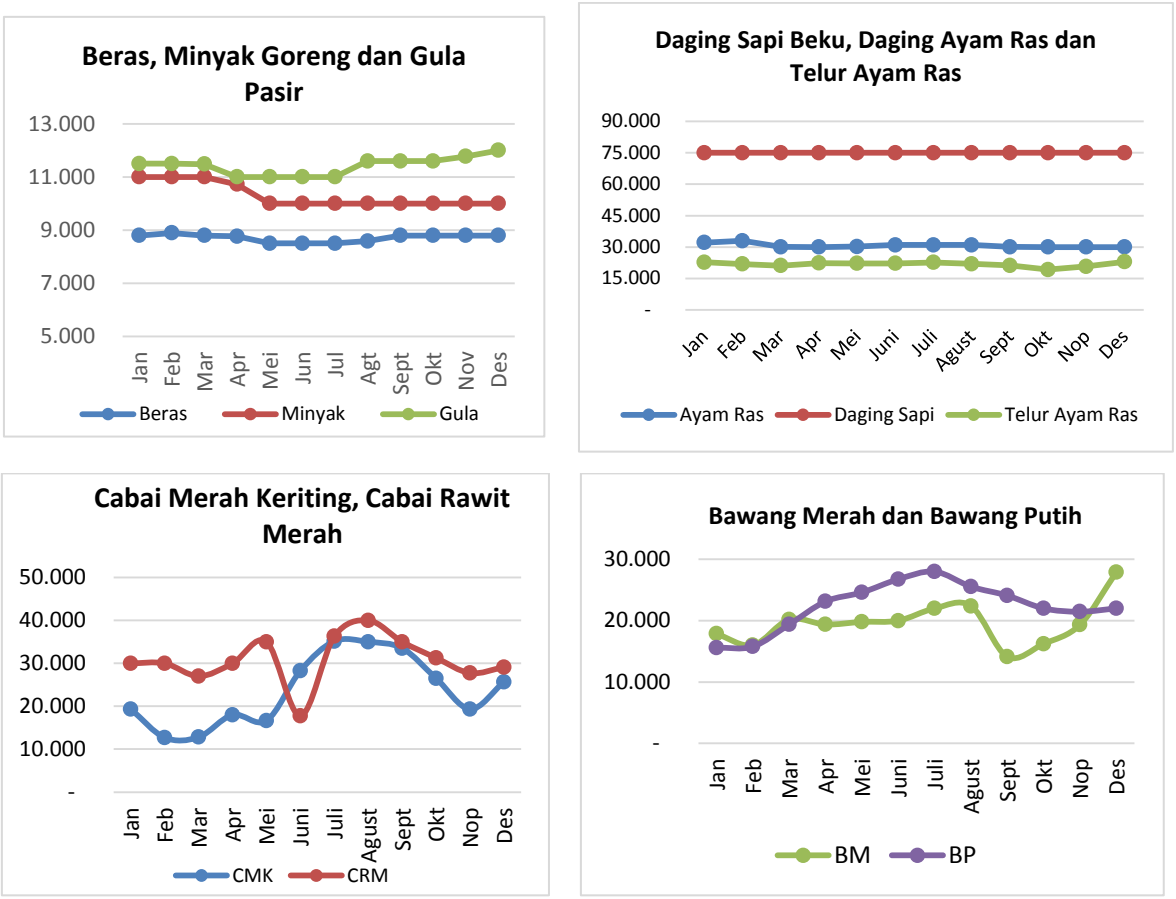

Gambar 2. Perkembangan Harga Komoditas Pangan Pokok/Strategis di TTIC Pasar Minggu DKI Jakarta Tahun 2019

b. Pelaksanaan kegiatan di TTIC Bogor

Total volume pasokan selama tahun 2019 untuk komoditas beras sebesar 73.160 kg, minyak goreng 11.284 lt, gula pasir 11.362 kg, CMK 2.321 kg, CRM 639 kg, bawang merah 6.566 kg, bawang putih 6.185 kg, daging ayam ras 10.494 kg, daging sapi 13.858 dan telur ayam ras 16.628 kg.

Total volume penjualan beras sebesar 71.135 kg dengan rerata harga penjualan Rp8.662/kg, minyak goreng 11.284 lt dengan rerata harga penjualan Rp10.000/kg, gula pasir 10.786 kg dengan rerata harga penjualan Rp11.435/kg, CMK 2.071 kg dengan rerata harga penjualan Rp27.120/kg, CRM 564 kg dengan rerata harga penjualan Rp27.232/kg, bawang merah 5.680 kg dengan rerata harga penjualan Rp19.991/kg, bawang putih 5.396 kg dengan rerata harga penjualan Rp24.367/kg, daging ayam ras 9.172 kg dengan rerata harga penjualan Rp28.759/kg, daging sapi 13.620 kg dengan rerata harga penjualan Rp75.000/kg dan telur ayam ras 15.962 kg dengan rerata harga penjualan Rp21.458/kg.

Perkembangan harga pangan pokok/strategis di TTIC Bogor Jawa Barat pada tahun 2019 (**Gambar 3**).

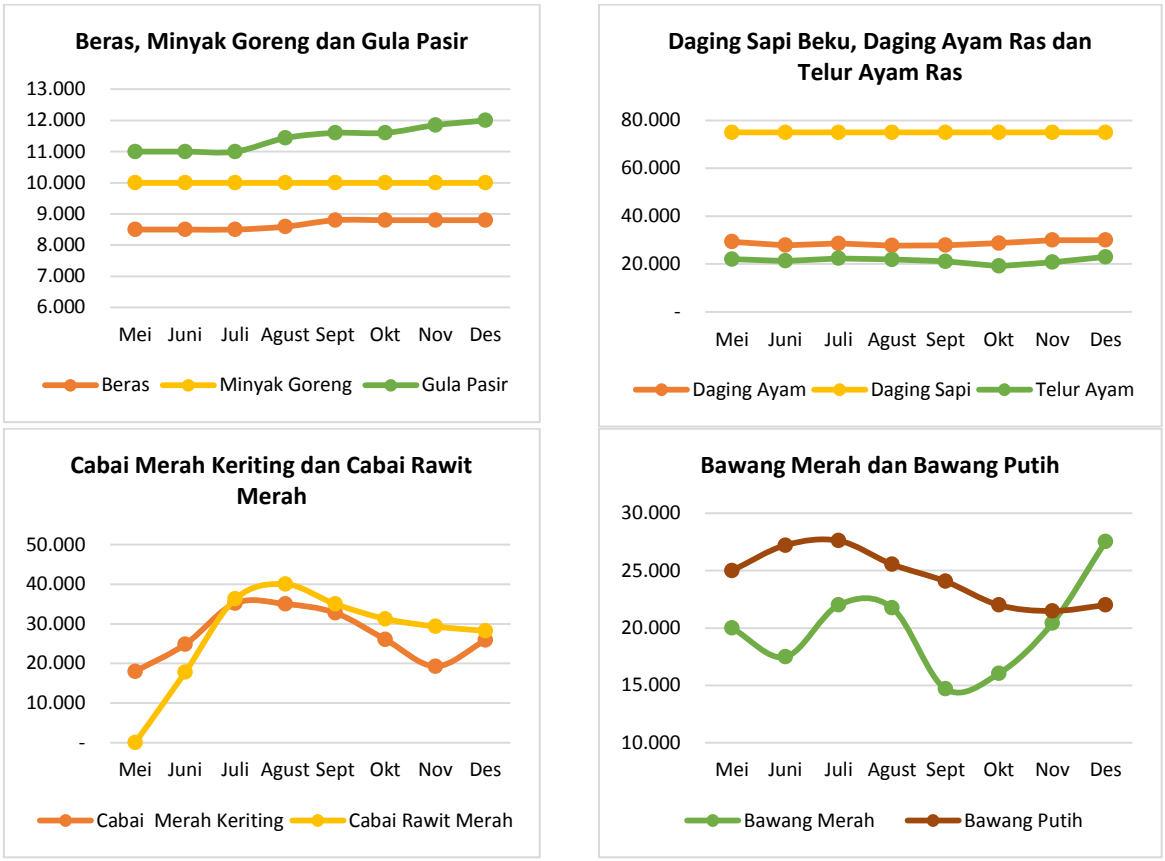

Gambar 3. Perkembangan Harga Komoditas Pangan Pokok/Strategis di TTIC Bogor Jawa Barat Tahun 2019

c. Pelaksanaan kegiatan di TTIC Provinsi

Total volume penjualan komoditas beras sebesar 1.519 ton dengan rerata harga penjualan Rp8.764/kg, minyak goreng 143 ton dengan rerata harga penjualan Rp 10.593/lt, gula pasir 158 ton dengan rerata harga penjualan Rp10.855/kg, CMK 82.500 kg dengan rerata harga penjualan Rp 22.090/kg, CRM 18.300 kg dengan rerata harga penjualan Rp18.257/kg, bawang merah 130.000 kg dengan rerata harga penjualan Rp17.897/kg, bawang putih 91.100 kg dengan rerata harga penjualan Rp22.367/kg, daging ayam ras 76.590 kg dengan rerata harga penjualan Rp16.203/kg, daging sapi 479.000 kg dengan rerata harga penjualan Rp84.500/kg dan telur ayam ras 189.910 kg kg dengan rerata harga penjualan Rp19.971/kg.

3.4.3. Pengembangan *E-commerce*

Komitmen Pemerintah dalam penyediaan komoditas strategis yang mudah diakses oleh masyarakat serta terjaminnya kualitas serta ketersediaan di setiap lokasi Toko Tani Indonesia (TTI) mendorong Kementerian Pertanian mengimplementasikan *platform* B2B *commerce* yang akan digunakan bersama oleh Gapoktan serta TTI. Masing-masing pihak bisa memanfaatkan *platform* tersebut untuk melakukan transaksi termasuk di dalamanya *forecast* kebutuhan, jumlah stok, volume transaksi, status pengiriman, pembayaran, serta harapan kedepannya untuk mengimplementasikan *cashless* dalam pola transaksi. Dengan dukungan *platform* tersebut diharapkan bisa tercapai tujuan dalam penyediaan pangan murah, pangan berkualitas, yang pada akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakan khususnya untuk menciptakan stabilisasi harga atas komoditas pangan strategis.

Nilai transaksi yang ada pada aplikasi Rp47.483.269.500,- , terjadi dari tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2019. Total TTI yang terdaftar pada aplikasi TTI Online adalah 4.113 Toko dan tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan DIY. Total Gapoktan yang terdaftar pada aplikasi TTI Online adalah 1.294 gapoktan dan tersebar di Provinsi Jawa Barat, Banten, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan DIY. Total penyaluran sebesar 5.583.376 kg.

a. Pengembangan *e-commerce* Jabodetabek

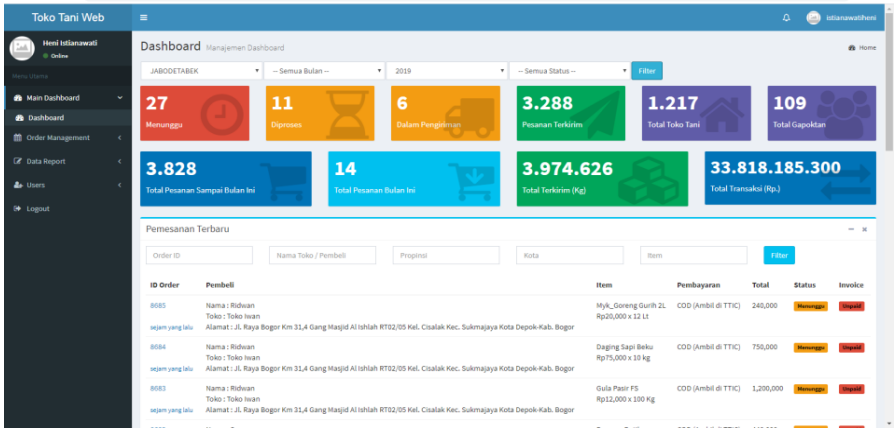

Nilai transaksi yang ada pada aplikasi Rp33.818.185.300,- , transaksi ini terjadi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Total TTI yang terdaftar pada aplikasi TTI Online adalah 1.217 Toko dan jumlah TTI yang aktif sejumlah 338 Toko. Gapoktan yang memasok TTI Jabodetabek berasal dari

Provinsi Jawa Barat dan Banten, dengan jumlah Gapoktan yang terdaftar sejumlah 109 Gapoktan.

b. Pengembangan *e-commerce* Jawa Barat

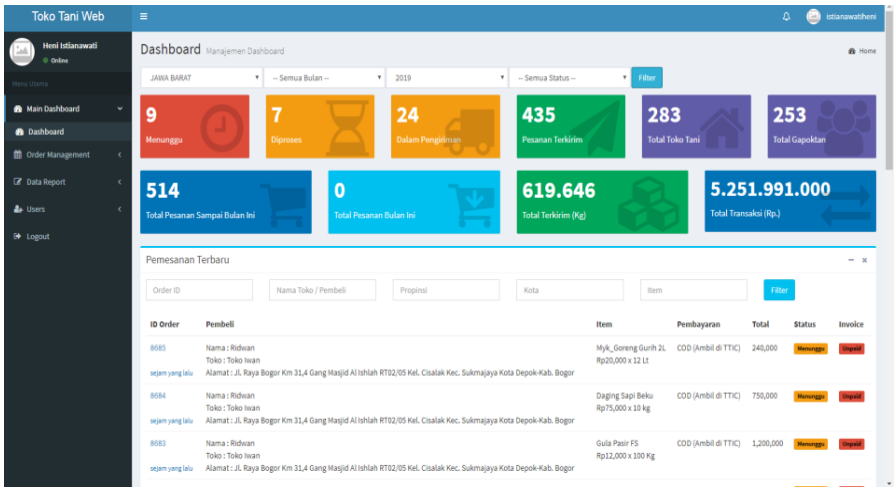

Nilai transaksi yang ada pada aplikasi adalah Rp5.251.991.000,- , transaksi ini terjadi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Total TTI yang terdaftar pada aplikasi TTI Online adalah 283 Toko dan jumlah Gapoktan yang terdaftar sejumlah 253 Gapoktan. Dari 283 TTI, jumlah TTI yang aktif 94, dan dari 253 Gapoktan yang terdaftar, gapoktan yang aktif sejumlah 94 Gapoktan. Total volume beras yang telah dikirim ke TTI adalah sebanyak 619.646 kg.

c. Pengembangan *e-commerce* Bali

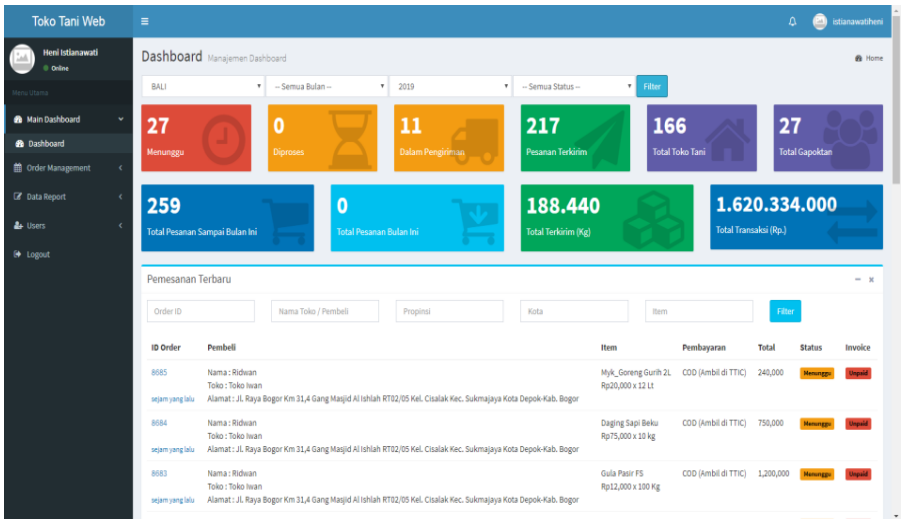

Nilai transaksi yang ada pada aplikasi adalah Rp1.620.334.000,- , transaksi ini terjadi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Total TTI yang terdaftar pada aplikasi TTI Online adalah 166 Toko, dengan jumlah Gapoktan yang terdaftar sejumlah 27 Gapoktan. Dari 166 TTI, jumlah TTI yang aktif 50, dan dari 27 Gapoktan yang terdaftar, jumlah gapoktan yang aktif

sejumlah 11 Gapoktan. Total volume beras yang telah dikirim ke TTI adalah sebanyak 188.440 kg.

d. Pengembangan *e-commerce* Lampung

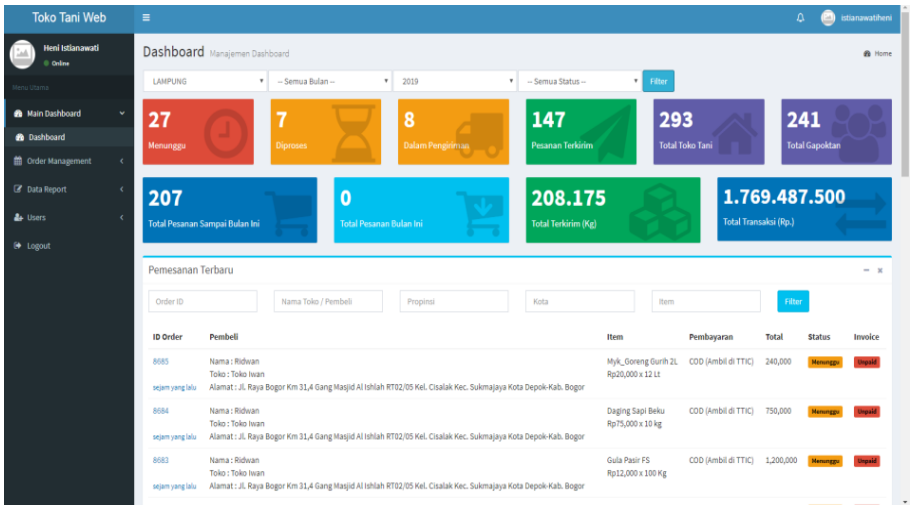

Nilai transaksi yang ada pada aplikasi adalah Rp1.769.487.500,- , transaksi ini terjadi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Total TTI yang terdaftar pada aplikasi TTI Online adalah 293 Toko dan dengan jumlah Gapoktan yang terdaftar sejumlah 241 Gapoktan. Dari 293 TTI, jumlah TTI yang aktif 56, dan dari 241 Gapoktan yang terdaftar, gapoktan yang aktif 25 Gapoktan. Total volume beras yang telah dikirim ke TTI adalah sebanyak 208.175 kg.

e. Pengembangan e-commerce Jawa Tengah

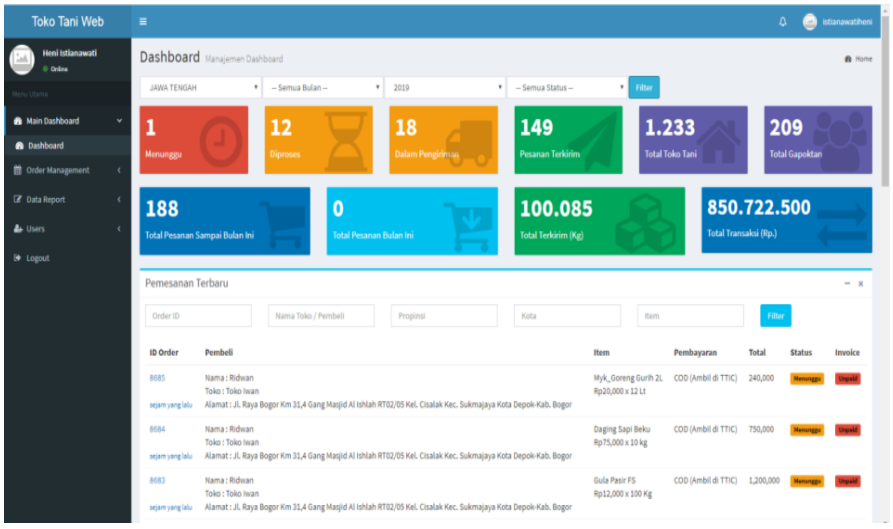

Nilai transaksi sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp850.722.500,-. Total TTI yang terdaftar pada aplikasi TTI Online di Provinsi Jawa Tengah adalah 1.233 Toko dan dengan jumlah Gapoktan yang terdaftar sejumlah 209 Gapoktan. Dari 1.233 TTI, jumlah TTI yang aktif 50, dan dari 209 Gapoktan yang terdaftar, yang aktif 25 Gapoktan. Total volume beras yang dikirim ke TTI sebanyak 100.085 kg.

f. Pengembangan *e-commerce* DIY

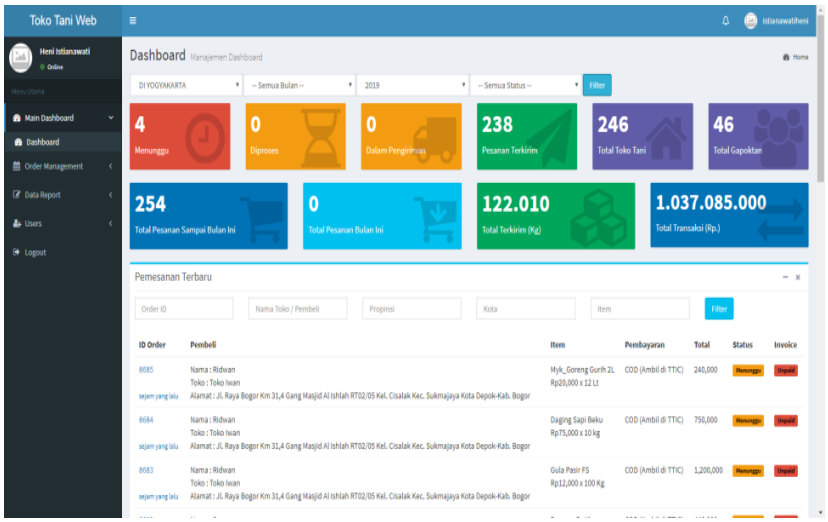

Nilai transaksi sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp1.037.085.000,-. Total TTI yang terdaftar pada aplikasi TTI Online di Provinsi DIY sebanyak 246 Toko dan dengan jumlah Gapoktan yang terdaftar sejumlah 46 Gapoktan. Dari 246 TTI, jumlah TTI yang aktif 56, dan dari 46 Gapoktan yang terdaftar, yang aktif sejumlah 17 Gapoktan. Total volume beras yang telah dikirim ke TTI sebanyak 122.010 Kg.

g. Pengembangan *e-commerce* Sulawesi Selatan

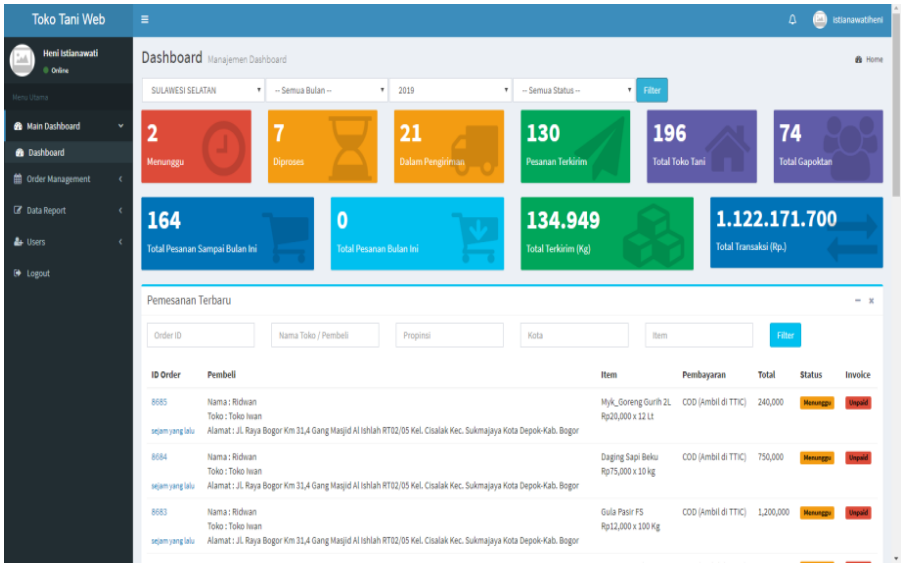

Nilai transaksi sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp1.122.171.700,-. Total TTI yang terdaftar pada aplikasi TTI Online di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 196 Toko dan dengan jumlah Gapoktan yang terdaftar sejumlah 74 Gapoktan. Dari 196 TTI, jumlah TTI yang aktif 50, dan dari 74 Gapoktan yang terdaftar, yang aktif 21 Gapoktan. Total volume beras yang telah dikirim ke TTI sebanyak 134.949 Kg.

h. Pengembangan *e-commerce* Sumatera Utara

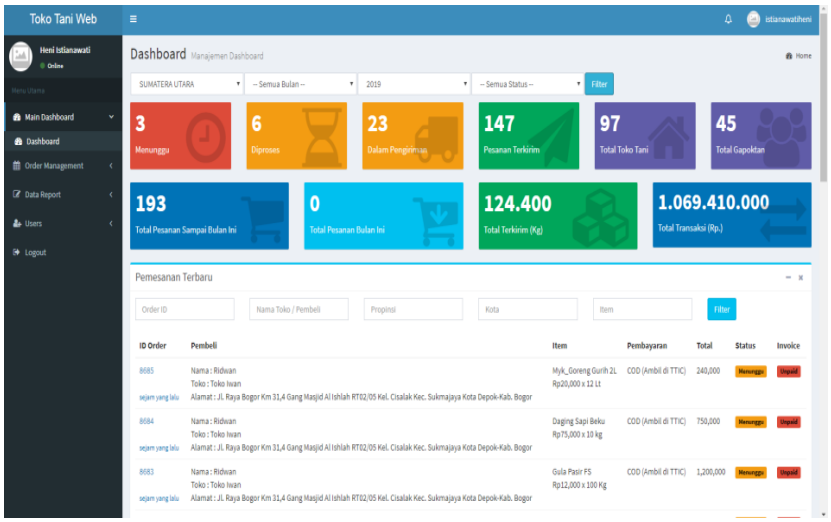

Nilai transaksi sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp1.069.410.000,-. Total TTI yang terdaftar pada aplikasi TTI Online di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 32 Toko dan dengan jumlah Gapoktan yang terdaftar sejumlah 15 Gapoktan. Dari 97 TTI, jumlah TTI yang aktif 16, dan dari 45 Gapoktan yang terdaftar, yang aktif 8 Gapoktan.Total volume beras yang telah dikirim ke TTI sebanyak 124.400 Kg.

i. Pengembangan *e-commerce* Sumatera Selatan

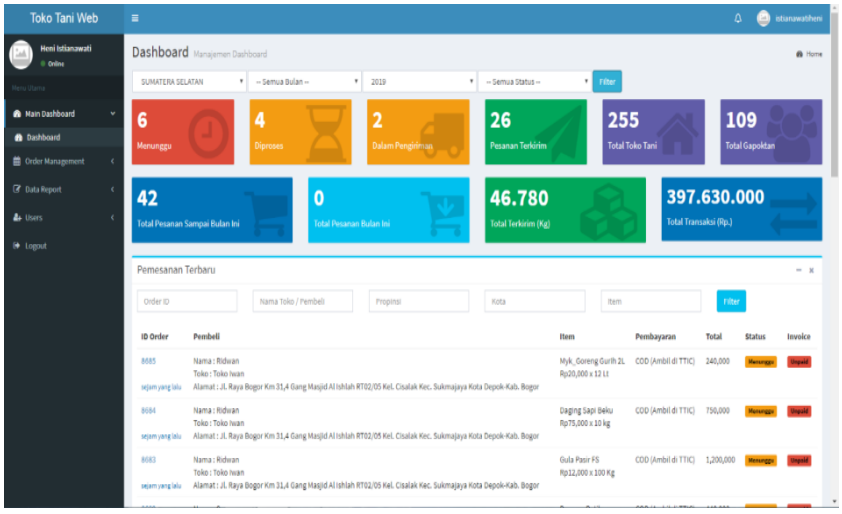

Nilai transaksi sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp397.630.000,-. Total TTI yang terdaftar pada aplikasi TTI Online di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 255 Toko dan jumlah Gapoktan yang terdaftar sejumlah 109 Gapoktan. Dari 255 TTI, jumlah TTI yang aktif 16, dan dari 109 Gapoktan yang terdaftar, gapoktan yang aktif 8 Gapoktan.Total volume beras yang telah dikirim ke TTI sebanyak 46.780 Kg.

j. Pengembangan *e-commerce* Sumatera Barat

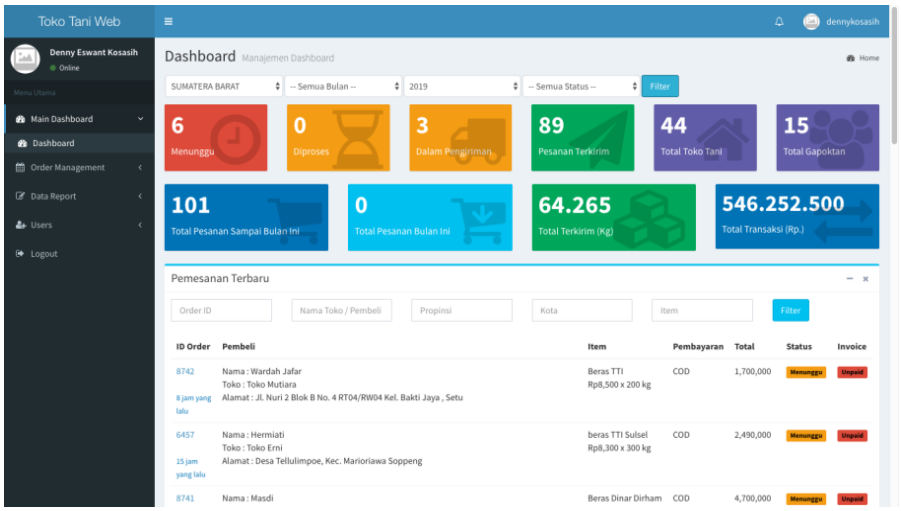

Nilai transaksi sampai 31 Desember 2019 adalah Rp546.252.500. Total Toko yang terdaftar pada aplikasi TTI Online di Provinsi Sulawesi Sumatera Barat sebanyak 44 Toko Tani dan jumlah Gapoktan yang terdaftar sejumlah 15 Gapoktan.Total volume beras yang telah dikirim ke TTI adalah sebanyak 64.265. Kg.

3.4.4. Pengadaan *Cold Storage* dan Mobil TTIC

Dalam rangka mendukung kegiatan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) dalam upaya stabilisasi harga, menjaga ketersediaan dan kualitas serta memperlancar distribusi komoditi pangan strategis, dilakukan pengadaan *cold storage* dan mobil operasional TTIC di beberapa Provinsi. Lokasi cold storage tersebar di 10 propinsi sebanyak 18 unit (**Gambar 4**), sedangkan lokasi mobil operasional TTIC tersebar di 17 propinsi sebanyak 17 unit (**Gambar 5**).

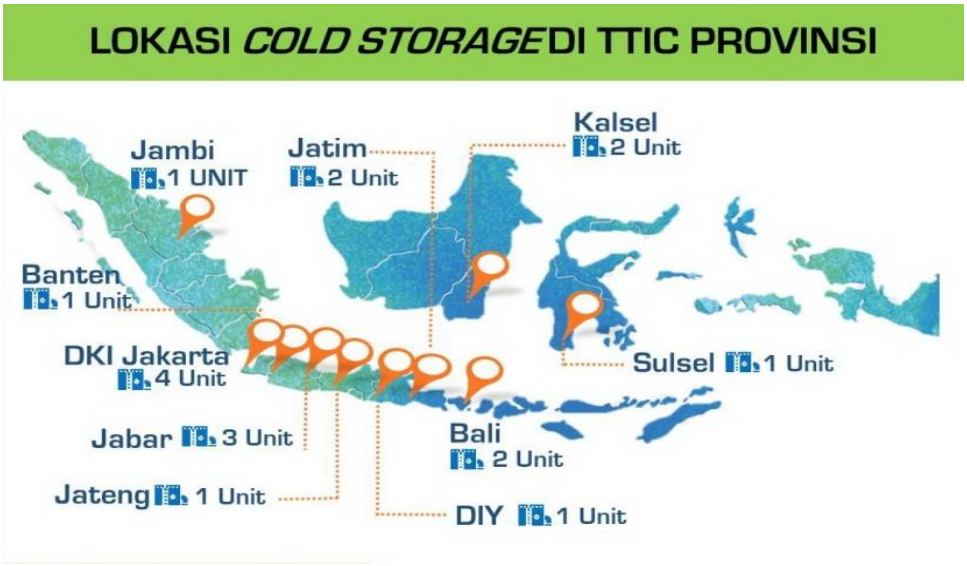

Gambar 4. Sebaran *Cold Storage* TTIC Propinsi Tahun 2019

Gambar 5. Sebaran Mobil TTIC Propinsi Tahun 2019

3.4.5. Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Cadangan pangan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Keberadaan cadangan pangan memiliki peranan penyangga harga baik dari sisi konsumen maupun produsen. Saat terjadi lonjakan harga disebabkan kurangnya pasokan maka cadangan pangan yang tersedia dapat dilepas ke pasar untuk membantu menstabilisasikan harga. Sebaliknya apabila harga pangan berfluktuasi maka dapat dilakukan penyimpanan sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di pasaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 23 dinyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional (CPN). CPN terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Keberadaan CPN ditujukan untuk mengantisipasi kekurangan/kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat.

a. Cadangan Pangan Pemerintah

Sesuai dengan UU Pangan 18/2018 bahwa untuk penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dilakukan oleh Presiden RI dengan besaran jumlah CPP diajukan oleh Menteri Pertanian untuk selanjutnya mendapatkan kesepakatan Rakortas. Sesuai dengan Perpres 48/2016, komoditas yang ditetapkan oleh Presiden RI sebagai CPP adalah beras, jagung, kedelai, gula,

minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam. Pengelolaan CPP untuk komoditas beras, jagung dan kedelai ditugaskan kepada Perum Bulog, sedangkan untuk komoditas lainnya dapat ditugaskan kepada Perum Bulog atau BUMN bidang pangan lainnya.

Terkait dengan penugasan untuk mengelola 3 (tiga) komoditas pangan tersebut, Perum Bulog hingga akhir tahun 2019 baru sebatas melakukan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Untuk komoditas lainnya, dikelola oleh Perum Bulog sebagai stok komersial dalam jumlah terbatas. Pengelolaan CBP dilakukan oleh Perum BULOG dengan sumber anggaran berupa Dana CBP yang dialokasikan di Kementerian Keuangan. Payung hukum pemanfaatan dana tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 88/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana CBP. Pemanfaatan CBP ditujukan untuk stabilisasi harga pangan, bantuan sosial, kerja sama internasional, dan bantuan luar negeri.

Selama periode tahun 2016-2019, jumlah stok awal tahun CBP mengalami peningkatan signifikan. Meskipun pada posisi diakhir tahun, terdapat penurunan jumlah CBP dari posisi akhir tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Penurunan tersebut utamanya dikarenakan adanya pemanfaatan yang lebih tinggi pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dan terdapat penurunan jumlah pengadaan CBP dibandingkan tahun 2018, sedangkan penyaluran CBP pada tahun 2019 lebih besar. Stok akhir tahun 2019 seperti terlihat pada **Tabel 14** berada pada posisi aman, karena di atas batas rekomendasi CBP minimum berkisar 1-1,5 juta ton.

Pada tahun 2019 menjadi titik awal berlakunya perubahan konsepsi pengelolaan CBP. Konsepsi awal CBP adalah sejumlah cadangan beras milik pemerintah yang dikelola Perum Bulog dengan anggaran pengadaan cadangan beras tersebut bersumber di Kementerian Keuangan. Sebagai ilustrasi, anggaran CBP sebesar 2,5 Trilyun dibelanjakan seluruhnya diawal tahun untuk pengadaan beras sebanyak ±250 ribu ton. Saat ini, konsepsi tersebut mengalami perubahan, dimana CBP yang semula berupa pengadaan fisik beras diganti menjadi Dana CBP, berupa biaya penggantian sesuai peruntukan penyaluran CBP sebagaimana diatur di PMK 88/2019. Dengan demikian, hal tersebut mempengaruhi cara pencatatan atas stok yang dikelola BULOG, yang saat ini terbagi atas stok CBP dan stok komersial. Untuk tahun 2019, dengan stok akhir sebesar 2,024 juta ton dan stok komersial sebesar 289 ribu ton maka besaran stok akhir CBP sebesar 1,887 juta ton.

Untuk menjaga kualitas CBP yang dikelola Perum Bulog, Kementerian Pertanian pada tahun 2018 telah menetapkan Permentan 38/2018 tentang Pengelolaan CBP, yang dilengkapi dengan Kepmentan 45/2019 tentang Kriteria Penurunan Mutu CBP. Hal ini untuk mengoptimalkan pengelolaan stok beras Perum Bulog.

Tabel 14. Perkembangan Stok Beras Perum Bulog Tahun 2016 - 2019

Uraian/Tahun	2016	2017	2018	2019
Stok awal	**1.438.810**	**1.731.141**	**960.345**	**2.194.009**
Pengadaan	**3.703.087**	**2.161.734**	**3.268.857**	**1.201.264**
Dalam Negeri	2.969.730	2.161.734	1.488.585	1.201.264
Luar Negeri	733.357	-	1.780.272	-
Penyaluran	**3.410.756**	**2.932.530**	**2.035.193**	**1.371.267**
CBP				
- OP CBP/KPSH	303.042	58.102	544.723	617.535
- Bencana Alam	8.507	13.717	6.919	4.825
Non CBP				
- Raskin	2.782.326	-	-	-
- Rastra	-	2.542.405	-	-
- Bansos Rastra	-	-	1.207.269	351.848
- Gol. Anggaran	110.120	102.684	101.359	91.255
- Komersial	198.059	208.435	159.938	289.061
- Lainnya	8.702	7.187	14.985	16.743
Stok Akhir	**1.731.141**	**960.345**	**2.194.009**	**2.024.006**

Sumber: Laporan Perum BULOG

b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Sesuai amanat UU 18/2012 tentang Pangan dan PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Mandat tersebut diperkuat dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak tahun 2010 telah dikembangkan CPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai langkah strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam/sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya.

Penyelenggaraan CPPD secara konseptual telah tertuang pada PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Untuk menjaga jumlah CPPD, Pemerintah Daerah dapat mengatur pengelolaannya melalui penerbitan Perda, secara operasional pelaksanaannya dapat bekerjasama melalui Bulog atau BUMD. Selanjutnya sebagai acuan bagi pimpinan daerah dalam menetapkan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah telah ditetapkan Permentan 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Pada akhir tahun 2019, stok CBPD secara keseluruhan mencapai 11.152 ton, yaitu 4.414 ton CBPD Provinsi (28 Provinsi) dan 6.738 ton CBPD Kab/Kota (231 Kab/Kota). Jumlah tersebut masih jauh dari angka rekomendasi yang ditetapkan sesuai Permentan 11/2018. Untuk itu, Menteri Pertanian RI merekomendasikan dalam rangka akselerasi implementasi amanat CPPD perlu disusun Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah untuk Ketahanan Pangan.

Secara rinci perkembangan CPPD Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Perkembangan pelaksanaan CBPD Provinsi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan jumlah stok akhir tahun pada tahun 2019 mencapai 4.414 ton. Penyaluran CBPD tersebut pada tahun 2019 sebesar 659 ton (**Tabel 15**). Adapun provinsi yang belum memiliki alokasi dan payung hukum CPPD diantaranya adalah DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sedangkan untuk Provinsi Bali, Sulawesi Tengah, dan Papua, sudah memiliki CBPD namun telah habis disalurkan kepada masyarakat yang terkena bencana alam. Jumlah CBP yang seharusnya dikelola oleh masing-masing provinsi pada Tahun 2019 sesuai Permentan 11/2018 seperti terlihat pada **Tabel 15** dan **Gambar 6**.

Gambar 6. Peta Kondisi CBPD Provinsi Tahun 2019

Tabel 15. Perkembangan CPPD Provinsi Tahun 2017 - 2019 (Ton)

No	Provinsi	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Penyaluran	Stok Akhir	Penyaluran	Stok Akhir	Penyaluran	Stok Akhir
1	Aceh	12.51	234.54	31.50	253.04	59.00	250.04
2	Sumatera Utara	0.00	68.00	2.50	65.50	0.00	53.59
3	Sumatera Barat	30.00	302.00	59.84	342.16	26.46	525.70
4	Riau	40.00	307.84	70.00	235.74	84.63	140.10
5	Kepulauan Riau	17.98	33.93	18.58	20.35	8.81	15.54
6	Jambi	6.10	55.27	5.40	61.87	24.40	41.27
7	Bengkulu	6.10	37.24	0.00	46.97	3.04	48.69
8	Sumatera Selatan	2.50	11.00	2.00	18.73	0.00	33.73
9	Bangka Belitung	27.00	20.50	0.00	37.50	0.00	87.50
10	Lampung	54.86	101.71	0.00	101.71	0.00	101.71
11	Banten	0.00	108.25	15.31	208.94	4.66	249.28
12	DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Jawa Barat	208.01	902.22	148.90	792.24	99.48	732.21
14	Jawa Tengah	194.08	81.18	105.44	166.69	111.14	246.50
15	DI Yogjakarta	39.79	183.62	1.00	192.62	2.58	215.04
16	Jawa Timur	2.89	171.24	146.92	24.32	19.62	4.70
17	Kalimantan Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
18	Kalimantan Barat	22.29	246.83	0.00	246.83	34.45	212.38
19	Kalimantan Tengah	0.00	79.05	0.00	91.05	1.82	91.31
20	Kalimantan Selatan	46.00	89.00	0.00	122.75	0.00	122.75
21	Kalimantan Timur	59.48	162.01	30.45	131.65	0.00	373.65
22	Sulawesi Utara	1.00	124.92	96.30	37.24	14.30	240.94
23	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Sulawesi Tengah	99.15	65.81	37.90	27.91	131.08	0.00
25	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Sulawesi Selatan	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
27	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
28	N T B	24.77	140.00	34.00	106.00	12.16	93.84
29	N T T	0.00	80.44	0.00	80.44	0.00	330.44
30	Bali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Maluku	4.00	35.00	0.00	2.93	2.93	8.27
33	Papua Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Papua	0.00	0.00	109.61	19.26	19.26	0.00
INDONESIA		**898.51**	**3781.58**	**915.65**	**3574.43**	**659.81**	**4414.18**

Sumber: Laporan Dinas Provinsi yang menangani urusan pangan (diolah BKP).

Tabel 16. Target Ideal CBPD Provinsi Tahun 2019

No.	Provinsi	Proyeksi Penduduk Provinsi	Konsumsi per kapita/tahun Provinsi (kg/kap/tahun)	Target Ideal CBPD Provinsi (ton)
1	Aceh	5,330,786	100.2	534
2	Sumatera Utara	14,499,144	112.6	1,000
3	Sumatera Barat	5,418,098	109.7	594
4	Riau	6,919,312	92.2	638
5	Jambi	3,603,439	97.5	351
6	Sumatera Selatan	8,807,119	93.7	825
7	Kepri	2,167,789	81.3	200
8	Bengkulu	1,981,882	102.6	203
9	Lampung	8,594,480	77.7	668
10	Kep. Bangka Belitung	1,479,526	83.7	200
11	DKI Jakarta	10,513,057	81.2	854
12	Jawa Barat	49,514,944	100.8	1,000
13	Banten	12,845,220	111.8	1,000
14	Jawa Tengah	34,642,034	76.4	1,000
15	DIY	3,829,217	106.9	409
16	Jawa Timur	39,577,201	91.3	1,000
17	Bali	4,315,880	115	496
18	NTB	5,048,954	136.1	687
19	NTT	5,617,819	122.5	688
20	Kalimantan Barat	5,236,578	84.1	440
21	Kalimantan Tengah	2,702,260	87.2	236
22	Kalimantan Selatan	4,221,542	93.8	396
23	Kalimantan Timur	3,717,749	84.1	313
24	Kalimantan Utara	653,876	89.7	200
25	Sulawesi Utara	2,496,862	111.9	279
26	Sulawesi Tengah	3,239,832	118	382
27	Sulawesi Selatan	8,818,857	114.7	1,000
28	Sulawesi Tenggara	3,339,410	115.6	386
29	Gorontalo	1,196,594	120.9	200
30	Sulawesi Barat	1,502,171	109.2	200
31	Maluku	1,792,293	95.6	200
32	Maluku Utara	1,303,387	72.7	200
33	Papua Barat	1,006,438	76.2	200
34	Papua	3,348,149	81.6	273
Indonesia		**269,281,897**	**3,349**	**17,254**

Sebaran CBPD Provinsi pada tahun 2019 disertai dengan target CBPD sesuai Permentan 11/2018, dengan justifikasi batas bawah sebesar 200 ton dan batas atas 1000 ton. Secara keseluruhan wilayah provinsi yang belum memiliki CBPD Provinsi adalah wilayah timur Indonesia. Untuk itu telah dilaksanakan Rakor CBPD Wilayah Timur yang mengundang 15 provinsi dan dihadiri oleh Setda dan Kadis yang menyelenggarakan urusan pangan di wilayah timur Indonesia.

(2) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengembangan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tahun 2019 sudah dilakukan oleh 231 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan total 6.738 ton. Merujuk data Kementerian Dalam Negeri, jumlah tersebut baru mencapai 45 persen dari total kab/kota yang ada. Adapun besaran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sangat tergantung dari masing-masing alokasi anggaran APBD yang tersedia.

Pada tahun 2019 jumlah CBPD di tingkat Kabupaten/Kota mengalami peningkatan sebesar 1.682 ton jika dibandingkan dengan tahun 2018. Selain itu jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan CBPD pada tahun 2019 sebanyak 231 kabupaten/kota, meningkat sebanyak 41 Kab/Kota dari 190 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan CBPD pada tahun 2018 seperti terlihat pada **Tabel 17** dan **Gambar 7**. Kenaikan tersebut dilakukan setelah melakukan beberapa strategi, diantaranya konsistensi dalam sosialisasi dan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pangan di daerah terkait pentingnya penyelenggaraan CPPD di tingkat daerah.

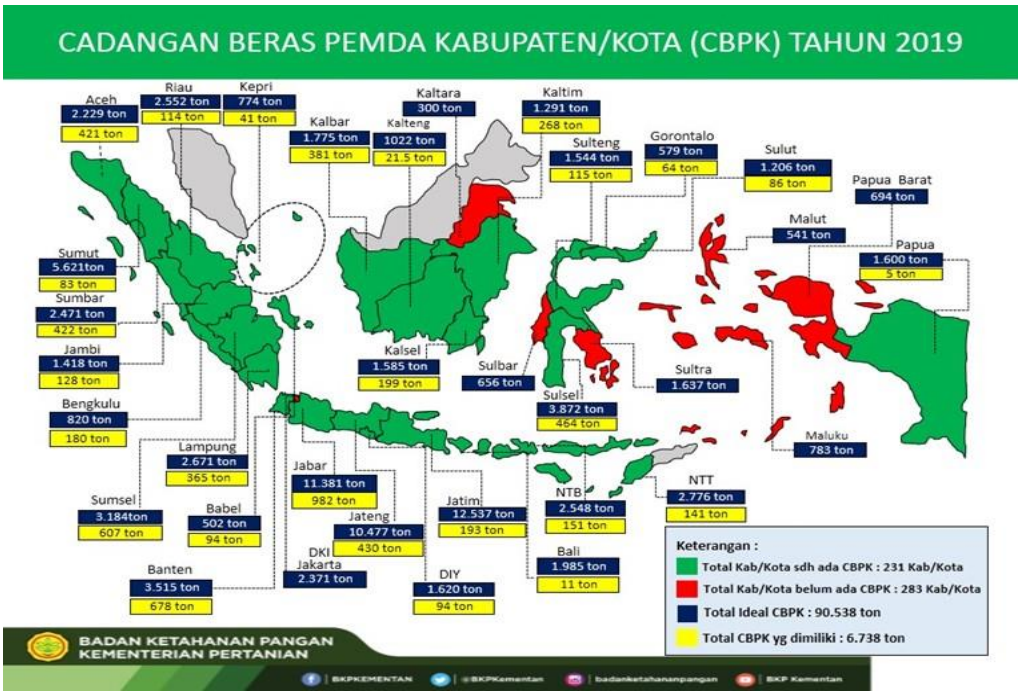

Gambar 6. Peta Kondisi CBPD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Tabel 17. Perkembangan Cadangan Beras Pemerinta Kabupaten/KotaTahun 2018 - 2019

No	Provinsi	2018				2019			
		Jumlah Kab/Kota	Kab/Kota Mempunyai CBPD	% Kondisi Kab/Kota yg mempunyai CBPD	Jumlah Stok (Ton)	Jumlah Kab/Kota	Kab/Kota Mempunyai CBPD	% Kondisi Kab/Kota yg mempunyai CBPD	Jumlah Stok (Ton)
1	Aceh	23	3	13%	264.81	23	4	17%	420.81
2	Sumatera Utara	33	8	24%	136.97	33	3	9%	83.17
3	Sumatera Barat	19	12	63%	411.32	19	12	63%	422.18
4	Sumatera Selatan	17	10	59%	559.68	17	13	76%	606.58
5	Babel	7	3	43%	47.2	7	7	100%	94.04
6	Riau	12	5	42%	147.56	12	4	33%	114.3
7	Bengkulu	10	4	40%	155.86	10	6	60%	180.31
8	Kepulauan Riau	7	2	29%	5.42	7	4	57%	41.26
9	Lampung	15	13	87%	328.48	15	13	87%	365
10	Jambi	11	8	73%	191.97	11	10	91%	127.65
11	Kalimantan Barat	14	10	71%	361.97	14	9	64%	381.3
12	Kalimantan Tengah	14	3	21%	77.42	14	3	21%	21.46
13	Kalimantan Selatan	13	11	85%	170.62	13	11	85%	198.76
14	Kalimantan Timur	10	1	10%	0.32	10	6	60%	268.12
15	Kalimantan Utara	5	0	0%	0	5	0	0%	0
16	Banten	8	6	75%	396.95	8	8	100%	678.25
17	Jawa Barat	27	20	74%	545.09	27	26	96%	981.92
18	DKI Jakarta	6	0	0%	0	6	0	0%	0
19	DI Yogyakarta	5	4	80%	77.17	5	5	100%	93.85
20	Jawa Tengah	35	24	69%	396.95	35	25	71%	430.13
21	Jawa Timur	38	4	11%	44.02	38	9	24%	193.06
22	Bali	9	1	11%	0.94	9	1	11%	10.9
23	NTB	10	9	90%	115.61	10	10	100%	150.77
24	NTT	22	0	0%	0	22	5	23%	141.04
25	Sulawesi Utara	15	8	53%	136.97	15	8	53%	86.38
26	Sulawesi Barat	6	2	33%	5.57	6	0	0%	0
27	Sulawesi Tengah	13	3	23%	48.41	13	7	54%	114.64
28	Sulawesi Tenggara	17	0	0%	0	17	0	0%	0
29	Gorontalo	6	1	17%	1	6	5	83%	63.6
30	Sulawesi Selatan	24	15	63%	427.59	24	16	67%	463.62
31	Maluku	11	0	0%	0	11	0	0%	0
32	Maluku Utara	10	0	0%	0	10	0	0%	0
33	Papua Barat	13	0	0%	0	13	0	0%	0
34	Papua	29	0	0%	0	29	1	3%	5
Jumlah		**514**	**190**	**37%**	**5055.87**	**514**	**231**	**45%**	**6738.1**

Selain itu, BKP telah mengirimkan surat ke pimpinan daerah agar menugaskan Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan untuk segera menjalankan penyelenggaraan CPPD (alokasi angaran dan penyusunan payung hukum). Untuk memantau perkembangan stok CBPD, pemda menyampaikan laporan berkala setiap minggu. Target ideal dari CPPD Kab/Kota seluruh Indonesia sebesar 90.538 ton, sementara kondisi CPPD Kab/Kota hingga akhir tahun 2019 sebesar 6.738 ton. Nilai tersebut masih jauh dari angka ideal yang ditargetkan, namun demikian serangkaian inisiasi telah dilakukan untuk mengoptimalkannya.

3.4.6. Serapan Gabah Beras Petani Mendukung CBP

Untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Pemerintah sesuai dengan kesepakatan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada tahun 2018 menetapkan bahwa jumlah CBP yang harus dijaga oleh Perum Bulog minimal sebesar 1 - 1,5 juta ton per tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Perum Bulog perlu memantapkan ketersediaan pasokan beras yang akan disimpan sebagai CBP. Sesuai amanat PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan, dinyatakan bahwa pengadaan CBP diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri. Untuk itu, Perum Bulog ditugaskan untuk melaksanakan penyerapan gabah/beras petani, utamanya pada saat panen raya untuk disimpan dan dikelola sebagai CBP.

Atas dasar hal tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan melakukan langkah strategis untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Serapan Gabah/Beras Petani (SERGAP). Beberapa langkah strategis telah dilakukan, diantaranya: (1) pelaksanaan Rakor SERGAP Nasional; (2) pembentukan tim terpadu lintas Eselon II lingkup Kementan; (3). Pelaksanaan Rakor Teknis di wilayah sergap baik lingkup Provinsi maupun Kab/Kota; dan (4) Mengoptimalkan pengadaan beras menggunakan mekanisme komersial dan pemanfaatan gudang filial, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Pelaksanaan Rakor Sergap pada bulan Januari 2019 dipimpin oleh Menteri Pertanian RI dan dihadiri oleh Aster KASAD TNI-AD, Perum Bulog, dan Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan pangan di wilayah sentra produksi beras. Pada rakor tersebut disepakati target capaian SERGAP di masing-masing wilayah. Sebagai ujung tombak pelaksanaan SERGAP dibentuk Tim Terpadu Sergap Kementan di 7 lokasi sentra tersebut yang pada masing-masing wilayah yang diketuai oleh pejabat Eselon II BKP. Tim tersebut di sebar ke tujuh provinsi yang menjadi sentra produksi padi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, dan Sulawesi Selatan. Tugas utama dari tim terpadu ini adalah mendorong Perum BULOG dengan melakukan pendampingan di seluruh Divre untuk menyerap gabah/beras petani semaksimal mungkin.

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menjadi koordinator pelaksanaan SERGAP di wilayah Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Selain itu, peran strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam rangkaian SERGAP juga menyampaikan informasi terkait perkembangan harga GKP dan potensi panen di wilayah dengan produksi padi yang tinggi, sehingga dapat memudahkan Perum BULOG untuk bergerak cepat dalam pelaksanaan SERGAP. Secara nasional, capaian target SERGAP sampai akhir Desember 2019 sebesar 1,2 juta ton

(65,7%) dengan total stok beras yang dikelola Bulog per tanggal 31 Desember 2019 mencapai 2,01 juta ton. Capaian ini sekaligus menjadi jawaban atas upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya untuk pangan pokok beras.

3.4.7. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

a. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi melalui DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2019

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu mekanisme pengelolaan cadangan pangan masyarakat, dengan komponen kegiatannya adalah fasilitasi pembangunan fisik lumbung dan penyediaan sarana pendukungnya. Peranan strategis LPM meliputi keterpaduan antara mekanisme komersial dan sosial, yang secara sinergis dilakukan oleh kelompok tani/gapoktan penerima manfaat untuk menjamin keberlangsungan akivitas LPM.

Secara fisik, LPM merupakan tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dikombinasikan dengan fasilitasi alat/mesin pengolahan gabah/beras yang dibangun untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan petani. Konsep Pengembangan LPM melalui DAK ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi produksi di kabupaten wilayah sentra produksi padi yang didukung dengan proses pengolahan dan pemasaran sehingga meningkatkan nilai tambah bagi petani. Adapun peranan sosial LPM berfungsi sebagai cadangan pangan masyarakat untuk mengantisipasi masa paceklik, gejolak harga dan bencana alam. Pembangunan LPM dan penyediaan sarana pendukungnya mencakup komponen sebagai berikut:

a. Pembangunan fisik LPM kapasitas 30-60 ton/unit; dan
b. Sarana pendukung lainnya: (1) Pengadaan RMU dengan kapasitas minimal 0,5 ton/jam disertai dengan rumah RMU; dan/atau (2) Pembangunan lantai jemur.

Apabila masih terdapat sisa alokasi dari total anggaran poin a dan b, dapat dipergunakan kembali antara lain untuk pemagaran, instalasi listrik, pengadaan pallet, timbangan, tangga dan/atau penjahit karung beras. Sumber pendanaan lainnya melalui APBD dan/atau swadaya masyarakat dapat digunakan untuk melengkapi sarana pendukung dan pembiayaan lainnya.

Terkait dengan pembangunan fisik lumbung dan rumah RMU dapat dibangun secara terpisah atau menjadi satu kesatuan dalam satu bangunan, sesuai dengan ketersediaan lahan dan anggaran. Spesifikasi teknis dari komponen pembangunan LPM dan sarana pendukungnya tersebut mencakup:

a. LPM berkapasitas 30-60 ton, spesifikasi bangunan permanen (beton), ventilasi dan sirkulasi udara cukup, dilengkapi dengan pallet. Ukuran panjang dan lebar bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat;
b. RMU kapasitas minimal 0,5 ton per jam dengan komponen fungsi pecah kulit (PK) dan *polisher*;
c. Lantai jemur dibuat dari beton dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air; dan
d. Bangunan rumah RMU disesuaikan dengan kebutuhan ukuran RMU.

Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukungnya perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Lokasi pembangunan LPM berada di kabupaten sentra produksi padi;
b. Pembangunan LPM dan sarana pendukungnya dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah dan dibangun di satu lokasi yang sama sehingga bersifat terpadu;
c. Fasilitasi RMU meliputi mesin penggilingan padi lengkap 1 (satu) paket, dengan komponen fungsi pecah kulit (PK) dan polisher;
d. Fungsi bangunan LPM sebagai sarana penyimpanan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang (dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setempat);

Kriteria Kelompok Penerima manfaat meliputi:

(1) Kelompok Tani/Gapoktan yang sudah aktif minimal 2 (dua) tahun;
(2) Belum pernah mendapat fasilitas yang sama pada tahun berjalan atau pada tahun-tahun sebelumnya;
(3) Mengajukan proposal usulan yang selanjutnya dijadikan dasar e-*proposal* oleh dinas kabupaten yang menangani ketahanan pangan;
(4) Sanggup menyediakan lahan untuk pembangunan fisik lumbung, lantai jemur dan rumah RMU. Lahan tersebut dapat berasal dari salahsatu anggota kelompok/lahan desa/lahan pemda yang sudah dihibahkan kepada kelompok yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesediaan menghibahkan lahan;
(5) Membuat pernyataan kesanggupan untuk langsung mengoperasionalkan lumbung pangan beserta fasilitas pendukung secara berkelanjutan setelah dibangun; dan
(6) Kepala Daerah pelaksana kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mendukung fasilitasi operasional dan pengisian LPM minimal setara dengan 10% alokasi DAK melalui APBD.

Dalam rangka mendukung penguatan cadangan pangan masyarakat untuk pemenuhan ketersediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2019 Kementerian Pertanian mengalokasikan pembangunan LPM melalui DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2019 sebesar @Rp 500 juta. Alokasi tersebut diberikan untuk pembangunan fisik lumbung dengan kapasitas 30-60 ton dan sarana pendukungnya yang meliputi lantai jemur, dan RMU. Guna meningkatkan peran pemerintah daerah, pengisian LPM difasilitasi oleh anggaran APBD (minimal 10% dari alokasi).

Pembangunan LPM melalui DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2019 dialokasikan di 183 kelompok, di 133 kabupaten/kota pada 29 Provinsi. Dari 183 kelompok penerima manfaat, sebanyak 163 kelompok menerima bantuan pembangunan lumbung, sedangkan 20 kelompok hanya menerima bantuan pembangunan lantai jemur dan/atau RMU. Dari 163 kelompok tersebut, mencakup: (a) 131 kelompok menerima bantuan pembangunan lumbung, lantai jemur dan RMU; (b) 9 kelompok menerima bantuan pembangunan lumbung dan RMU; (c) 13 kelompok menerima bantuan pembangunan lumbung dan lantai jemur; dan (d) 10 kelompok hanya menerima bantuan pembangunan lumbung, seperti terlihat pada **Tabel 18**.

Beberapa hal yang menyebabkan kelompok tidak mendapatkan bantuan dengan paket lengkap diantaranya: (a) Sesuai usulan yang diajukan oleh kabupaten/kota melalui e-*proposal*, umumnya karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah; dan (b) Proses pengadaan RMU melalui e-*catalog* melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak dapat terealisasi.

Tabel 18. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Sarana Pendukungnya melalui DAK Fisik Bidang Pertanian TA. 2019

No	Provinsi	∑ Kab/Kota	∑ Klpk Penerima Manfaat	Paket LPM yang Dibangun melalui DAK Fisik Pertanian 2019				
				Lumbung , RMU, Lantai Jemur	Lumbung dan RMU	Lumbung dan Lantai Jemur	Lumbung	Lantai Jemur dan/atau RMU
1	Aceh	5	14	3	1	-	-	10
2	Sumut	7	8	8	-	-	-	-
3	Sumsel	7	9	7	-	2	-	-
4	Sumbar	6	7	7	-	-	-	-
5	Jambi	1	1	1	-	-	-	-
6	Bengkulu	1	1	-	-	-	1	-
7	Babel	1	1	-	-	-	1	-
8	Kep. Riau	1	1	-	-	-		1
9	Lampung	8	13	8	-	-	5	-
10	Banten	2	3	3	-	-	-	-
11	Jabar	9	12	12	-	-	-	-
12	Jateng	17	26	26	-	-	-	-
13	DIY	1	1	1	-	-	-	-
14	Jatim	13	15	13	2	-	-	-
15	Kalbar	3	4	3	1	-	-	-
16	Kalsel	10	10	7	2	1	-	-
17	Kaltim	1	2	-	-	2	-	-
18	Kalteng	2	2	2	-	-	-	-
19	Bali	1	1	1	-	-	-	-
20	NTB	3	5	5	-	-	-	-
21	NTT	1	2	-	2	-	-	-
22	Sulbar	2	2	1	1	-	-	-
23	Sulsel	15	18	13	-	2	2	1
24	Sulteng	5	6	5	-	1	-	-
25	Sultra	4	5	4	-	1	-	-
26	Sulut	2	5	-	-	3	1	1
27	Gorontalo	1	1	1	-	-	-	-
28	Maluku	1	4	-	-	-	-	4
29	Papua	3	4	-	-	1	-	3
Jumlah		133	183	131	9	13	10	20

b. Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) melalui Banper

Dalam rangka memantapkan peranan LPM, maka pada tahun 2019 dialokasikan Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk pengisian lumbung. Banper tersebut diberikan kepada kepada 443 kelompok LPM yang berada di 137 kabupaten/kota pada 26 provinsi seperti terlihat pada **Tabel 19**. Alokasi dana Banper yang diterima sebesar Rp 60 juta per kelompok, yang digunakan untuk pembelian gabah/beras dan selanjutnya dikelola stoknya melalui usaha ekonomi produktif, seperti jual-beli, simpan pinjam dan/atau tunda jual.

Tabel 19. Realisasi Pencairan Banper LPM TA 2019

Posisi 31 Desember 2019

No	Provinsi	Target		SK	Realisasi		%
		Kelompok	Dana (Rp.Jt)	Penetapan	Kelompok	Dana (Rp.Jt)	
1	Banten	12	720	12	12	720	**100.00**
2	Jawa Barat	36	2,160	36	36	2160	**100.00**
3	Jawa Tengah	57	3,420	57	57	3420	**100.00**
4	DIY	3	180	3	3	180	**100.00**
5	Jawa Timur	55	3,300	55	55	3300	**100.00**
6	Aceh	12	720	12	12	720	**100.00**
7	Sumatera Barat	11	660	11	11	660	**100.00**
8	Jambi	4	240	4	4	240	**100.00**
9	Sumatera Selatan	19	1,140	19	19	1140	**100.00**
10	Bengkulu	7	420	7	7	420	**100.00**
11	Lampung	22	1,320	22	22	1320	**100.00**
12	Bangka Belitung	2	120	2	2	120	**100.00**
13	Kalimantan Tengah	4	240	4	4	240	**100.00**
14	Kalimantan Selatan	8	480	8	8	480	**100.00**
15	Kalimantan Timur	4	240	4	4	240	**100.00**
16	Sulawesi Utara	22	1,320	22	22	1320	**100.00**
17	Sulawesi Tengah	30	1,800	30	30	1800	**100.00**
18	Sulawesi Selatan	33	1,980	33	33	1,980	**100.00**
19	Sulawesi Tenggara	13	780	13	13	780	**100.00**
20	Gorontalo	6	360	6	6	360	**100.00**
21	Bali	6	360	6	6	360	**100.00**
22	NTB	22	1,320	22	22	1320	**100.00**
23	NTT	39	2,340	39	39	2340	**100.00**
24	Maluku	3	180	3	3	180	**100.00**
25	Papua	9	540	9	9	540	**100.00**
26	Sulawesi Barat	4	240	4	4	240	**100.00**
	TOTAL	**443**	**26,580**	**443**	**443**	**26,580**	**100.00**

Pencairan dana Banper kepada kelompok LPM disalurkan mulai bulan Februari 2018 setelah semua persyaratan pencairan dana dipenuhi. Dana yang telah disalurkan kepada kelompok LPM dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha Kegiatan (RUK). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan LPM, pencairan dana Banper mencapai 100% (**Tabel 20**).

Total kinerja LPM per tanggal 31 Desember 2019 adalah 98,47%. Kinerja total merupakan penjumlahan dari kinerja pengisian (bobot 80%) dan kinerja pemanfaatan (bobot 20%). Kinerja pengisian merupakan kemampuan kelompok LPM untuk membelanjakan semua dana banper untuk pembelian gabah/beras. Sedangkan, kinerja pemanfaatan merupakan usaha yang dialukan oleh kelompok untuk meningkatkan volume cadangan pangan yang dikelola sekaligus sebagai upaya mempertahankan mutu beras yang dikelola.

Tabel 20. Kinerja Nasional Banper LPM Tahun 2019

NO.	PROVINSI	ALOKASI LPM	REALISASI LPM	REALISASI ANGGARAN (%)	Kinerja Pengisian LPM (80%)	Kinerja Pemanfaatan (20%)	TOTAL KINERJA (%)
1	MALUKU	3	3	100.00%	100.00%	200.02%	120.00%
2	JAMBI	4	4	100.00%	100.00%	199.43%	119.89%
3	SULAWESI UTARA	22	22	100.00%	100.00%	126.73%	105.34%
4	SUMATERA BARAT	11	11	100.00%	100.00%	121.24%	104.25%
5	BANTEN	12	12	100.00%	100.00%	118.90%	103.78%
6	SUMATERA SELATAN	19	19	100.00%	100.00%	108.62%	101.72%
7	KALIMANTAN TIMUR	4	4	100.00%	100.00%	107.96%	101.59%
8	JAWA TENGAH	57	57	100.00%	100.00%	107.57%	101.52%
9	LAMPUNG	22	22	100.00%	100.00%	106.27%	101.25%
10	SULAWESI BARAT	4	4	100.00%	100.00%	102.20%	100.44%
11	BENGKULU	7	7	100.00%	100.00%	101.38%	100.28%
12	SULAWESI TENGGARA	13	13	100.00%	100.00%	97.41%	99.48%
13	JAWA BARAT	36	36	100.00%	100.00%	95.41%	99.08%
14	KALIMANTAN SELATAN	8	8	100.00%	100.00%	94.40%	98.88%
15	GORONTALO	6	6	100.00%	100.00%	85.83%	97.17%
16	ACEH	12	12	100.00%	100.00%	84.52%	96.90%
17	NUSA TENGGARA BARAT	22	22	100.00%	100.00%	80.35%	96.07%
18	JAWA TIMUR	55	55	100.00%	100.00%	79.37%	95.87%
19	DI YOGYAKARTA	3	3	100.00%	100.00%	78.68%	95.74%
20	BALI	6	6	100.00%	100.00%	75.19%	95.04%
21	NUSA TENGGARA TIMUR	39	39	100.00%	100.00%	74.60%	94.92%
22	SULAWESI SELATAN	33	33	100.00%	100.00%	73.01%	94.60%
23	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2	2	100.00%	100.00%	70.09%	94.02%
24	SULAWESI TENGAH	30	30	100.00%	100.00%	69.81%	93.96%
25	KALIMANTAN TENGAH	4	4	100.00%	100.00%	53.71%	90.74%
26	PAPUA	9	9	100.00%	87.04%	85.90%	86.81%
	INDONESIA	**443**	**443**	**100.00%**	**99.74%**	**93.40%**	**98.47%**

Keterangan:

- *Kinerja Pengisian 100%: Kelompok membelanjakan seluruh banper untuk gabah/beras*
- *Kinerja Pemanfaan >100: Kelompok mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana banper untuk usaha ekonomi produktif (jual-beli, simpan pinjam dan/atau tunda jual), dan mendapatkan keuntungan.*

Berdasarkan Tabel 19, dapat dilihat bahwa sebanyak 11 provinsi telah memiliki total kinerja >100%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum kelompok LPM di 11 Provinsi tersebut telah mampu mengelola cadangan pangan yang ada di lumbung pangan dengan baik, bahkan telah menghasilkan keuntungan bagi kelompok. Secara keseluruhan total volume stok yang dikelola

kelompok LPM hingga tanggal 31 Desember 2019 mencapai 2.945 ton setara beras atau 4.600 ton setara gabah.

3.4.8. Prognosa Produksi dan Kebutuhan Pangan Pokok/Strategis

Penyusunan prognosa produksi dan kebutuhan pangan dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang perkiraan jumlah produksi dan kebutuhan pangan pokok selama periode tertentu (bulanan atau tahunan). Sedangkan sasaran adalah tersedianya informasi untuk merumuskan kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan serta pengendalian/antisipasi gangguan pasokan dan harga pangan. Prognosa pangan sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya masalah pangan, untuk penanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan pangan, serta dalam upaya stabilitas harga pangan strategis.

Prognosa produksi dan kebutuhan pangan pokok/strategis tahun 2019 mencakup 12 komoditas pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, kacang tanah, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging unggas, dan telur unggas. Prognosa disusun secara berkala, yaitu prognosa berdasarkan angka sasaran produksi Ditjen Teknis Lingkup Kementerian Pertanian pada bulan Januari - Februari. Selanjutnya prognosa di-*update* setiap tiga atau empat bulan sesuai dengan perubahan data produksi yang berdasarkan angka sasaran atau angka ramalan produksi (BPS) dan/atau angka realisasi produksi Ditjen Teknis lingkup Kementan (Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Ditjen Perkebunan).

Mengingat pentingnya data dan informasi prognosa pangan tersebut, serta keterkaitan data prognosa bagi stakeholder terkait, terutama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, baik oleh pemerintah maupun swasta, maka penyusunan prognosa pangan pada tahun 2019 juga melibatkan berbagai pihak. Pada bulan September 2019 diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian No. 629/KPTS/OT.050/M/9/2019 tentang Tim Penyusunan Prognosa Produksi dan Kebutuhan Komoditas Pangan Pokok/Strategis. Dengan keterlibatan stakeholder terkait, data dan informasi ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan.

Berdasarkan hasil perhitungan prognosa produksi dan kebutuhan pangan tahun 2019, dari 13 komoditas pangan, terdapat 4 (empat) komoditas yang masih defisit, yaitu kedelai 85,68%, kacang tanah 36,02%, gula pasir 7,21%, bawang putih 100%, serta daging sapi dan kerbau 40,79%. Sembilan 9 (sembilan) komoditas lainnya surplus, yaitu beras 5,25% atau jika memperhitungkan stok awal surplus sebesar 12,56%, jagung 31,80%, minyak goreng 237,51%, bawang

merah 9,23%, cabai besar 32,02%, cabai rawit 71,32%, daging ayam ras 10,71%, dan telur ayam ras 0,67%, seperti terlihat pada **Tabel 21.**

Tabel 21. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2019

No	Komoditas	Perkiraan Produksi	Perkiraan Kebutuhan	Perkiraan Neraca Domestik	Perkiraan Neraca Kumulatif
1	Beras	31.346.441	29.782.030	1.564.411	3.739.037
2	Jagung (*)	25.800.303	19.575.833	6.224.470	6.224.470
3	Kedelai	460.806	3.217.867	(2.757.060)	(2.757.060)
4	Kacang Tanah	499.953	781.386	(281.433)	(281.433)
5	Minyak Goreng	30.060.237	8.906.386	21.153.852	26.500.599
6	Gula Pasir	2.555.883	2.754.531	(198.648)	1.257.159
7	Bawang Merah	1.470.628	1.346.386	124.242	124.242
8	Bawang Putih		630.844	(630.844)	(630.844)
9	Cabai Besar	1.175.315	890.262	285.053	285.053
10	Cabai Rawit	1.277.120	745.443	531.677	531.677
11	Daging Sapi dan Kerbau	404.590	683.294	(278.704)	(278.704)
12	Daging Ayam Ras	3.584.469	3.237.641	346.828	346.828
13	Telur Ayam Ras	4.753.382	4.721.672	31.711	31.711

Keterangan:

- *Neraca komulatif: neraca domestik/bulanan ditambah stok awal/carry over bulan sebelumnya.*
- *Stok awal tahun beras 2,17 juta ton, minyak goreng 5,45 juta ton, dan gula pasir 1,45 ribu ton.*

Secara rinci hasil perhitungan prognosa pangan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Beras, diperkirakan total kebutuhan beras 29,782 juta ton (111,58 kg/kap/th). Perkiraan produksi beras mencapai 31,34 juta ton dan stok awal tahun 2019 di Bulog 2,175 juta ton, sehingga pada akhir tahun 2019 diperkirakan surplus 3,739 juta ton atau sekitar 12,56%. Pada periode Maret-April 2019 diprediksi terjadi surplus beras sekitar 5,469 juta ton karena masa panen raya.

b. Jagung, perkiraan produksi mencapai 25,800 juta ton (ka 15%). Perkiraan kebutuhan jagung mencapai 19,576 juta ton termasuk kehilangan/tercecer dalam proses produksi dan distribusi sebesar 7,16%, sehingga pada akhir tahun 2019 terdapat surplus 6,224 juta ton atau sekitar 31,80%. Terjadi defisit pada bulan May, September-Desember, akan tetapi dapat terpenuhi dari *carry over* bulan sebelumnya.

c. Kedelai, perkiraan produksi sebesar 460,806 ribu ton. Perkiraan kebutuhan kedelai sekitar 3,218 juta ton termasuk kehilangan/tercecer sebesar 5% dari produksi, sehingga neraca total kedelai pada akhir tahun 2019 diperkirakan terjadi defisit 2,757 juta ton atau sekitar 85,68%. Defisit terjadi setiap bulannnya selama tahun 2019.

d. Kacang tanah, perkiraan produksi tahun 2019 sebesar 499,953 ribu ton. Perkiraan kebutuhan kacang tanah sekitar 781,386 ribu ton termasuk kehilangan/tercecer sebesar 5% dari produksi, sehingga neraca total kedelai pada akhir tahun 2019 diperkirakan defisit 281,433 ribu ton atau sekitar 36,02%. Defisit terjadi setiap bulan kecuali Februari, Mei, Juni dan Oktober 2019.
e. Gula Pasir, perkiraan produksi sebesar 2,555 juta ton, dan stok awal tahun 2019 sebesar 1,455 juta ton. Produksi gula pasir tahun 2019 tidak memperhitungkan impor gula dan raw sugar yang diolah menjadi gula. Stok awal merupakan stok fisik gula kristal putih (GKP) di gudang Pabrik Gula (PG), belum termasuk stok GKP di luar PG seperti di pedagang/pengecer, minimarket dan hypermarket. Perkiraan kebutuhan gula pasir sebesar sekitar 2,754 juta ton, sehingga pada akhir tahun 2019 terdapat surplus 1,257 juta ton atau sekitar 45,64%. Adanya stok awal tahun 2019, maka surplus gula pasir terjadi pada setiap bulan.
f. Minyak Goreng, perkiraan produksi tahun 2019 sebesar 30,060 juta ton dan stok awal tahun 2019 sebesar 5,346 juta ton. Stok awal adalah stok minyak goreng yang bersumber dari BPS, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI). Perkiraan kebutuhan minyak goreng sebesar 8,906 juta ton, sehingga pada akhir tahun 2019 terdapat surplus 26,501 juta ton atau 297,546%. Surplus minyak goreng terjadi setiap bulan dan surplus sebagian besar di ekspor.
g. Bawang Merah, diperkirakan produksi dalam negeri 1,343 juta ton rogol (kering), sedang stok awal tahun 2019 belum tersedia data. Perkiraan total kebutuhan mencapai 1,346 juta ton termasuk kehilangan/tercecer 375,890 ribu ton, sehingga pada akhir tahun 2019 terdapat surplus 124,242 ribu ton atau 9,23%. Surplus terjadi setiap bulan, kecuali Maret, Mei, Juli dan Agustus. Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru, ketersediaan bawang merah aman.
h. Bawang Putih, diperkirakan kebutuhan mencapai 630,844 ribu ton, sudah termasuk kehilangan/tercecer. Sementara itu, sampai dengan tahun 2019, produksi bawang putih di Indonesia hanya cukup untuk memenuhi permintaan akan benih sehingga perhitungan prognosa produksi dan kebutuhan bawang putih tidak memasukkan produksi. Dengan kondisi tersebut, diperkirakan selama tahun 2019 terjadi defisit pada setiap bulannya dengan total dalam tahun 2019 sebesar 630,844 ribu ton atau 100% dari total kebutuhan.
i. Cabai Besar, perkiraan produksi 1,175 juta ton, sedang kebutuhan 890,262 ribu ton, sudah termasuk kehilangan/tercecer. Stok awal tahun 2019 diasumsikan

tidak ada karena cabai mudah rusak/busuk, sehingga pada akhir tahun 2019 terjadi surplus 285,053 ribu ton atau 32,02%. Surplus terjadi setiap bulan, kecuali bulan Agustus. Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru, ketersediaan cabai besar aman.

j. Cabai Rawit, perkiraan produksi 1,277 juta ton, sedang total kebutuhan 745,443 ribu ton (termasuk kehilangan/tercecer), sedang stok awal tahun 2019 diasumsikan tidak ada karena mudah rusak/busuk, sehingga pada akhir tahun 2019 terjadi surplus 531,677 ribu ton atau 71,32%. Surplus terjadi setiap bulan.
k. Daging Sapi dan Kerbau, perkiraan produksi 404,590 ribu ton (tidak memperhitungkan stok awal tahun), sedang kebutuhan sebesar 2,56 kg/kap/th atau 683,294 ribu ton, sehingga pada akhir tahun 2019 terjadi defisit sebesar 278,704 ribu ton atau sekitar 40,79%. Defisit terjadi setiap bulan.
l. Daging Ayam Ras, diperkirakan produksi 3,584 juta ton dan kebutuhan 12,13 kg/kap/th atau 3,237 juta ton sehingga pada akhir tahun 2019 terdapat surplus 346,828 ribu ton atau sekitar 12,18%. Surplus terjadi setiap bulan. Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru, ketersediaan cabai besar aman.
m. Telur Ayam Ras, perkiraan produksi 4,753 juta ton (tidak memperhitungkan stok awal tahun) dan perkiraan total kebutuhan 17,69 kg/kap/th atau 4,721 juta ton, sehingga pada akhir tahun 2019 terdapat surplus 31,711 ribu ton atau 0,67%. Menjelang HBKN Natal dan tahun Baru, ketersediaan cabai besar aman.

3.4.9. Panel Harga Pangan

Dalam rangka analisis harga dan pasokan pangan strategis, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2019 melakukan kegiatan pengumpulan dan pemantauan harga dan pasokan pangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota melalui metode Panel Harga Pangan. Kegiatan Panel Harga Pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi harga dan pasokan pangan secara cepat, tepat dan akurat sebagai bahan deteksi dini terjadinya gangguan harga dan pasokan pangan. Selain itu, melalui kegiatan Panel Harga Pangan, data dan informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan pimpinan dalam merumuskan dan pengambilan kebijakan terkait pangan.

Kegiatan Panel Harga Pangan tahun 2019 merupakan kelanjutan dari Kegiatan Panel Harga yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Pada tahun 2019, kegiatan panel harga dilaksanakan di tingkat produsen dan konsumen (grosir dan eceran) di 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota dengan jumlah enumerator sebanyak 928 orang. Selain itu pelaksanaan panel dilakukan juga di

konsumen (eceran) di pasar Jabodetabekkarpur dengan jumlah enumerator 50 orang.

Pada tahun 2019, pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan ditargetkan di 34 provinsi. Dari target tersebut, terealisasi 100% sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerja Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi tersebut dikategorikan berhasil. Pencapaian tersebut selaras dengan tahun 2018, terealisasi 100% baik jumlah kabupaten/kota maupun jumlah enumerator. Rincian pelaksanaan kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi Tahun 2015-2019 terlihat pada **Tabel 22.**

Tabel 22. Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah Provinsi Pelaksana			Jumlah Kab/Kota Pelaksana		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2015	34	34	100,00	270	514	190,37
2016	34	34	100,00	514	514	100,00
2017	34	34	100,00	514	514	100,00
2018	34	34	100,00	500	500	100,00
2019	34	34	100,00	500	500	100,00

Secara rinci, perkembangan lokasi dan jumlah petugas enumerator Tahun 2015 - 2019 terlihat pada **Tabel 23.** Dari tabel tersebut dapat dilihat jika jumlah enumerator pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2017 yang disebabkan oleh adanya kebijakan realokasi anggaran yang menyebabkan turunnya anggaran fasilitasi honor bagi enumerator sehingga jumlah enumerator mengalami penyesuaian. Selain itu, faktor pertimbangan jarak dan lokasi kabupaten yang jauh serta sulit jangkauan komunikasi menjadi pertimbangan penyesuaian enumerator. Hal penting terkait kegiatan panel harga pangan adalah petugas pengolah data harga pangan di Dinas propinsi yang menangani pangan. Petugas tersebut mempunyai tugas mengolah, memvalidasi dan menganalisis data harga pangan di wilayahnya untuk dilaporkan kepada pimpinan unit kerjanya.

Tabel 23. Lokasi dan Jumlah Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2015 – 2019

NO	Provinsi	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Kab/ Kota	Enum	Kab/Kota	Enum	Kab/Kota	Enum	Kab/Kota	Enum	Kab/Kota	Enum
1	Banten	8	19	8	19	8	19	8	17	8	20
2	Jawa Barat	27	61	27	61	27	61	27	51	27	54
3	Jawa Tengah	35	75	35	75	35	75	35	63	35	93
4	DI Yogyakarta	5	14	5	14	5	14	5	12	5	14
5	Jawa Timur	38	87	38	87	38	87	38	72	38	79
6	Sumatera Utara	33	69	33	69	33	69	33	56	33	59
7	Sumatera Barat	19	43	19	43	19	43	19	38	19	40
8	Riau	12	15	12	15	12	15	12	15	12	13
9	Lampung	15	33	15	33	15	33	15	31	15	32
10	Kalimantan Barat	14	29	14	29	14	29	14	26	14	29
11	Kalimantan Selatan	13	32	13	32	13	32	13	29	13	29
12	Sulawesi Utara	15	30	15	30	15	30	15	27	15	27
13	Sulawesi Selatan	24	55	24	55	24	55	24	45	24	45
14	Nusa Tenggara Barat	10	24	10	24	10	24	10	22	10	24
15	Nusa Tenggara Timur	22	23	22	23	22	23	22	23	22	22
16	Maluku	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
17	Aceh	23	48	23	48	23	48	23	43	23	50
18	Kepulauan Riau	7	5	7	5	7	5	7	8	7	8
19	Bengkulu	10	19	10	19	10	19	10	17	10	19
20	Jambi	11	23	11	23	11	23	11	26	11	27
21	Sumatera Selatan	17	38	17	38	17	38	17	33	17	38
22	Bangka Belitung	7	11	7	11	7	11	7	11	7	8
23	DKI Jakarta	6	8	6	8	6	8	6	8	6	9
24	Kalimantan Tengah	14	29	14	29	14	29	14	26	14	27
25	Kalimantan Timur	10	11	10	11	10	11	10	11	10	10
26	Sulawesi Tenggara	17	34	17	34	17	34	17	29	17	29
27	Sulawesi Barat	6	8	6	8	6	8	6	8	6	7
28	Sulawesi Tengah	13	25	13	25	13	25	13	26	13	27
29	Gorontalo	6	17	6	17	6	17	6	12	6	13
30	Bali	9	19	9	19	9	19	9	17	9	18
31	Maluku Utara	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11
32	Papua Barat	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14
33	Papua	29	32	29	32	29	32	15	21	29	15
34	Kalimantan Utara	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6
Total		**514**	**979**	**514**	**979**	**514**	**979**	**500**	**866**	**500**	**928**

Sumber: Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, 2019

Khusus panel harga pangan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta (Jabodetabekkarpur), sejak tahun 2017 - 2019 tetap dilaksanakan di 50 pasar dengan sebaran lokasi dan enumerator seperti terlihat pada **Tabel 24**. Panel harga pangan Jabodetabekarpur langsung dikoordinir di BKP Pusat mengingat wilayah tersebut merupakan barometer harga pangan nasional, sehingga data/informasi harga dapat dimonitor lebih intensif.

Tabel 24. Lokasi dan Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan di Jabodetabekkarpur Tahun 2017 - 2019

No	Provinsi	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Kab/Kota	Enum	Kab/Kota	Enum	Kab/Kota	Enum
1	DKI Jakarta	4	24	4	24	4	24
2	Jawa Barat	7	20	7	20	7	20
3	Banten	2	6	2	6	2	6
Total		**13**	**50**	**13**	**50**	**13**	**50**

Sumber: Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, 2019

Perkembangan kegiatan panel harga pangan tahun 2015 - 2019 baik cakupan jenis komoditas dan pengiriman data seperti terlihat pada **Tabel 25.**

Tabel 25. Perkembangan Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	**Jenis Komoditas**					
	Produsen	**8 komoditas**: - GKP petani, - GKP dan GKG penggilingan - Beras medium dan premium di penggilingan - Jagung - Cabai merah keriting - Bawang merah	**8 komoditas**: - GKP petani, - GKP dan GKG penggilingan, - Beras medium dan premium di penggilingan - Jagung - cabai merah keriting - bawang merah	**8 komoditas**: - GKP petani, - GKP dan GKG penggilingan - Beras medium dan premium di penggilingan - Jagung - Cabai merah keriting - bawang merah	**10 komoditas**: - GKP petani - GKP dan GKG penggilingan, - Beras medium dan premium di penggilingan - Jagung - Kedelai - Cabai merah keriting - Cabai rawit merah - Bawang merah - Daging sapi	**10 komoditas**: - GKP petani - GKP dan GKG penggilingan, - Beras medium dan premium di penggilingan - Jagung - Kedelai - Cabai merah keriting - Cabai rawit merah - Bawang merah - Daging sapi
	Konsumen	**12 komoditas**: - Beras premium - Beras medium - Beras termurah - Jagung - Kedelai - Cabai merah keriting - Bawang merah - Daging sapi - Daging ayam ras - Gula pasir - Minyak goreng - Telur ayam ras	**12 komoditas**: - Beras premium - Beras medium - Beras termurah - Jagung - Kedelai - Cabai merah keriting - Bawang merah - Daging sapi - Daging ayam ras - Gula pasir - Minyak goreng - Telur ayam ras	**12 komoditas**: - Beras premium - Beras medium - Beras termurah - Jagung - Kedelai - Cabai merah keriting - Bawang merah - Daging sapi - Daging ayam ras - Gula pasir - Minyak goreng - Telur ayam ras	**15 komoditas**: - Beras premium - Beras medium - Beras termurah - Jagung - Kedelai - Cabai merah keriting - Bawang merah - Daging sapi - Daging ayam ras - Gula pasir - Minyak goreng - Telur ayam ras - Cabai rawit merah - Bawang putih - Terigu	**15 komoditas**: - Beras premium - Beras medium - Beras termurah - Jagung - Kedelai - Cabai merah keriting - Bawang merah - Daging sapi - Daging ayam ras - Gula pasir - Minyak goreng - Telur ayam ras - Cabai rawit merah - Bawang putih - Terigu
2	**Pengiriman data**					
	Mingguan	**1 kali** (setiap hari Senin) panel produsen dan konsumen.	**1 kali** (setiap hari Senin) panel produsen dan konsumen.	**1 kali** (setiap hari Senin) panel produsen dan konsumen.	**2 kali** (setiap hari Senin dan Kamis) panel produsen dan konsumen.	**-**

	Harian	tidak ada	tidak ada	Jabodetabek (panel konsumen)	Jabodetabek dan Ibu Kota Provinsi (panel konsumen)	Produsen, Konsumen, Ibukota Provinsi, dan Jabodetabek.

Terlihat bahwa komoditas yang dipantau terus berkembang, ditingkat produsen dari 8 jenis pada tahun 2015 - 2017 menjadi 10 komoditas pada tahun 2018 - 2019, sedangkan ditingkat konsumen dari 12 komoditas pada tahun 2015 - 2017 menjadi 15 komoditas pada tahun 2018 - 2019. Begitu juga tingkat pengiriman data harga bekembang, dari sebelumnya tahun 2015 - 2016 hanya satu kali seminggu (setiap hari Senin) baik panel produsen dan konsumen, pada tahun 2017 bertambah harian khususnya panel konsumen di Jabodetabekkarpur, tahun 2018 berubah menjadi 2 kali seminggu (Senin dan Kamis) untuk panel produsen dan konsumen, dan pada tahun 2019 berubah menjadi harian untuk semua jenis laporan panel harga pangan.

3.4.10. Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan Periode HBKN

Perayaan Hari-hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Puasa, Idul Fithri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, termasuk Imlek dan hari besar keagamaan di wilayah tertentu seringkali terjadi permasalahan gejolak harga dan pasokan pangan pokok/strategis, bahkan tidak jarang berdampak gejolak di masyarakat. Memasuki bulan Mei 2019 atau HBKN Puasa semua pihak disadarkan akan perlunya langkah antisipatif dengan meningkatkan koordinasi semua sektor untuk memastikan stabilisasi harga dan pasokan komoditas pangan strategis terjamin dan terkendali.

Periode HBKN Puasa Ramadhan dan Idul Fitri seperti tahun sebelumnya selalu diikuti dengan peningkatan permintaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan menjadi sangat penting karena terjadinya kekurangan pasokan pangan dan gejolak harga pangan pada periode HBKN menyebabkan fluktuasi harga yang berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pertanian perlu mengupayakan langkah-langkah antisipasi secara dini dan terkoordinasi melalui kebijakan yang tepat, seperti yang telah dilakukan pada periode HKBN Puasa dan Idul Fitri Tahun 2018. Tak terkecuali Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang seperti tahun sebelumnya selalu melaksanakan Kegiatan Pengamanan Stabilitsasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok/Strategis.

Hal yang sama juga dilakukan saat Periode HBKN Puasa dan Lebaran Idul Fitri 2019. Meski untuk Pengamanan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/Strategis di saat Puasa Ramadhan dan Lebaran, lebih banyak

memfokuskan kegiatan di Jakarta dan sekitarnya dengan melaksanaan Gelar Pangan Murah di beberapa tempat baik di perumahan, tempat umum hingga pasar-pasar. Tujuannya sama yakni menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan pokok strategis agar tidak ada gejolak di masyarakat.

HBKN Periode Puasa dan Idul Fitri 2019 dimulai dua minggu sebelum memasuki bulan Ramadhan, Badan Ketahanan Pangan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dari mulai Bulog, pemasok, distributor hingga PD Pasar Jaya selaku pemangku operasional pasar di DKI Jakarta. DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi fokus karena selalu menjadi barometer stabilisasi harga secara nasional. Artinya jika harga maupun pasokan bahan pangan pokok strategis di Jabodetabek dapat terkendali, bisa diprediksi nasional relatif aman.

Langkah strategis pengamanan pasokan dan harga pangan periode HBKN Puasa dan Idul Fitri 2019 dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak luar dan internal Kementerian Pertanian. Dengan pihak luar telah dilakukan rakor menjelang HBKN terkait dengan kesiapan pasokan, diantarnya:

a. Koordinasi dengan Perum Bulog untuk stabilisasi pasokan beras dan minyak, sedangkan pemasok maupun distributor lainnya terkait dengan komoditas peternakan seperti telur, daging ayam dan daging sapi. Demikian juga dengan distributor cabai, bawang merah, bawang putih, dan gula.
b. Dilakukan kesepakatan untuk Gelar Pangan Murah bersama dengan PD Pasar Jaya seperti tahun-tahun sebelumnya. Kesekapatan ini merupakan langkah konkrit untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok secara mudah dan terjangkau, khususnya di pasar-pasar sekitar Jabodetabek. Tahun 2018 GPM didukung juga oleh para distrutor daging ayam, daging sapi dan telur ini ternyata memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menjaga stabilisasi harga muapun pasokan. Sehingga gejolak permintaan maupun kenaikan harga menjelang dan selama HBKN Puaas dan Lebaran dapat terkendali. Tahun 2019 GPM di laksanakan di 44 titik yang tersebar di seluruh Jakarta, sebagain wilayah Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi.
c. Rakor internal Kementerian Pertanian dipimpim oleh Sektretaris Jenderal Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk memantapkan dan memastikan Dirjen Teknis seperti Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Perkebunan, serta Unit Kerja lingkup Kementan untuk bersama-sama mengamankan produksi pangan strategis.

Hal yang sama juga dilakukan saat periode HBKN Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Badan Ketahanan Pangan juga melakukan pengamanan harga dan pasokan pangan strategis di 12 provinsi (DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Kalbar, Bali, Kalimantan Timur) yang mayoritas merayakan Hari Besar Keagamaan Natal 2019 atau tujuan liburan tahun baru. Di tingkat pusat kegiatan tersebut dilakukan dengan menggelar Rapat Koordinasi Gabungan dengan melibatkan pemangku kepentingan dari mulai kementerian terkait, Bulog, Satgas Pangan dan pelalu usaha komoditas pangan. Sedangkan kegiatan di 12 provinsi tersebut kegiatan diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Gabungan dengan pemangku kepentingan terkait pengamanan harga dan pasokan, Gelar Pangan Murah dan pemantauan harga di pasar-pasar utama ibukota provinsi.

Dari kegiatan pengamanan harga pangan dilakukan beberapa hal diantaranya:

a. Dalam Rakorgab tingkat Pusat, BKP Kementerian Pertanian memaparkan bahwa kondisi ketersediaan pangan pokok dan strategis secara nasional. Rakorgab di Provinsi juga dilakukan pemaparan terkait ketersediaan pangan strategis tingkat provinsi sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi ketersediaan. Dari kondisi tersebut dapat ditanggapi langsung pihak terkat baik pelaku usaha maupun dinas terkait seperti perdagangan, dinas ketahanan pangan, pertanian, dinas perhubungan terkait logistik dan distribusi untuk mencari solusi sekaligus memastikan pasokan dan stabilisasi harga berjalan maksimal.
b. BKP Pusat dan Dinas Pangan provinsi melakukan kegiatan Gelar Pangan Murah/Bazar sebagai aksi nyata untuk memastikan ketersediaan dan pasokan bahan pangan pokok cukup dan terjangkau masyarakat.
c. BKP Pusat dan Dinas Pangan propinsi bersama instansi terkait melakukan pemantauan harga pangan lebih intensif sejak awal Desember 2019, sehingga jika terjadi gejolak harga akan cepat terdeteksi. Pemantauan dilakukan setiap hari dan komoditas yang di pantau adalah harga bahan pangan pokok strategis di pasar dari seluruh kabupaten/kota. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Gubernur dan bila diperlukan segera dilakukan intervensi pasar.
d. Perum BULOG, baik pusat maupuan di provinsi memiliki ketersediaan stok bahan pangan pokok/strategis yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar menjelang HBKN Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

e. Satgas Pangan, baik di pusat maupun daerah aktif melaksanakan pemantauan ketersediaan/stok dan harga pangan pokok dan strategis untuk membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Selain itu juga melakukan tindakan prefentif sampai represif khususnya bagi pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran agar kondisi pasokan dan harga pangan terjaga dan stabil.

3.4.11. Subsidi Biaya Distribusi Pangan

Variasi jumlah produksi antar wilayah dan antar waktu mengakibatkan jumlah pasokan tidak merata baik antar wilayah maupun antar waktu. Pada saat panen raya produksi hasil pertanian sangat berlimpah namun kecenderungan permintaan selalu tetap sepanjang waktu sehingga terjadi *over supply* dan penurunan harga. Disisi lain, pada saat masa paceklik pasokan mengalami penurunan yang dapat mengancam pemenuhan ketersediaan pangan yang memicu kenaikan harga.

Kendala transportasi yang menyebabkan produksi pangan dari daerah sentra tidak dapat diterima secara merata oleh konsumen di daerah non sentra secara kontinu menyebabkan disparitas harga di tingkat konsumen sangat bervariasi antar wilayah. Permasalahan lain yang juga terjadi adalah tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan harga tingkat konsumen antar wilayah dan keuntungan yang berkeadilan untuk konsumen maupun produsen.

Sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ini, Kementerian Pertanian melakukan kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk mengatasi gejolak harga pangan pokok dan strategis, dengan cara memperbaiki rantai distribusi pemasaran dari wilayah produsen ke wilayah konsumen secara lebih efisien. Melalui pemberian biaya distribusi agar produk pangan dapat terdistribusi dengan baik dari produsen ke konsumen dalam satu wilayah maupun antar wilayah, diharapkan adanya kontinuitas pasokan dengan harga yang menguntungkan untuk produsen tetap juga wajar dan terjangkau untuk konsumen. Selain itu transmisi harga yang lebih baik dari harga konsumen ke harga produsen dapat terwujud.

Tujuan kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan yaitu: (a) Memperbaiki proses distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen sehingga produsen dapat memperoleh harga yang menguntungkan; (b) Memberikan kemudahan aksesibilitas produk pangan kepada konsumen/ masyarakat dengan harga yang terjangkau dan wajar; dan (c) Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis**.** Sasaran kegiatan ini

adalah wilayah-wilayah produsen pangan yang mengalami penurunan harga pangan dan wilayah-wilayah konsumen yang mengalami kenaikan harga signifikan sehingga menimbulkan disparitas harga antar produsen dan konsumen serta antar wilayah konsumen sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan pengamanan dan stabilisasi harga pangan dilakukan melalui pengajuan usulan kegiatan oleh Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Propinsi/Kabupaten/Kota cq. TTIC atau Asosiasi Komoditas Pangan ke BKP. Apabila dipandang memang diperlukan setelah terlebih dahulu dilakukan survey di lokasi dimana terjadi gejolak pangan, BKP akan mengeluarkan persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan. Kegiatan dilakukan melalui penyaluran produk pangan yang bergejolak dari produsen ke konsumen dengan pemberian bantuan biaya distribusi yang terdiri dari biaya transportasi, ongkos bongkar muat dan biaya kemasan. Selanjutnya ditunjuk pelaksana di wilayah produsen (petani/peternak/Asosiasi Komoditas Pangan), penerima di wilayah konsumen (TTIC), usaha jasa transportasi pelaksana. Selain itu juga ditetapkan volume produk pangan yang akan didistribusikan serta harga kesepakatan.

Distribusi bahan pangan selanjutnya dilakukan oleh usaha jasa transportasi yang telah ditunjuk dengan tujuan TTIC penerima. TTIC dapat langsung mendistribusikan ke konsumen ataupun melakukan penyaluran ke konsumen melalui TTI maupun Operasi Pasar. Mekanisme kegiatan terlihat pada **Gambar 8**.

Gambar 8. Mekanisme Kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan: Subsidi Biaya Distribusi

Kegiatan pengamanan dan stabilisasi harga pangan melalui subsidi biaya distribusi pangan yang telah dilakukan tahun 2019 adalah:

a. Untuk membantu petani/peternak yang mengalami penurunan harga di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP). Komoditas yang telah disalurkan adalah telur ayam ras dan daging ayam ras. Secara rinci sebagai berikut:

(1) Telur Ayam Ras

Telur ayam mengalami lonjakan harga pada bulan Mei 2019 menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. BKP melakukan kegiatan pengamanan dan stabilisasi harga pangan untuk komoditas telur dengan mendistribusikan dari PT. Puri Farm Tangerang Banten sebagai produsen ke daerah konsumen di Jabodetabek melalui Gelar Pangan Murah (GPM). Pelaksanaan GPM dilakukan di Pasar Jabodetabek yaitu Pasar Lenteng Agung, Pasar Kramat Jati, Pasar Tebet Barat, Pasar Cijantung, Pasar Jati Cempaka, Pasar Kebayoran lama, Pasar Pademan Timur, Pasar Bogor, Pasar Pos Pengumben dan Pasar Mayestik. Harga telur rata-rata di pasar-pasar tersebut berkisar Rp25.000/kg - Rp 26.000/kg, sedangkan harga jual di TTIC antara Rp22.000/kg - Rp 23.000/kg.

(2) Daging Ayam Ras

Pada bulan Agustus dan September 2019 terjadi penurunan harga ayam potong di tingkat peternak di wilayah Jawa Tengah. Harga jual di tingkat peternak sangat rendah, jauh dibawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang diklaim peternak sebesar Rp9.000/kg - Rp11.000/kg. Penurunan ini disebabkan karena jumlah ayam potong yang dihasilkan peternak jauh melebihi jumlah kebutuhan ayam potong yang ada. Untuk membantu peternak agar tidak mengalami kerugian maka BKP membantu mendistribusikan ayam tersebut yaitu dari Kabupaten Boyolali, Klaten dan Sukoharjo ke daerah konsumen di wilayah Jabodetabek dengan bantuan dana distribusi. Jumlah ayam yang didistribusikan sebanyak 18.000 kg dengan harga jual Rp25.000/kg - Rp27.000/kg.

b. Untuk mengatasi kenaikan harga yang tinggi di tingkat konsumen.

Pada musim paceklik atau gagal panen, harga jual komoditas pangan pokok/strategis di tingkat konsumen cenderung mengalami kenaikan. Selanjutnya petani/peternak diminta untuk melakukan OP dengan harga jual yang tetap menguntungan tetapi berada di bawah harga pasar saat itu. Selain itu tetap diberikan bantuan biaya distribusi. Komoditas yang telah disalurkan yaitu cabai, bawnag putih, dan beras. Secara rinci sebagai berikut:

(1) Cabai Merah Keriting dan Cabai Rawit Merah

Kegiatan dilakukan pada Bulan Mei, Juli dan Agustus 2019. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka merespon kenaikan harga yang sangat tinggi di wilayah

seluruh Indonesia terutama di DKI Jakarta. Harga pasar di DKI Jakarta pada bulan tersebut adalah Rp40.000/kg - Rp50.000/kg. Kenaikan harga ini terjadi disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan serangan hama penyakit sehingga berdampak pada gagal panen di beberapa wilayah. Sementara di wilayah konsumen terjadi peningkatan kebutuhan menjelang dan pasca Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Pengiriman dilakukan dari Kabupaten Tuban dan Kediri (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten Garut dan Ciamis (Provinsi Jawa Barat).

Komoditas dikirim oleh Gapoktan PUPM Cabe antara lain: Agro Papadayan, Karangsari, Wargi Panggupay, Mujagi, Minasari Subur, Sindang Jaya. Pasokan cabai selain dari Gapoktan PUPM cabai juga dari Champion cabai Cianjur Jawa Barat, Magelang Jawa Tengah dan Blitar Jawa Timur. Pengiriman dilakukan ke TTI Jakarta yang kemudian di distribusikan ke konsumen secara langsung dan melalui TTI serta GPM/bazar/OP di wilayah Jabodetabek. Jumlah pengiriman total sebanyak 71.934 kg, terdiri dari cabe rawit merah dan cabe merah keriting.

(2) Bawang Putih

GPM bawang putih dilakukan pada bulan April, Mei dan November 2019. Kenaikan harga bawang putih dikarenakan belum dibukanya impor bawang putih oleh Kementerian Perdagangan. Harga bawang putih berkisar Rp60.000/kg - Rp70.000/kg di seluruh Provinsi. Sedangkan harga jual bawang putih di TTIC Jakarta Rp25.000/kg. Oleh karena itu, BKP melakukan pendistribusian bawang putih sebesar 30 ton ke Provinsi Sumatera Utara dan Lampung pada bulan Mei 2019, sebesar 50 ton kg ke Pasar di DKI Jakarta pada bulan April - Mei 2019 dan ke Provinsi Sumatera Barat pada bulan November 2019 sebanyak 30 ton.

(3) Beras

Menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 terjadi kenaikan pangan terutama komoditas beras. Harga beras di Papua berkisar antara Rp13.000/kg - Rp14.000/kg sedangkan di NTT berkisar antara Rp15.000/kg-Rp16.000/kg. Merespon kondisi ini, BKP membantu mendistribusikan beras bantuan dana distribusi yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Nganjuk dan Ngawi Provinsi Jawa Timur sebanyak 22.000 kg ke TTIC NTT untuk dijual ke konsumen seharga Rp8.800/kg. Sedangkan untuk Papua, beras sebanyak 78.000 kg dari Merauke di distribusikan ke Kabupaten Boven Digoel dengan harga jual Rp9.000/kg.

3.4.12. Penyusunan Kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam upaya mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, pada tahun 2019 setidaknya ada 3 (tiga) penyusunan kebijakan terkait cadangan pangan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, yaitu: (a) Penyusunan Perpres ratifikasi Protokol Amandemen APTERR; (b) Inisiasi Inpres Percepatan Penyelenggaraan CBPD untuk Ketahanan Pangan; (c) Usulan Peraturan Cadangan Jagung Pemerintah; dan (4) Penyusunan Keputusan Menteri Pertanian No. 45 tahun 2019 tentang Kriteria Penurunan Mutu Beras CBP.
Secara rinci penyusunan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Perpres Ratifikasi Protokol Amandemen APTERR

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kawasan ASEAN+3 (ASEAN dan tiga negara mitra, China, Jepang dan Korea) dibentuk mekanisme ASEAN Plus *Three Emergency Rice Reserve* (APTERR). Kesepakatan APTERR ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan dari 13 negara anggota ASEAN Plus Three pada 7 Oktober 2011 di Jakarta, Indonesia. Indonesia telah meratifikasi APTERR Agreement pada tanggal 13 Juni 2012 dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Plus *Three Emergency Rice Reserve Agreement*.

Sebagai tindaklanjut dari persetujuan APTERR tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk kontribusi dana abadi (*endowment fund*) sebesar USD 107.500 dan kontribusi tahunan sebesar USD 8.000 untuk biaya operasional selama 5 (lima) tahun pertama (TA 2012-2017). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengalokasikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk keperluan cadangan beras APTERR sebanyak 12.000 Metrik Ton (MT) beras dari total komitmen negara-negara ASEAN+3 sebesar 787.000 Metrik Ton (MT) beras.

Dalam perkembangannya, negara-negara anggota ASEAN+3 memandang diperlukannya penguatan kerjasama mengingat adanya kebutuhan terkait pengelolaan kesekretariatan, operasional kegiatan dan program APTERR. Untuk itu, pada pertemuan AMAF ke-18 tanggal 12 Oktober 2018 di Ha Noi, Viet Nam para Menteri Pertanian dan Kehutanan dari 13 negara anggota ASEAN+3 menyepakati *Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga), yang pada intinya menyepakati untuk mengubah Lampiran 2 dari Persetujuan APTERR yang berisi perpanjangan masa pembayaran kontribusi tahunan APTERR 2018-2022 dan mekanisme kedepannya.

Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengenai perjanjian internasional, Indonesia perlu meratifikasi Protokol tersebut. Indonesia dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian selaku *focal point* APTERR bertanggungjawab untuk melakukan proses ratifikasi Persetujuan tersebut dengan menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga).

Proses tersebut telah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

(1) Penyampaian Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Luar Negeri No. 01/HK.130/ M/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Penyampaian Izin Prakarsa Penyusunan Perpres Protokol Amandemen Persetujuan APTERR.

(2) Penyampaian Surat Menteri Luar Negeri kepada Presiden RI nomor 023/HI/01/ 2019/08/01 tanggal 28 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Perpres Protokol Amandemen Persetujuan APTERR.

(3) Persetujuan Presiden RI terhadap Permohonan Izin Prakarsa yang dinyatakan melalui surat Menteri Sekretaris Negara No. B-467/M.Sesneg/D-1/HK.03.04/04/ 2019 tanggal 2 April 2019 perihal Persetujuan Izin Prakarsa.

(4) Penyampaian permintaan Anggota Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) kepada kementerian/lembaga terkait melalui surat Kepala Badan Ketahanan Pangan No. B-115/KL.230/J/04/2019 tanggal 12 April 2019.

(5) Penetapan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/KPTS/OT.050/M/6/2019 tentang Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.

(6) Rapat koordinasi Tim PAK untuk memfinalkan rancangan perpres yang disertai dengan naskah penjelas dan naskah terjemahan. Tim PAK mencakup unsur Kementan, Kemenko Perekonomian, Kemenkumham, Setkab, Setneg, dan Kemenlu.

(7) Proses harmonisasi rancangan perpres di Kemenkumham sebagai tindaklanjut Surat Menteri Pertanian RI kepada Menteri Hukum dan HAM RI No: 74/HK.130/M/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019. Kesepakatan harmonisasi rancangan perpres disampaikan kepada Menteri Pertanian oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat No. PPE.PP.03.03.1582 tanggal 27 September 2019.

(8) Penyampaian Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Luar Negeri tentang Hasil Pengharmonisasian Rancangan Perpres, yang dilanjutkan dengan

Surat Menteri Luar Negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memproses penandatangan rancangan perpres oleh Presiden RI.

Hingga akhir tahun 2019, proses penyelesaian perpres ini telah berada pada tahap akhir, yaitu proses di Kemensetneg untuk mendapatkan tandatangan Presiden RI. Perpres ini memiliki peranan sebagai dasar bagi Pokja Kontribusi Kemenlu dalam melakukan pembayaran iuran kontribusi negara Indonesia kepada organisasi internasional yang menjadi mitra, dalam hal ini kepada APTERR. Iuran kontribusi APTERR TA 2018-2019 belum dapat dibayarkan oleh Indonesia pada tahun 2019, mengingat hingga akhir tahun rancangan perpres masih belum dapat ditandatangani oleh Presiden RI.

b. Inisiasi Inpres Percepatan Penyelenggaraan CBPD untuk Ketahanan Pangan

Undang-Undang No 18/2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pada PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan bahwa penyelenggaraan CPPD dilakukan tidak hanya di tingkat pusat, namun juga di tingkat daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan sampai dengan tingkat desa. Hingga tahun 2019, implementasi penyelenggaraan CBPD di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa masih jauh dari kondisi ideal. Untuk mendorong percepatan penyelenggaraan CBPD provinsi, kabupaten/kota, dan desa maka sesuai dengan arahan Menteri Pertanian RI diinisiasi penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan CBPD untuk Ketahanan Pangan. Keberadaan CBPD bersifat strategis sebagai upaya antisipasi untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat, serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Dalam penyusunan rancangan Inpres tersebut, Badan Ketahanan Pangan telah melakukan rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur Kementan, Kemenko Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT. Dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2019, Kementerian Desa dan PDTT menyampaikan masukan yaitu: (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan BUMDes; (2) Permendesa terkait pemanfaatan Dana Desa diterbitkan setiap tahun, sehingga dapat saja dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan CPP Desa; dan (3) Setelah Inpres CPP Desa ini dikeluarkan, diperlukan adanya aturan mengenai jumlah pangan yang harus dialokasikan di setiap desa.

Kemenko Perekonomian mendukung adanya inpres CBPD sebagai upaya untuk menguatkan dan menggugah daerah dalam mempercepat alokasi CPPD di daerahnya masing-masing. Kemendagri memandang perlu adanya pembahasan lebih lanjut melibatkan Kementerian Sosial, menimbang keberadaan CBPD diantaranya ditujukan untuk antisipasi penanggulangan kekurangan pangan akibat bencana alam dan bencana sosial. Dalam hal penyelenggaraan CBPD, khususnya terkait penganggaran, Kemendagri telah memberikan acuan penggunaan kode mata anggaran yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Permendagri No. 90/2019.

Dalam rancangan Inpres tentang penyelenggaraan CBPD untuk ketahanan pangan, Presiden terdapat beberapa amanat yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Pemerintah Desa untuk mengambil langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk menyelenggarakan CBPD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Usulan Rancangan Inpres tersebut telah disampaikan oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Perekonomian di akhir tahun 2019, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati di Rakortas Kemenko Perekonomian.

c. Usulan Cadangan Jagung Pemerintah

Sesuai dengan mandat UU No.18/2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka perlu Penetapan Jenis, Jumlah dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Selain itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Pemerintah menugaskan Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stablisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai. Berdasarkan penugasan tersebut, pada saat ini Perum Bulog baru sebatas melakukan pengelolaan cadangan pangan berupa beras. Mengingat jagung merupakan komoditas pangan utama setelah padi yang mempunyai peranan strategis pada sektor pertanian, maka dipandang perlu untuk merekomendasikan jumlah cadangan jagung pemerintah.

Komoditas jagung berperan sebagai bahan pangan, bahan pakan dan bahan baku industri. Permintaan jagung untuk pakan 7–8 juta ton per tahun, dengan kebutuhan untuk peternak mandiri mencapai 2,5 juta ton per tahun (GPMT, 2019). Kebutuhan jagung sebagian besar untuk bahan pakan (65%), sebagai komponen

utama dalam ransum pakan ternak, terutama unggas, dengan proporsi kebutuhan mencapai 50%. Berdasarkan hal tersebut maka perlu Penetapan Jumlah dan Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah.

Perhitungan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) menggunakan pendekatan yang sama dengan perhitungan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yaitu merujuk pada konsep Stock Utilization Ratio (SUR). Konsep ini menghitung besarnya rasio antara jumlah stok/persediaan terhadap total kebutuhan penduduk (konsumsi dan kebutuhan lainnya). Merujuk pada data series FAO-AMIS (Agricultural Market Information System) selama 5 tahun terakhir, besaran Stock Utilization Ratio (SUR) pada komoditas beras sebesar 18-20%, sementara pada komoditas jagung besaran SUR berada pada kisaran 12% dari kebutuhan. Prosentase tersebut kemudian menjadi dasar dalam perhitungan Cadangan Jagung Nasional.

Berdasarkan estimasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian diketahui bahwa kebutuhan jagung untuk pakan (industri dan peternak lokal) Tahun 2019 mencapai 11.196.033 ton (Pipilan Kering dengan Kadar Air 15%). Dari total kebutuhan tersebut, diperlukan Cadangan Jagung Nasional untuk pakan sebesar 1.343.534 ton. Cadangan Jagung Nasional terdiri dari Cadangan Jagung Pemerintah dan Cadangan Jagung Masyarakat (petani, pedagang dan industri). Dengan memperkirakan bahwa masyarakat (petani, pedagang dan industri) setidaknya menguasai cadangan jagung sebesar 60 persen, maka pemerintah setidaknya mengelola Cadangan Jagung Pemerintah untuk Pakan sebesar 40 persen atau setara 537.410 ton untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan jagung untuk pemenuhan kebutuhan pakan. Selaras dengan hal tersebut dan menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman terkait dengan urgensi pemenuhan kebutuhan jagung sebagai bahan pakan ternak, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan juga telah menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Cadangan Jagung Pemerintah.

d. Penyusunan Keputusan Menteri Pertanian No. 45 tahun 2019 tentang Kriteria Penurunan Mutu Beras CBP

Keputusan Menteri Pertanian No.45 tahun 2019 tentang kriteria penurunan mutu beras CBP merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pertanian No.38/Permentan/ KN.130/8/2018 tentang pengelolaan Cadangan beras Pemerintah. Pada Permentan 38/2018 pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa kriteria penurunan mutu diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri. Komponen penurunan mutu tersebut sebagaimana

pasal 4 ayat 1 memenuhi kriteria paling sedikit derajat sosoh di bawah ambang batas minimum serta butir patah dan kadar air di atas ambang batas maksimum.

Untuk itu, pada Kepmentan 45/2019 tersebut diatur mengenai komponen mutu, parameter mutu, dan metode yang digunakan sesuai referensi yang berlaku (**Tabel 26**). Langkah-langkah metode pengujian dicantumkan sebagai lampiran pada Kepmentan 45/2019. Keputusan Menteri Pertanian no 45 tahun 2019 ini menjadi dasar bagi Perum BULOG untuk melakukan pengelolaan CBP.

Tabel 26. Kriteria Penurunan Mutu Cadangan Beras Pemerintah

No	Komponen Mutu	Parameter Penurunan Mutu	Metode
1	Kadar Air	> 14 %	SNI 6128: 2015
2	Butir Patah	> 20 %	SNI 6128: 2015
3	Derajat Sosoh	< 95 %	SNI 6128: 2015
4	Bau	Bau apek, asam, atau bau asing lainnya	uji organoleptik

3.4.13. Kajian Terkait Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan

Untuk mendukung kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan, pada tahun 2019 Pusat Distribusi dan Cadangan melaksanakan beberapa kajian terkait distribusi, cadangan dan harga pangan, yaitu: (a) Kajian Sistim Logistik Nasional (Sislognas); (b) Kajian Cadangan Pangan Pemerintah non Beras (Jagung, Bawang Merah, dan Cabai); dan (c) Kajian *Forecast* (Peramalan) Harga Pangan Pokok/ Strategis. Secara rinci kajian tersebut sebagai berikut:

a. Kajian Sistim Logistik Nasional (Sislognas)

Pembangunan sistem logistik nasional telah ditetapkan menjadi kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Cetak biru ini merupakan kebijakan yang akan menjadi acuan bagi Menteri, Pimpinan Lembaga Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka penyusunan kebijakan dan rencana kerja yang terkait dengan pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian maupun dalam pembangunan daerah. Dokumen Sislognas juga menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan.

Sistem logistik mempunyai peranan yang penting dalam menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjadi benteng bagi kedaulatan dan ketahanan nasional termasuk di dalamnya kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Peran strategis Sistem Logistik Nasional tidak hanya dalam memajukan ekonomi nasional, namun sekaligus sebagai wahana pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien diyakini mampu mengintegrasikan daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat, sehingga diharapkan dapat menjadi penggerak bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritime.

Amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bagi Kementerian Pertanian penyediaan pangan dalam jumlah yang tepat, mutu yang baik, ketersediaan pangan yang menjangkau semua penduduk Indonesia di mana pun berada, dan dengan harga yang terjangkau menjadi suatu kewajiban. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan semua stakeholder pangan, seperti dunia usaha dari BUMN dan swasta, maupun para pelaku usaha pangan lainnya. Pembangunan dan pengembangan Sistem Logistik Pangan Pokok sangat diperlukan untuk mendukung perwujudan amanat Undang-Undang tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan logistik pangan pokok yang efektif untuk menjamin ketersediaan bahan pokok pangan dengan biaya logistik yang efisien untuk ketahanan pangan. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Logistik berperan penting mengatasi kelangkaan stok pangan, dan disparitas harga bahan pangan pokok antar wilayah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Sistem logistik pangan nasional defenisikan sebagai pengembangan tatakelola produksi dan distribusi pangan untuk menjamin kontinuitas pasokan secara merata antar wilayah dan memberikan insentif memadai bagi seluruh aktor, termasuk petani. Sesuai dengan Sistem Logistik Nasional yang merupakan rujukan penyusunan, Sistem Logistik Pangan Pokok menggunakan pendekatan konsep manajemen rantai pasok *(Supply Chain Management/SCM)* yang berbasis pada sinkronisasi, integrasi dan kolaborasi berbagai pihak terkait (pemangku kepentingan), dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang diwadahi dalam suatu tatanan kelembagaan yang terpercaya dan sistem organisasi yang efektif. Sistem logistik pangan diharapkan dapat dioperasionalisasikan oleh pelaku dan penyedia jasa logistik yang profesional dan beretika, serta didukung oleh tersedianya infrastuktur logistik yang mencukupi dan handal.

Pemetaan wilayah surplus dan defisit menjadi pijakan utama dalam menentukan kebijakan sistem logistik pangan yang efektif dan efisien. Hasil pemetaan *supply* dan *demand* pangan akan diperoleh informasi apakah suatu

daerah mengalami kelebihan *(surplus)* atau kekurangan *(shortage)* bahan pokok pangan. Sistem logistik memberikan nilai tambah untuk mengatasi surplus atau kekurangan bahan pokok pangan. Bila suatu daerah mengalami surplus bahan pokok pangan tertentu, maka bahan pokok pangan tersebut dipindahkan ke daerah yang mengalami kekurangan. Sebaliknya, bila suatu daerah mengalami kekurangan bahan pokok pangan tertentu, maka akan dipenuhi dari daerah lain yang mengalami surplus.

Tujuan kajian Sistem Logistik Pangan Pokok Nasional yaitu: (1) membangun sistem logistik beras dan jagung yang terintegrasi antar wilayah; dan (2) menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas beras dan jagung. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sistem Logistik Pangan Pokok Nasional perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan ke dalam program, tahapan pelaksanaan, serta rencana aksi. Arah kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional perlu memperhatikan mengutamakan Kepentingan Nasional. Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, kepentingan nasional harus diutamakan. Sistem logistik pangan pokok nasional harus mampu meningkatkan daya saing produk pangan nasional, membantu meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengutamakan perdagangan pangan pokok yang berasal dari produksi pangan dalam negeri. Sistem Logistik Pangan Pokok Nasional juga harus dapat membantu menjaga stabilisasi pasokan dan harga dengan menjamin alur distribusi yang kompetitif dan lancar.

Kondisi dan permasalahan logistik pangan di Indonesia berdasarkan sub sistem sistem logistik pangan adalah: (1) sub sistem produksi : produksi tidak merata antar waktu dan antar wilayah; (2) sub sistem distribusi pangan: distribusi pangan dari produsen ke konsumen melibatkan banyak pelaku sehingga rantai pasok sangat panjang dan infrastruktur dan jaringan transportasi masih kurang memadai; dan (3) sub sistem pelaku : kemampuan dan kapasitas produksi petani masih terbatas, integrasi antarpelaku belum berjalan dengan baik dan sinergitas regulasi pusat-daerah belum optimal.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terjaminnya ketersediaan, kemudahan mendapatkan barang dari komoditas pokok dan strategis yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dengan harga yang relatif stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan program yang direncanakan meliputi:

(1) Pembangunan sistem logistik nasional melalui pengembangan jaringan distribusi penyangga baik ditingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, penataan ulang dan revitalisasi sistem distribusi termasuk

sistem distribusi antar wilayah dan antar pulau baik tata niaga, tata kelola, pelaku, dan sistem informasi, membangun dan merevitalisasi pasar tradisional baik prasarana, sarana, rantai pasok, maupun manajemen.

(2) Peningkatan ketersediaan pasokan nasional komoditas pokok dan strategis dan bahan baku yang masih diimpor; dan Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan pasokan dan penyaluran komoditas pangan pokok;

(3) Penurunan disparitas harga komoditas pokok dan strategis baik antar waktu dan antar daerah melalui stabilisasi harga yang terjangkau secara merata dan pembangunan Terminal Agribisnis, Pusat Distribusi *(distribution center),* dan peningkatan pemanfaatan Sistem Resi Gudang.

Strategi yang dilakukan membangun konektivitas domestik *(domestic connectivity)* baik konektivitas lokal *(local connectivity)* maupun konektivitas nasional *(national connectivity)* dan konektivitas global *(global connectivity)* yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kelancaran arus barang untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja sistem logistik nasional. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah tersedianya jaringan infrastuktur transportasi yang memadai dan handal dan beroperasi secara efisien. Fokus utama kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur diarahkan untuk: (1) pelabuhan utama dan hub internasional; (2) angkutan laut; (3) angkutan sungai, danau dan penyeberangan; (4) angkutan jalan (truk); (5) kereta api; serta (6) bandar udara dan angkutan udara.

Strategi yang diterapkan adalah penataan, penyusunan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan logistik pangan pokok. Fokus utama integrasi antarpelaku sistem logistik pangan melalui pembenahan dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan diarahkan pada: (1) regulasi bidang usaha dan perdagangan pangan pokok, (2) regulasi bidang transportasi, (3) regulasi ekspor dan impor pangan pokok, (4) regulasi infomasi dan transaksi elektronik, dan (5) regulasi transportasi multi moda. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah harmonisasi, penataan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan logistik. Sasaran tersebut dicapai melalui program, sebagai berikut:

(1) Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi dan kebijakan, yaitu: (a) Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan perdagangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang logistik, dan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan bidang perdagangan di pusat dan daerah yang terkait logistik; dan (b) Harmonisasi peraturan bidang ekspor-impor melalui peyelarasan peraturan perundangan tentang pemeriksaan

kepabeanan, karantina, BPOM dan lembaga penerbit perijinan lainnya, harmonisasi peraturan pelaksanaan untuk inspeksi di pelabuhan dan perbatasan, dan sinkronisasi peraturan dan proses pemeriksaan barang ekspor dan impor yang dilakukan dengan efektif, sekaligus melalui *one stop service.*

(2) Penyusunan Regulasi dan Kebijakan, yaitu: (a) Penyusunan regulasi dan kebijakan bidang perdagangan sesuai UU Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah tentang distribusi nasional; dan (b) Penyusunan Peraturan Perundangan dan kebijakan Ekspor-impor melalui penyiapan perangkat dan peraturan untuk pelaksanaan dari Undang-Undang Kepabeanan, dan penata kelolaan prosedur impor pangan pokok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka rekomendasi yang disarankan pada komoditas beras adalah: (1) Mengembangkan kemitraan dengan petani dan/atau kelompok tani dengan para pelaku rantai pasok; (2) Meningkatkan kelengkapan fasilitas pascapanen pada petani (alat pengering, alat perontok, alat penggiling padi, dan gudang); (3) Peningkatan kualitas teknologi penggilingan padi dan pasca panen padi; (4) Membangun sistem informasi aliran beras secara online; (5) Memperbaiki infrastruktur distribusi, berupa optimalisasi jembatan timbang, peningkatan kapasitas pelabuhan sebagai sarana dan prasarana perdagangan beras antar pulau; (6) Memperjelas peran dan fungsi BULOG dalam lembaga yang menyerapan dan penyaluran beras petani; (7) Peningkatan kualitas SDM pelaku pencatatan aliran keluar masuk beras; serta (8) Peningkatan sinergitas antara para pelaku logistik dan dinas teknis.

Rekomendasi yang disarankan pada pengembangan sistem logistik jagung yaitu: (1) Perbaikan irigasi dan pengadaan pompa air pada wilayah-wilayah kering sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas jagung; (2) Membangun sistem informasi aliran jagung secara online; (3) Pembangunan silo di beberapa wilayah *buffer stock* jagung di Indonesia. Silo merupakan paket alat mesin pascapanen jagung yang terintegrasi untuk proses pemipilan, pengeringan, penyimpanan jagung; (4) Meningkatkan peran BULOG dalam penyerapan dan penyaluran jagung; (5) Peningkatan kualitas SDM pelaku pencatatan aliran keluar masuk jagung; (6) Peningkatan sinergitas antara para pelaku logistik dan dinas teknis; serta (7) Pengaturan masa tanam jagung, agar pasokan dapat dikendalikan.

b. Kajian CPP non Beras (Jagung, Bawang Merah, Cabai)

Kajian Cadangan Pangan Pemerintah non Beras meliputi komoditas pangan pokok dan strategis, yaitu jagung, bawang merah, dan cabai. Hal ini penting mengingat komoditas tersebut seringkali bergejolak, baik pasokan maupun harganya, sehingga Pemerintah perlu memiliki CPP tersebut sebagai upaya stabilisasi. Secara rinci, kajian CPP non Beras tersebut sebagai berikut:

(1) Kajian Cadangan Jagung Pemerintah

Di Indonesia, jagung merupakan komoditas pangan utama setelah padi yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian. Komoditas jagung berperan sebagai bahan pangan, bahan pakan dan bahan baku industri. Pengembangan jagung dalam skala yang lebih luas dengan produksi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian daerah.

Pada tahun 2018 produksi jagung nasional mencapai 25,5 juta ton/tahun (Ditjen TP, 2018). Sepuluh provinsi dengan produksi jagung terbesar yaitu: Jatim, Jateng, Lampung, Sulsel, NTB, Sumut, Gorontalo, Jabar, Sulut dan Sumsel berkontribusi sebesar 81,4% (20,7 juta ton) dari produksi jagung nasional. Di sisi lain, kebutuhan jagung untuk Peternak Mandiri di 10 provinsi utama (Jatim, Jateng, Sumut, Banten, Jabar, Sulsel, Sumbar, Kalsel, Sumsel, dan Lampung) berkontribusi 89,4% (2,23 juta ton) terhadap kebutuhan peternak mandiri secara nasional (**Gambar 9**).

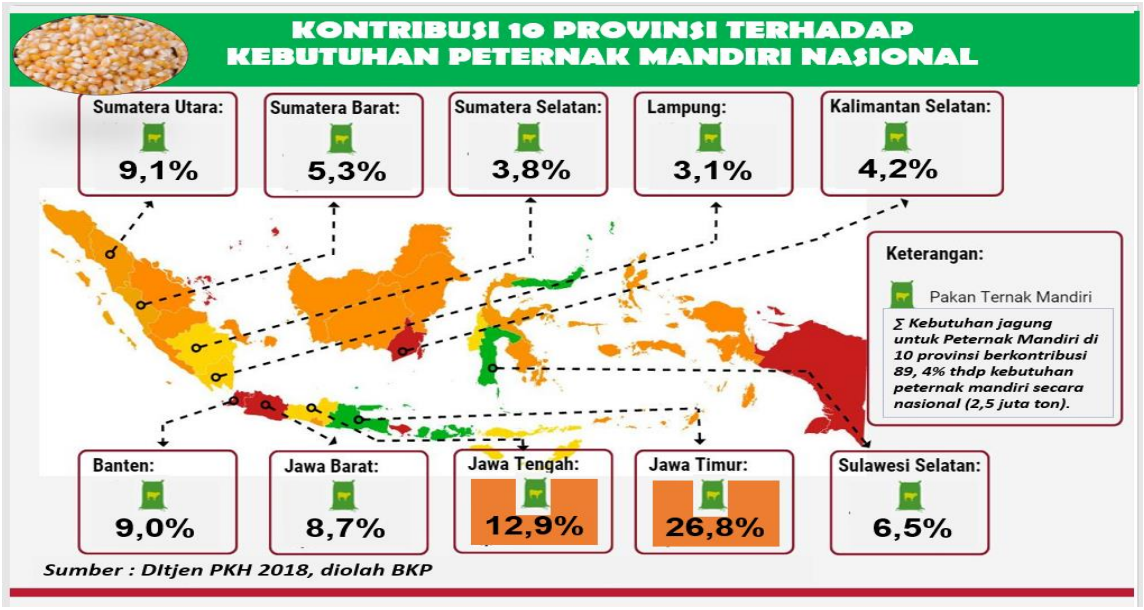

Gambar 9. Kontribusi 10 Provinsi terhadap Kebutuhan Jagung Nasional

Kebutuhan jagung dalam negeri sebagian besar digunakan untuk pakan, yaitu sekitar 65%, sedangkan untuk pangan hanya sekitar 30%, sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih. Hal ini karena jagung merupakan komponen utama dalam ransum pakan ternak, terutama unggas, dengan proporsi sekitar 50%. Permintaan terhadap jagung sebagai bahan baku pakan ternak terus meningkat. Penggunaan jagung untuk pakan didorong oleh harganya yang relatif terjangkau, mengandung kalori tinggi dan protein dengan kandungan asam amino lengkap, serta disukai oleh ternak dibandingkan dengan bahan baku pakan lainnya. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kurangnya pasokan dan tingginya harga jagung di bulan Oktober – Desember yang merupakan puncak musim kering. Hal ini karena puncak panen terjadi di Bulan Januari – Maret, kemudian mulai menurun di bulan April dan terus menurun sampai akhir tahun, sementara kebutuhan jagung relatif tetap tinggi. Kurangnya pasokan berdampak pada kenaikan harga jagung. Untuk itu, dibutuhkan tempat penyimpanan jagung sebagai cadangan jagung dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga jagung melalui pembangunan Silo Jagung dan sarana pendukungnya.

Atas dasar hal tersebut di atas, dilakukan kajian Penguatan Cadangan Pangan Strategis, khususnya untuk komoditas jagung dengan tujuan sebagai berikut: (a) Menganalisis lokasi yang berpotensi untuk pembangunan Silo Jagung dan sarana pendukungnya; (b) Menganalisis mekanisme pengelolaan cadangan jagung masyarakat; dan (c) Menganalisis kebutuhan anggaran pembangunan silo jagung dan sarana pendukungnya.

Dalam melaksanakan Kajian Cadangan Jagung Masyarakat, langkah-langkah yang telah dilakukan mencakup: penyelenggaraan rapat koordinasi melibatkan kementerian/lembaga terkait, pakar/peneliti, pemerintah daerah, Perum Bulog, dan asosiasi/pengusaha jagung; pelaksanaan kunjungan lapangan; dan pengumpulan data sekunder. Penguatan cadangan jagung melalui pembangunan Silo Jagung dan sarana pendukungnya utamanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pakan bagi peternak mandiri dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga jagung. Dengan demikian, lokasi pembangunan Silo Jagung sebaiknya di daerah sentra peternak mandiri sekaligus sentra produksi jagung untuk kontinuitas pasokan.

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan dua provinsi dengan kebutuhan jagung terbesar untuk peternak mandiri, masing-masing sebesar 321 ribu ton (12,9%) dan 668 ribu ton (26,8%) per tahun dari total kebutuhan pakan peternak mandiri nasional. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur juga merupakan produsen jagung terbesar di Indonesia dengan produksi masing-

masing sebesar 2,9 juta ton/tahun (11,7%) dan 5,4 juta ton/tahun (21,3%) dari total produksi nasional.

Kabupaten Kendal (Jawa Tengah) dan Blitar (Jawa Timur) merupakan daerah sentra produksi jagung dan memiliki populasi peternak mandiri yang cukup besar, sehingga membutuhkan pakan yang besar. Berdasarkan data pakan peternak mandiri tahun 2018, Kabupaten Blitar merupakan kabupaten dengan kebutuhan pakan terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 219 ribu ton atau 15,25% dari kebutuhan nasional. Sementara Kabupaten Kendal merupakan kabupaten dengan kebutuhan pakan terbesar di Jawa Tengah, yaitu 58,2 ribu ton. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan Silo Jagung diprioritaskan untuk dibangun di Kabupaten Kendal (Jawa Tengah) dan Blitar (Jawa Timur).

(a) Kabupaten Kendal (Jawa Tengah)

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, jumlah peternak mandiri ada sebanyak 574 peternak. Peternak mandiri untuk ayam petelur umumnya memformulasi sendiri pakan untuk ternaknya dengan komposisi 50% jagung, 30% konsentrat, dan 20% bekatul. Dengan demikian, kebutuhan jagung bagi peternak mandiri ayam petelur cukup tinggi, yaitu 58,2 ribu ton/tahun. Sementara peternak ayam pedaging menggunakan pakan pabrikan dan sudah bermitra dengan pabrik dengan sistem kontrak (inti-plasma). Sumber pasokan jagung berasal dari Kendal, Batang, Semarang, Temanggung, Wonosobo, Demak, dan Grobogan seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 10**.

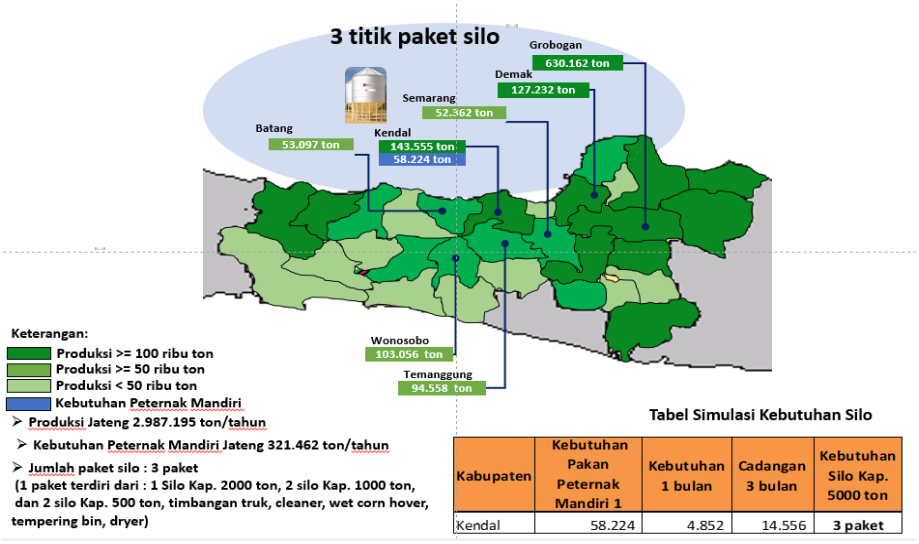

Tabel Simulasi Kebutuhan Silo

Kabupaten	Kebutuhan Pakan Peternak Mandiri 1	Kebutuhan 1 bulan	Cadangan 3 bulan	Kebutuhan Silo Kap. 5000 ton
Kendal	58.224	4.852	14.556	3 paket

Gambar 10. Peta Produksi, Kebutuhan Pakan, dan Lokasi Silo Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Bantuan silo jagung diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung di wilayah Kendal dan sekitarnya terutama saat musim kering (bulan Oktober-Desember). Dengan demikian silo nantinya akan digunakan untuk menyimpan jagung selama 3 bulan. Jika mengacu pada data kebutuhan jagung di Kendal, maka jumlah jagung yang akan disimpan dalam silo selama 3 bulan sebesar 14.556 ton. Untuk menampung jagung sebesar 14.556 ton, maka pembangunan silo dan fasilitas penunjangnya dibagi dalam 3 kompleks dimana masing-masing kompleks mampu menampung 5000 ton jagung. Adapun jumlah silo pada setiap kompleks adalah 1 unit silo kapasitas 2000 ton, 2 unit silo kapasitas 1000 ton dan 2 unit silo kapasitas 500 ton. Kapasitas silo bervariasi karena mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang bisa masuk kedalam silo dalam waktu bersamaan (sekitar 1 minggu proses). Adapun kapasitas pengering yang dibutuhkan sebesar 90 ton/proses yang dapat mengeringkan jagung pipilan dengan kadar air 18% menjadi 14% selama 5 - 8 jam.

(b) Kabupaten Blitar (Jawa Timur)

Lokasi pembangunan silo jagung di Provinsi Jawa Timur dilakukan di Kabupaten Blitar yang merupakan daerah pengguna jagung terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 218.835 ton. Selain itu Blitar juga merupakan daerah sentra produksi jagung dengan produksi 254.781 ton. Sumber pasokan jagung berasal dari Blitar, Malang, Kediri, Trenggalek, dan Ponorogo (**Gambar 11**).

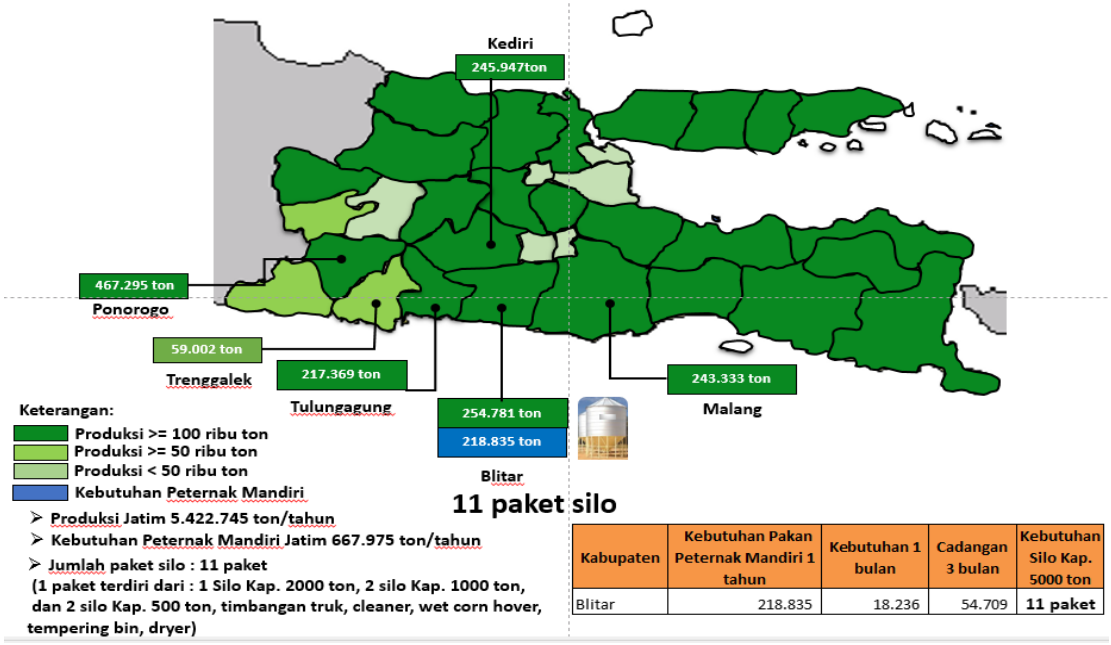

Kabupaten	Kebutuhan Pakan Peternak Mandiri 1 tahun	Kebutuhan 1 bulan	Cadangan 3 bulan	Kebutuhan Silo Kap. 5000 ton
Blitar	218.835	18.236	54.709	11 paket

Gambar 11. Peta Produksi, Kebutuhan Pakan, dan Lokasi Silo Jagung di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Bantuan silo jagung diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung di wilayah Blitar dan sekitarnya terutama saat musim kering (bulan Oktober - Desember). Dengan demikian silo nantinya akan digunakan untuk menyimpan jagung selama 3 bulan. Jika mengacu pada data kebutuhan jagung di Blitar, maka jumlah jagung yang akan disimpan dalam silo selama 3 bulan sebesar 54.709 ton. Untuk menampung jagung sebesar 54.709 ton, maka pembangunan silo dan fasilitas penunjangnya dibagi dalam 11 kompleks dimana masing-masing kompleks mampu menampung 5000 ton jagung. Adapun jumlah silo pada setiap titik adalah 1 unit silo kapasitas 2000 ton, 2 unit silo kapasitas 1000 ton dan 2 unit silo kapasitas 500 ton. Kapasitas silo bervariasi karena mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang bisa masuk kedalam silo dalam waktu bersamaan (sekitar 1 minggu proses). Adapun kapasitas pengering yang dibutuhkan 90 ton/proses yang dapat mengeringkan jagung pipilan dengan kadar air 18% menjadi 14% selama 5-8 jam.

Konsep kegiatan fasilitasi pembangunan Silo Jagung dan sarana pendukungnya sebagai cadangan jagung dilakukan melalui pemberian Bantuan Pemerintah (Banper) kepada Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan. Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan tersebut bertanggungjawab menyediakan lahan dan mengoptimalkan pemanfaatan dana Banper untuk pembangunan Silo Jagung dan sarana pendukungnya. Lahan yang digunakan untuk pembangunan Silo Jagung dan sarana pendukungnya merupakan milik pemerintah daerah dan bukan milik perseorangan/Badan Usaha. Pemilihan lokasi pembangunan Silo Jagung difokuskan di wilayah sentra peternak mandiri dan/atau sentra produksi jagung, dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan milik pemerintah daerah. Selanjutnya Silo Jagung tersebut menjadi aset pemerintah daerah.

Untuk mengoperasikan dan mengelola Silo Jagung sebagai cadangan jagung, dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan menetapkan Badan Usaha sebagai operator pengelola Silo Jagung. Hubungan kerja antara dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan dengan Badan Usaha pengelola silo jagung diikat dalam bentuk kontrak perjanjian kerja sama dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pengelolaannya, Badan Usaha bertanggung jawab dalam menjaga kontinuitas pengelolaan Silo Jagung, termasuk diantaranya permodalan, pengadaan jagung untuk pengisian silo, penyaluran cadangan jagung kepada peternak mandiri, pengoperasian dan maintenance Silo Jagung. Ilustrasi konsep kegiatan pengelolaan Silo Jagung sebagaimana **Gambar 12**.

Pengelolaan cadangan jagung oleh Badan Usaha harus memperhatikan kualitas jagung sesuai standar mutu yang berlaku. Untuk menjamin ketersediaan pasokan jagung dalam pengisian Silo Jagung, Badan Usaha melakukan *contract farming* dengan petani/poktan/gapoktan jagung sebagai mitra pemasok jagung. Petani/poktan/gapoktan dianjurkan untuk memanfaatkan dana KUR sebagai modal usahatani.

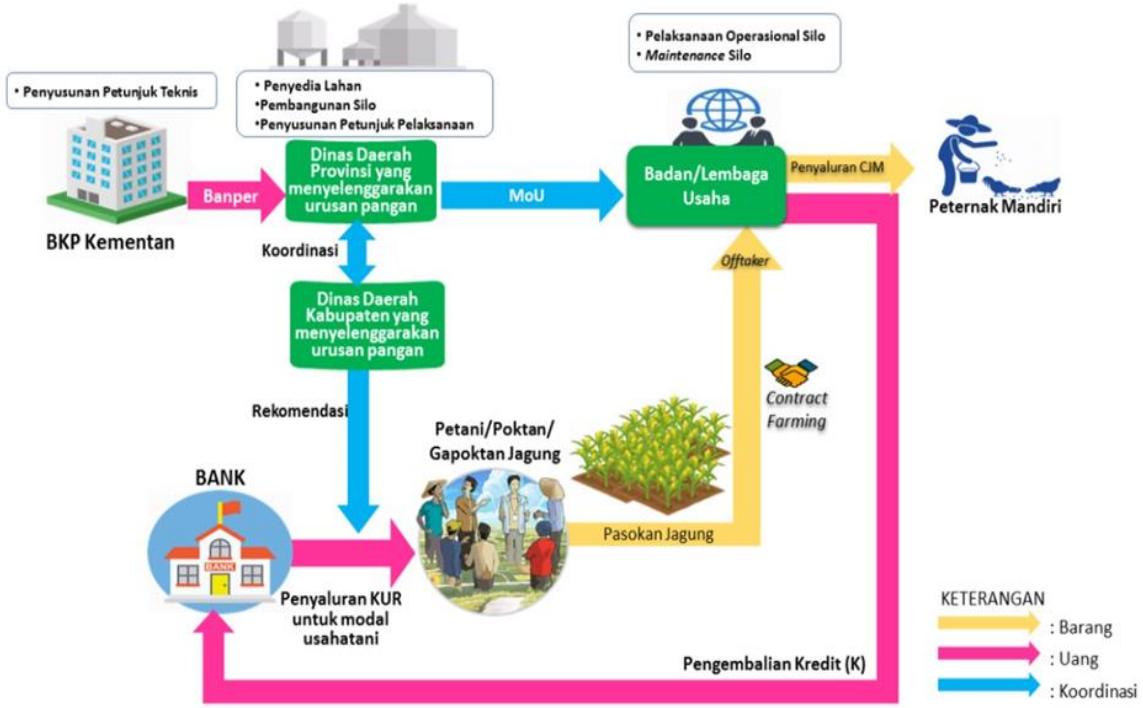

Gambar 12. Konsep Kegiatan Pengelolaan Silo Jagung

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Silo Jagung dan sarana pendukungnya sebesar Rp33.638 juta dengan rincian sebagaimana **Tabel 27.**

Tabel 27. Estimasi Kebutuhan Anggaran Pembangunan Silo Jagung dan Sarana Pendukung

No	Menu Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Target Output Nasional 2019	Satuan Biaya (Rp. Jt)	Indikasi Kebutuhan Dana 2019 (Rp. Jt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)*(5) =(6)
1	Silo Kapasitas 5000 ton (2 unit @2.500 ton)	2	2	2.880	5.760
2	Dryer dan sarana penunjang paket silo	2	2	6.451	12.902
3	Konstruksi sipil	2	2	6.697	13.394
4	Sarana Penunjang	2	2	791	1.582
	Total	**2 unit**	**2 unit**	**16.819**	**33.638**

(2) Kajian Cadangan Bawang Merah dan Cabai Pemerintah

Bawang merah dan cabai merupakan dua komoditi penting bagi masyarakat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga perlu diimbangi dengan ketersediaan di pasaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2018, bahwa total produksi bawang merah 1.503.436 ton dan kebutuhan total sebesar 1.275.654 juta ton, dimana kebutuhan untuk konsumsi langsung rumah tangga hampir 45% persen (681.089 ton) dari kebutuhan total. Rata-rata produksi bawang merah bulanan bila dibandingkan dengan kebutuhan bulanan tidak berbanding lurus, pada bulan-bulan tertentu terjadi surplus, dan dibulan-bulan lain terjadi defisit. Hal yang sama juga berlaku untuk cabai merah. Total produksi cabai besar 1.206.737 ton, dimana kebutuhan konsumsi langsung mencapai 470.202 ton atau 39%.

Bawang merah dan cabai mempunyai sifat sangat mudah mengalami perubahan mutu seperti susut bobot, perubahan volatile, dan mengalami kerusakan sehingga diperlukan pemilihan teknologi penyimpanan yang baik untuk mempertahankan kesegarannya selama penyimpanan, dalam hal ini terbagi atas "*Controlled Atmosphere Storage* (CAS)" atau *Cold Storage* (CS). Atas dasar hal tersebut di atas, perlu dilakukan kajian Penguatan Cadangan Pangan Strategis, khususnya untuk komoditas bawang merah dan cabai dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menganalisis lokasi yang berpotensi untuk pembangunan infrastruktur CAS/CS bawang merah, cabai dan sarana pendukungnya.
b. Menganalisis kebutuhan anggaran pembangunan CAS/CS bawang merah, cabai dan sarana pendukungnya.

Dalam melaksanakan Kajian Cadangan Bawang Merah dan Cabai, langkah-langkah yang telah dilakukan mencakup: penyelenggaraan rapat koordinasi melibatkan pakar/peneliti, pemerintah daerah, dan petani bawang merah; pelaksanaan kunjungan lapangan; dan pengumpulan data sekunder. Provinsi yang mengalami surplus bawang merah adalah Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Pulau Sumatera mengalami defisit bawang merah sebesar 129.680 ton dan rencananya akan dipasok dari wilayah Jawa, pulau Kalimantan mengalami defisit sebesar 69.909 ton dan rencananya dipasok dari wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara, sedangkan wilayah Maluku dan Papua mengalami defisit sebesar 31.906 ton akan dipasok dari wilayah Nusa Tenggara dam Jawa. Sebaran daerah surplus/ defisit bawang merah dapat dilihat pada **Gambar 13**.

Gambar 13. Peta Surplus/ Defisit Produksi Bawang Merah

Berdasarkan pertimbangan peta surplus/defisit bawang merah, maka penguatan Cadangan Bawang Merah diprioritaskan di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan serta DKI Jakarta sebagai barometer stabilisasi harga pangan, dan Jawa Barat sebagai konsumen bawang merah terbesar. Perhitungan kebutuhan cadangan Bawang Merah untuk mengantisipasi pasokan dan harga didasarkan atas pemenuhan 10% kebutuhan konsumsi langsung selama 1 (satu) bulan, maka kebutuhan CAS/CS adalah:

a. Sumatera Barat = (13.854 ton/th x 10%) : 12 bulan = 115 ton
b. DKI Jakarta = (27.019 ton/tahun x 10%) :12 bulan = 225 ton
c. Jawa Barat = (125.063 ton/th x 10%) : 12 bulan = 1.042 ton
d. Jawa Tengah = (89.187 ton/th x 10%) : 12 bulan = 743 ton
e. Jawa Timur = (102.296 ton/th x 10%) : 12 bulan = 852 ton
f. Nusa Tenggara Barat = (12.901 ton/th x 10%) : 12 bulan = 108 ton
g. Sulawesi Selatan = (22.624 ton/th x 10%) : 12 bulan = 189 ton

Total Bawang Merah yang akan disimpan di 7 provinsi selama 1 (satu) bulan sebanyak 3.274 ton, sehingga total kebutuhan CAS/CS sebanyak 327 unit masing-masing kapasitas 10 ton (volume CAS/CS @100 m^3). Mempertimbingkan CAS/CS yang telah ada dibeberapa lokasi maka jumlah CAS/CS yang perlu dibangun sebanyak 270 unit.

Berdasarkan sebaran kawasan produksi cabai besar dapat dilihat bahwa wilayah surplus penghasil cabai besar berasal dari wilayah Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Lampung) dan Jawa, Madura, Sulawesi

Selatan. Wilayah tersebut rencananya akan dijadikan sebagai pemasok wilayah defisit di Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Bali dan Nusa Tenggara Timur (**Gambar 14**).

Gambar 14. Peta Surplus/ Defisit Produksi Cabai Besar

Terkait dengan komoditas cabai rawit, wilayah surplus untuk komoditas cabai rawit sebagian besar berasal dari Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Seltan, Sulawesi Utara, Gorontalo). Distribusi pasokan akan dikirim ke wilayah terdekat yang mengalami defisit di Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua (**Gambar 14**).

Gambar 15. Peta Surplus/ Defisit Produksi Cabai Rawit

Sesuai dengan data produksi cabai besar dan cabai rawit, maka penguatan Cadangan Cabai diprioritaskan di 6 (enam) provinsi sentra utama produksi Cabai yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur

dan Nusa Tenggara Barat. Produksi Cabai di Sumatera Utara 196 ribu ton/tahun (16,2%), Sumatera Barat 131 ribu ton/tahun (10,9%), Jawa Barat 405 ribu ton/tahun (33,6%), Jawa Tengah 314 ribu ton (26,0%), Jawa Timur 545 ribu ton/tahun (45,2%) dan Nusa Tenggara Barat 235 ribu ton/tahun (19,4%) serta 1(satu) Provinsi sebagai Barometer Stabilisasi Harga Pangan yaitu DKI Jakarta. Penguatan cadangan untuk Cabai difokuskan pada kabupaten sentra utama produksi cabai yaitu Simalungun, Karo, Agam, Cianjur, Bandung, Garut, Temanggung, Magelang, Blitar, Malang, Tuban dan Lombok Timur.

Perhitungan kebutuhan cadangan Cabai untuk mengantisipasi pasokan dan harga didasarkan atas pemenuhan 10% kebutuhan konsumsi langsung selama 1 (satu) bulan maka kebutuhan CAS/CS adalah sbb:

a. Sumatera Utara = (52.632 ton/th x 10%) : 12 bulan = 439 ton
b. Sumatera Barat = (19.668 ton/th x 10%) : 12 bulan = 164 ton
c. DKI Jakarta = (38.162 ton/tahun x 10%) : 12 bulan = 318 ton
d. Jawa Barat = (179.739 ton/th x 10%) : 12 bulan = 1.498 ton
e. Jawa Tengah = (125.751 ton/th x 10%) : 12 bulan = 1.048 ton
f. Jawa Timur = (143.665 ton/th x 10%) : 12 bulan = 1.197 ton
g. Nusa Tenggara Barat = (18.116 ton/th x 10%) : 12 bulan = 151 ton

Total Cabai yang akan disimpan di 7 provinsi selama 1 (satu) bulan sebanyak 4.815 ton. Sehingga kebutuhan CAS/CS sebanyak 482 unit masing-masing kapasitas 10 ton (volume CAS/CS @100 m3). Mempertimbingkan CAS/CS yang telah ada dibeberapa lokasi maka jumlah CAS/CS yang perlu dibangun sebanyak 477 unit.

Tabel 28. Perbandingan Harga CAS dan Silo

No	Uraian	Harga Satuan (Rp.Jt)	
		CAS (100 m^2)	**CS (100 m^2)**
1	Unit Mesin	1.450	500
2	Instalasi Listrik	40	-
3	Bangunan (100 m^2)	200	150
4	Ongkos kirim	60	-
5	Comisioning Test	150	-
	Total	**1.900**	**650**

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit CAS adalah 1,9 milyar sedangkan untuk membangun 1 (satu) unit CS adalah 650 juta (**Tabel 28**), sehingga kebutuhan biaya pembangunan CAS/CS adalah:

a. Kebutuhan biaya CAS/CS di 6 kabupaten sentra utama produksi Bawang Merah @ Rp1,9 milyar:
   - CAS = 270 unit x Rp1,9 milyar = Rp513,00 milyar, atau

- CS = 270 unit x Rp650 juta = Rp175,50 milyar

(Sudah tersedia CAS 57 unit di Provinsi Jawa Tengah)

b. Kebutuhan biaya CAS/CS di 12 kabupaten sentra utama produksi Cabai:

- CAS = 477 unit x Rp1,9 milyar = Rp906,30 milyar, atau
- CS = 477 unit x Rp650 juta = Rp310,05 milyar

(Sudah tersedia CAS 5 unit di Provinsi DKI Jakarta)

Berdasarkan pertimbangan, penyimpanan Bawang Merah dan Cabai hanya sekitar 1 (satu) bulan dan pertimbangan teknis-ekonomis, direkomendasikan untuk mengunakan CS. Secara rinci, kebutuhan cold storage untuk bawang merah dan cabai dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga dapat dilihat pada **Gambar 15**.

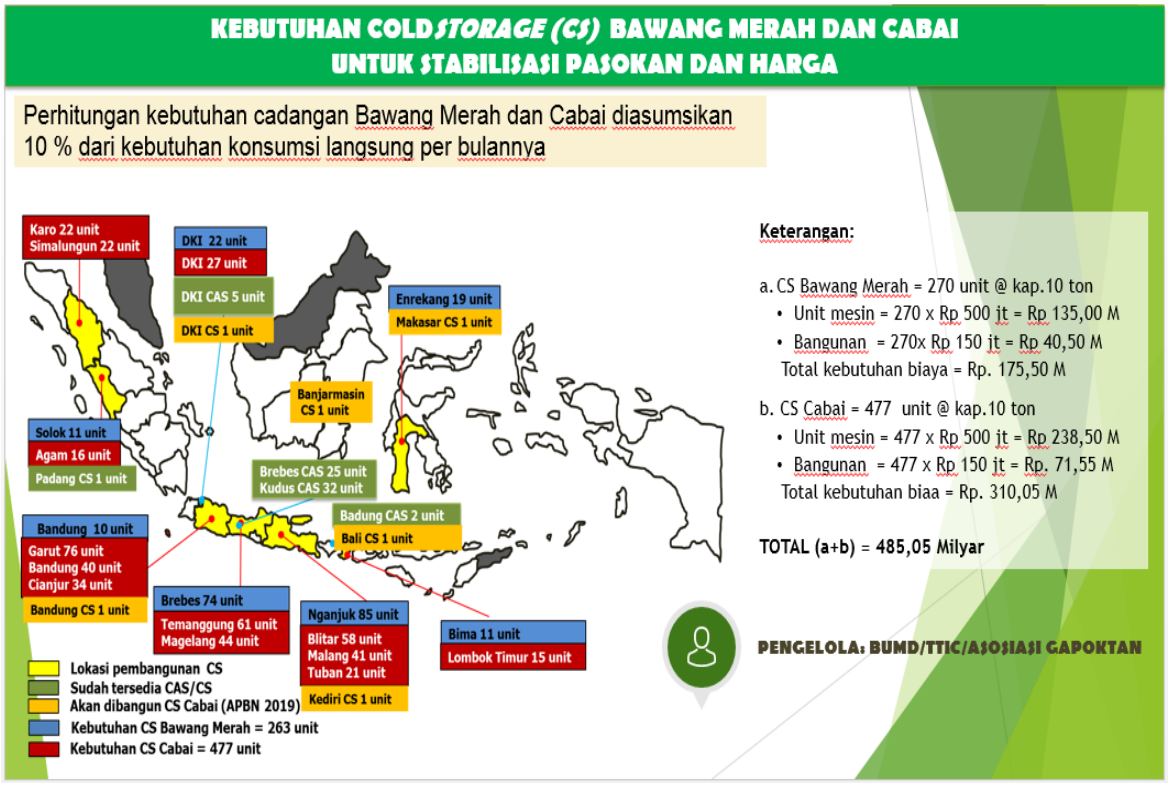

Gambar 16. Kebutuhan *Cold Storage* (CS) Bawang Merah dan Cabai

(3) Kajian *Forecast* (Peramalan) Harga Pangan Pokok/Strategis

Perkembangan dinamika harga komoditas pertanian menjadi bagian penting dalam proyeksi penawaran dan permintaan. Pada komoditas pangan, ketidakpastian dan fluktuasi harga komoditas pangan merupakan salah satu faktor resiko ketahanan pangan. Fluktuasi harga juga merupakan masalah bagi para pengusaha (petani, pedagang, pengusaha industri) maupun konsumen karena menimbulkan resiko ekonomi. Dinamika tersebut seiring dinamika situasi

perdagangan komoditas pertanian saat ini. Secara umum ketidakpastian dan fluktuasi harga merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat umum sehingga perlu dimonitor setiap waktu. Estimasi harga jangka pendek dibutuhkan untuk mengantisipasi strategi tepat dalam mengambil langkah strategis, baik untuk perencanaan produksi maupun sistem distribusinya secara tepat.

Tujuan dilakukan kajian peramalan (*forecast*) harga pangan pokok/strategis adalah: (a) Melakukan proyeksi harga komoditas pangan pokok/strategis tingkat nasional/daerah; dan (b) Menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi harga pangan nasional/daerah. Sedang sasaran yang hendak dicapai, yaitu: (a) Tersedianya proyeksi harga komoditas pangan pokok/strategis nasional/daerah; dan (b) Tersedianya analisis faktor yang mempengaruhi harga pangan pokok/strategis nasional/daerah.

Output yang diharapkan dari kajian peramalan (*forecast*) harga pangan pokok/strategis adalah: (a) Hasil analisis peramalan/*forecast* harga pangan strategis nasional; (b) Hasil analisis faktor yang mempengaruhi harga pangan nasional di tingkat konsumen; dan (c) Rekomendasi kebijakan sebagai deteksi dini (*early warning*) tentang konsisi harga dan pasokan pangan kedepan.

Peramalan (*forecast*) harga pangan pokok dan strategis pada kajian ini dilakukan melalui analisis dekomposisi. Metode dekomposisi adalah salah satu pendekatan analisis deret waktu yang berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pada deret waktu. Metode ini memisahkan komponen trend, siklus dan musiman. Metode ini dapat digunakan pada data historis yang memiliki pola sembarang. Metode dekomposisi biasanya mencoba memisahkan komponen tren, siklus dan musiman. Metode dekomposisi terbagi atas dekomposisi multipliklatif dan aditif. Metode ini memiliki kelebihan yaitu mudah dan cepat dalam perhitungan. Sedangkan kelemahannya adalah jika ada data baru maka pengolahan harus diulang lagi dan tidak ada variabel lain yang diperhitungkan. Namun, metode ini umum dipakai, cukup sukses dan akurat hasilnya khususnya untuk ramalan jangka panjang.

Secara umum hasil peramalan (*forecast*) harga pangan pokok/strategis pada tahun 2019 sebagai berikut:

a. Perkembangan harga komoditas strategis relatif dinamis antar tahun dan bulan. Masing-masing komoditas memberikan karakteristik yang saling berbeda, baik itu pada tingkat produsen, konsumen (eceran), dan internasional. Tidak semua antar tingkat tersebut terlihat terintegrasi secara baik. *Slope* positif peningkatan harga di tingkat petani lebih landai

dibandingkan dengan slope di tingkat konsumen seperti digambarkan pada komoditas padi, jagung, cabai, sedangkan komoditas yang memiliki relatif slope positif yang relatif sama di tingkat produsen dan konsumen yaitu komoditas bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur. Namun sebaliknya untuk komoditas kedelai mengalami penurunan harga dimana slope di tingkat konsumen relatif lebih curam dibandingkan dengan di tingkat produsen nasional.

b. Perkembangan trend positif harga dalam negeri untuk komoditas gabah/beras, jagung, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, dan gula, tidak seluruhnya mengalami perkembangan positif di tingkat internasional. Perkembangn harga internasional yang mengalami penurunan yaitu terjadi pada komoditas jagung, daging sapi, daging ayam, dan gula. Untuk perkembangan harga komoditas kedelai baik harga dalam negeri dan internasional mengalami kecenderungan penurunan harga.
c. Dalam proyeksi tiga bulan ke depan menunjukkan terjadi penurunan harga di tingkat dalam negeri untuk komoditas strategis: gabah padi/beras, jagung, kedelai, dan cabai merah, sedangkan yang mengalami penurunan yaitu komoditas bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, dan gula pasir. Untuk harga internasional yang mengalami peningkatan tiga bulan ke depan yaitu komoditas beras, jagung, kedelai, sedangkan yang mengalami penurunan harga, yaitu komoditas bawang putih, daging sapi, daging ayam, dan gula pasir.

Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan harga komoditas pangan di tingkat konsumen, adalah sebagai berikut:

a. Pada model beras, hasil analisis menunjukan bahwa variabel produksi beras, volume impor beras, lag harga beras di tingkat konsumen dan dummy iklim berpengaruh signifikan terhadap harga beras di tingkat konsumen. Variabel produksi, volume impor beras dan lag barga beras tingkat konsumen pengaruhnya positif terhadap harga beras di tingkat konsumen. Sementara variable dummy iklim pengaruhnya negatif terhadap harga beras di tingkat konsumen. Dalam konteks ini, pengaruh iklim secara langsung berpengaruh terhadap produksi, dan selanjutnya kondisi produksi akan berpengaruh terhadap harga beras di level konsumen.
b. Pada model jagung, hasil analisis menunjukan bahwa variabel produksi, permintaan, harga produsen, lag harga jagung di tingkat konsumen dan dummy iklim berpengaruh signifikan terhadap harga jagung di tingkat

konsumen. Variabel harga jagung di tingkat produsen dan Lag Harga jagung tingkat konsumen pengaruhnya positif terhadap harga jagung tingkat konsumen. Sedangkan produksi jagung dan dummy iklim pengaruhnya negatif terhadap harga jagung di tingkat konsumen.

c. Pada model kedelai, hasil analisis menunjukan bahwa variabel permintaan kedelai dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap harga Kedelai di tingkat konsumen. Variabel permintaan kedelai dan nilai tukar rupiah terhadap dolar USA pengaruhnya negatif terhadap harga kedelai di tingkat konsumen.
d. Pada bodel bawang merah, hasil analisis menunjukan bahwa variabel produksi Merah dan *lag* harga konsumen riil sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap harga Bawang Merah di tingkat konsumen. Variabel Lag Harga Bawang Merah tingkat konsumen pengaruhnya positif terhadap Harga Bawang Merah tingkat konsumen. Artinya harga Bawang Merah pada saat bulan ke-t akan sangat dipengaruhi oleh harga pada bulan sebelumnya. Sementara untuk produksi bawang merah pengaruhnya negatif terhadap harga Bawang Merah di tingkat konsumen.
e. Pada model bawang putih, hail analisis menunjukan bahwa variabel permintaan, nilai tukar dan lag harga konsumen riil sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap harga Bawang putih di tingkat konsumen. Variabel Lag harga bawang putih tingkat konsumen pengaruhnya positif terhadap Harga Bawang Putih di tingkat konsumen. Artinya harga bawang putih pada saat bulan ke-t akan sangat dipengaruhi oleh harga pada bulan sebelumnya. Sementara untuk variabel permintaan Bawang putih dan nilai tukar rupiah terhadap dolar USA justru sebaliknya berpengaruh negatif terhadap harga bawang putih di tingkat konsumen. Jika produksi bawang putih meningkat ternyata harga menurun. Dalam hal ini, diduga bahwa penurunan harga lebih disebabkan oleh masuknya bawang putih impor.
f. Pada model cabai merah, hasil analisis menunjukan bahwa beberapa variabel seperti: permintaan, harga di tingkat produsen dan Lag harga konsumen riil sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap harga cabai rawit di tingkat konsumen. Variabel permintaan dan harga di tingkat produsen cabai merah pengaruhnya positif terhadap harga cabai merah di tingkat konsumen. Sementara variabel Lag Harga cabai merah tingkat konsumen, pengaruhnya negatif terhadap Harga cabai merah. Dalam hal ini, jika harga cabai merah pada saat bulan ke-t meningkat, maka tidak serta harga pada bulan ke-t meningkat. Hasil analisis menunjukan, bahwa pada harga pada bulan ke-t justru menurun. Hal ini disebabkan adanya pergerakan cabai merah dari

sentra produksi ke sentra konsumsi sebagai akibat adanya sinyal harga yang meningkat. Akibatnya pasokan cabai merah akan masuk ke pusat konsumsi, dan selanjutnya harga cabai merah akan menurun.

g. Pada model cabai rawit, hasil analisis menunjukan bahwa variabel produksi dan Lag harga konsumen riil sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap harga cabai rawit di tingkat konsumen. Variabel Lag Harga cabai rawit tingkat konsumen, pengaruhnya positif terhadap harga cabai rawit tingkat konsumen. Artinya harga cabai rawit pada saat bulan ke-t akan sangat dipengaruhi oleh harga pada bulan sebelumnya. Sementara variabel produksi cabai rawit pengaruhnya negatif terhadap harga cabai rawit di tingkat konsumen.
h. Pada model daging sapi, variabel produksi, permintaan, nilai tukar dan Lag harga konsumen riil sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap harga daging sapi di tingkat konsumen. Produksi dan permintaan daging sapi berpengaruh negatif terhadap harga daging sapi di tingkat konsumen. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar USA dan variabel Lag Harga daging sapi di konsumen pengaruhnya negatif terhadap harga daging sapi di tingkat konsumen.
i. Untuk model daging ayam ras, hasil estimasi menunjukan bahwa variabel produksi, harga jagung di tingkat produsen, harga daging sapi, harga telur dan Lag harga konsumen riil sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap harga daging ayam ras di tingkat konsumen. Produksi daging ayam ras dan harga jagung di tingkat petani/produsen berpengaruh negatif terhadap harga daging ayam ras di tingkat konsumen. Sementara untuk harga daging sapi, harga telur, dan variabel Lag Harga daging ayam ras di tingkat konsumen pengaruhnya positif terhadap harga daging ayam ras di tingkat konsumen. Daging sapi dalam hal ini sebagai substitusi daging ayam ras.
j. Pada model telur ayam ras, hasil estimasi menunjukan bahwa beberapa variabel seperti: harga jagung di tingkat produsen, harga riil daging sapi, harga riil daging ayam ras di tingkat konsumen, dan *lag* harga konsumen riil sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap harga telur ayam ras di tingkat konsumen. Harga jagung di tingkat petani/produsen, harga daging ayam ras dan variabel Lag Harga telur ayam ras di tingkat konsumen pengaruhnya positif terhadap perkembangan harga telur ayam ras di tingkat konsumen. Sementara untuk pengaruh harga daging sapi negatif terhadap harga telur ayam ras di tingkat konsumen.
k. Pada model gula tebu, hasil estimasi menunjukan variabel produksi, nilai tukar dan Lag harga konsumen riil sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap

harga gula tebu di tingkat konsumen. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar USA bersifat negatif terhadap harga gula tebu di tingkat konsumen. Sementara variabel Lag Harga gula tebu di tingkat konsumen, pengaruhnya positif terhadap harga gula tebu di tingkat konsumen.

l. Pada model minyak goreng, hasil estimasi menunjukan bahwa variabel produksi, permintaan, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap harga minyak goreng di tingkat konsumen. Produksi minyak goreng dan nilai tukar rupiah terhadap dolar USA pengaruhnya negatif terhadap harga minyak goreng di tingkat konsumen. Selanjutnya permintaan minyak goreng pengaruhnya positif terhadap harga minyak goreng di tingkat konsumen.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian peramalan (*forecast*) harga pangan sebagai berikut:

a. Indikasi terdapat perbedaan trend/kecenderungan perkembangan harga di tingkat produsen, konsumen (eceran), dan internasional perlu dicermati dan dimonitor sedini mungkin. Proyeksi jangka pendek sangat penting dilakukan sehingga kebijakan untuk pengendalian harga untuk produsen dan konsumen dalam negeri dapat dicapai sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum dapat semakin meningkat. Dengan demikian perlu kebijakan lintas terkait baik dari kementan maupun kementerian terkait untuk tetap memperhatikan perkembangan harga tersebut.
b. Perlunya konsistensi dari kebijakan yang sudah ditempuh terkait dengan dinamika yang sangat dinamis dari harga tersebut. Upaya untuk memperoleh kebijakan yang tepat adalah perlunya mengetahui seberapa jauh margin yang diterima dari berbagai rantai pasok dapat diterima secara proposional, efisiensi dari distribusi impor yang memang komoditas tersebut seperti kedelai komoditas impor, konsistensi dari pengaturan peruntukan komoditas impor seperti gula, dan efisiensi usaha di tingkat produsen sebagai persaingan dengan komoditas impor.

3.4.14. Jurnal Pilar Ketahanan Pangan

Latar belakang diterbitkannya Jurnal Pilar Ketahanan Pangan antara lain: (a) Terbatasnya karya tulis ilmiah (KTI) dari pejabat fungsional lingkup Badan Ketahanan Pangan yang di ajukan sebagai kredit point; (b) BKP sebagai pembina beberapa jabatan fungsional seperti Analis Ketahanan Pangan (AKP), Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP), dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) belum memiliki sarana khusus untuk pejabat fungsional mempublikasikan karya tulis ilmiah; dan (c) Arahan Kepala Badan pada acara Uji Kompetensi APHP pada

31 Juli 2018 di Bogor untuk menyediakan Jurnal bagi pejabat fungsional lingkup BKP.

Jurnal Pilar Ketahanan Pangan (Jurnal PKP) adalah media jurnal ilmiah memuat artikel yang membahas isu ketahanan pangan dan gizi hasil-hasil penelitian, kajian dan telaah implementasi kebijakan; meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan nasional dan daerah. Jurnal PKP juga menampung artikel berupa gagasan atau konsepsi original dalam pengembangan ketahanan pangan dan gizi di tingkat nasional dan daerah. Media ini mulai ditebitkan pada bulan Juni 2019. Jurnal PKP diterbitkan dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Reviewer Jurnal PKP tidak hanya dari internal BKP, namun telah melibatkan stakeholder terkait, seperti peneliti Pusat Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pertanian (PSEKP) dan peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT).

Tujuan penerbitan Jurnal Pilar Ketahanan Pangan adalah: (a) Menyebarluaskan informasi ilmiah berupa hasil kajian dan telaahan tentang ketahanan pangan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; serta (b) Menyediakan sarana penulisan khususnya bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan akademisi dalam ruang lingkup ketahanan pangan yang terkait dengan pengkajian ketahanan pangan.

Penerbitan Jurnal Pilar Ketahanan Pangan diperlukan sebagai salah satu sarana publikasi hasil-hasil kajian dan telaahan yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan. Jurnal dimaksud membahas isu-isu aktual ketahanan pangan yang memuat analisis ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Dalam lingkup yang lebih luas, penerbitan jurnal ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ketahanan pangan.

Persyaratan umum penulisan naskah/artikel Jurnal PKP antara lain: (a) Redaksi hanya menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dan tidak dalam proses penerbitan pada publikasi lain; (b) Misi publikasi: menyajikan tulisan yang membahas **isu-isu ketahanan pangan** dalam bentuk analisis/kajian kebijakan yang responsive, prediktif, dan antisipatif disertai dengan solusi yang original, relevan, dan kontekstual; dan (c) Naskah dapat berupa hasil penelitian primer maupun ulasan (*review*) mendalam atas berbagai aspek ketahanan pangan. Ruang lingkup subtansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek ketahanan pangan, seperti tetersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Pembahasan dapat menyajikan materi terkait

ketersediaan, kerawanan, akses, distribusi, cadangan, harga, pasokan, konsumsi, keamanan pangan, dan lainnya.

Pada tahun 2019 telah diterbitkan 2 (dua) edisi Jumlah PKP, yaitu pada bulan Juni dan Desember dengan jumlah 5 naskah/artikel per edisi. Penulis naskah juga sudah bervariasi, tidak hanya dari internal BKP, namun juga dari luar kementerian seperti akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sebelas Maret (UNS Solo), Universitas Brawijaya Malang (UB Malang), dan peneliti swasta.

Dalam upaya legalisasi dan peningkatan kualitas Jurnal PKP, pada Edisi II telah diterbitkan nomor *International Standard Serial Number* (ISSN) dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada tahun 2020 direncanakan akan diusulkan penerbitan nomor elektronik ISSN (e-ISSN) ke LIPI agar publik lebih mudah mengakses informasi makalah/artikel Jurnal PKP. Target akhir adalah akreditasi oleh Kemenristek DIKTI yang bisa diajukan setelah 2 tahun setelah terbit atau pada tahun 2021.

Beberapa judul naskah/artikel pada Jurnal PKP pada Edisi I (Juni 2019) adalah: (1) Hubungan Antara Berat Badan Lahir, Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Pola Asuh Makan Dengan Kejadian Underweight Pada Balita (AKP BKP dan Akademisi UNS Solo); (2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Derajat Integrasi Pasar Bawang Merah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (APHP BKP dan Akademisi UB Malang); (3) Perencanaan Penyediaan Pangan Penduduk Ibukota Negara di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Telaahan Berbasis Pola Pangan Harapan (AKP BKP); (4) Asimetris Harga Bawang Merah di Tingkat Petani Terhadap Harga Bawang Merah di Tingkat Eceran (APHP dan Statistisi BKP); dan (5) Profil Risiko Cemaran Mikotoksin Pada Beras dan Pencegahannya (PMHP BKP).

Sedangkan pada Edisi II (Desember 2019) adalah: (1) Integrasi Pasar Beras Medium di Indonesia, Sumatera dan Jawa (Calon AKP BKP); (2) Marketable Surplus dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Marketed Surplus Pada Beras Pada Tingkat Petani di Kabupaten Magelang (Calon AKP BKP); (3) Komunikasi Organisasi Dalam Pengembangan Kinerja Pengurus Gapoktan Pada Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Kabupaten Subang dan Bogor (AKP BKP); (4) Peramalan Harga Eceran Cabai Merah Dengan Permodelan Time Series ARIMA (APHP dan Calon Statistisi BKP); dan (5) Model Peran Start-Up Pertanian Dalam Peningkatan Aksesibilitas Pangan (IPB).

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Alokasi APBN tahun 2019 untuk kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (anggaran daerah) sebesar Rp198.753.000.000,-

dan terealisasi 98,71% sedangkan anggaran pusat sebesar Rp22.940.960.000 dan terealisasi 99,23%. Alokasi anggaran tersebut per kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Alokasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2019

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	REALISASI	
			(Rp)	%
1	Bidang Distribusi	9.341.660.000	9.275.355.508	99,29
2	Bidang Harga	4.238.000.000	4.163.682.608	98,25
3	Bidang Cadangan	3.053.800.000	3.043.441.803	99,66
4	Pusat	6.307.500.000	6.282.159.933	99,60
	Jumlah	*22.940.960.000*	*22.764.639.852*	99,23

Sampai akhir tahun 2019, total realisasi anggaran di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mencapai Rp22.764.639.852,- atau sebesar 99,23 persen. Apabila dilihat realisasi per kegiatan, maka realisasi di: (1) Harga Pangan sebesar Rp4.163.682.608,- atau 98,25 persen; (2) Distribusi Pangan sebesar Rp9.275.355.508,- atau 99,29 persen; (3) Cadangan Pangan sebesar Rp3.043.441.803 atau 99,66 persen dan (4) Pusat sebesar Rp6.282.159.933 atau 99,60 persen. Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 29.

Capaian realiasi Bidang yang ada di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan hampir rata-rata di atas 95 - 99 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2019 cukup efisien dan efektif. Apabila dilihat berdasarkan kegiatan yang ada di masing-masing Bidang pada Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, rata-rata semua kegiatan telah selesai dilaksanakan, artinya pelaksanaan berjalan efisien dan efektif.

Tabel 30. Alokasi Anggaran Setelah Pemblokiran dan Realisasi Anggaran Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan TA.2019

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
	PUSAT DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN	***22.940.960.000***	***22.764.639.852***	***176.320.148***	**99,23**
1	**Bidang Distribusi**	**9.341.660.000**	**9.275.355.508**	**66.304.492**	**99,29**
	Pengembangan Toko Tani Indonesia / PUPM	2.812.155.000	2.797.940.851	14.214.149	**99,49**
	TOKO TANI INDONESIA CENTER	5.984.855.000	5.957.126.601	27.728.399	**99,54**
	Kajian Distribusi Pangan	544.650.000	520.288.056	24.361.944	**95,53**
2	**Bidang Harga**	**4.238.000.000**	**4.163.682.608**	**74.317.392**	**98,25**
	Panel Harga Pangan, Monev Pasokan dan Harga	3.370.610.000	3.343.392.510	27.217.490	**99,19**
	Kajian Analisa Pasar Hasil Pertanian	513.785.000	498.749.998	15.035.002	**97,07**
	Penyusunan Jurnal Ketahanan Pangan	353.605.000	321.540.100	32.064.900	**90,93**
3	**Bidang Cadangan**	**3.053.800.000**	**3.043.441.803**	**10.358.197**	**99,66**
	Pembinaan dan Monitoring Cadangan Pangan	2.723.800.000	2.714.426.303	9.373.697	**99,66**
	Kajian Perhitungan Cadangan	330.000.000	329.015.500	984.500	**99,70**
4	**Pusat**	**6.307.500.000**	**6.282.159.933**	**25.340.067**	**99,60**
	Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Harga	4.397.000.000	4.373.558.008	23.441.992	**99,47**
	Penyusunan Rencana Kegiatan	540.000.000	539.005.000	995.000	**99,82**
	Sergap dan Mendukung Prioritas Nasional	1.370.500.000	1.369.596.925	903.075	**99,93**

Berikut kegiatan masing-masing Bidang:

1. **Bidang Harga Pangan**

   Bidang Harga Pangan dengan total kegiatan di tahun 2019 mencapai mendapat anggaran sebesar Rp4.238.000.000,- dan seluruh kegiatan dapat dilaksanan dan di selesaikan dengan efektif dan efisien. Rata-rata realisasi anggaran per sub kegiatan sebesar Rp4.163.682.608,- atau mencapai 98,25 persen

2. **Bidang Distribusi Pangan**

   Bidang Distribusi Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.341.660.000 dan seluruh kegiatan dapat dilaksanan dan di selesaikan dengan efektif dan efisien. Rata-rata realisasi anggaran per sub kegiatan sebesar Rp9.275.355.508,- atau mencapai 99,29 persen.

3. **Bidang Cadangan Pangan**

   Bidang Cadangan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.053.800.000,- hampir seluruh kegiatannya dapat terlaksana dan di selesaikan dengan efisien dan efektif. Realisasi anggaran per sub kegiatan mencapai sebesar Rp3.043.441.803 atau 99,60 persen.

4. **Kegiatan Pusat**

   Kegiatan Pusat merupakan dukungan manajemen bagi masing-masing bidang di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp6.307.500.000,- dan seluruh kegiatan dapat dilaksanan dan di selesaikan dengan efektif dan efisien. Rata-rata realisasi anggaran per sub kegiatan sebesar Rp6.282.159.933,- atau mencapai 99,60 persen.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan digunakan acuan PMK Nomor 214 Tahun 2017, dimana pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian anggaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^{n}(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Ket : E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah −20%. Hasil perhitungan efisiensi kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.) PAKi	Realisasi (Rp.) RAKi	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Capaian Keluaran CKi	PAKi x CKi	(PAKi x CKi)-RAKi
1.	1814.102 Lumbung Pangan Masyarakat	Unit	31.778.000.000	31.574.150.151	99,48	1.635,00	1.635,00	100%	31.778.000.000	203.849.849
2.	1814.112 Layanan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan Strategis di Tk Produsen dan Konsumen	Gapoktan	18.675.000.000	17.883.407.988	95,76	1.156,00	1.154,00	100%	18.642.690.311	759.282.323
3.	1814.113 Lembaga Distribusi Pangan yang dibina	Lokasi	148.300.000.000	146.734.513.884	98,94	35	35	100%	148.300.000.000	1.565.486.116
Total			**198.753.000.000**	**196.192.072.023**	**98,71%**	**2.826,00**	**2.824,00**	**99,94%**	**198.720.690.311**	**2.528.618.288**
									Efisiensi (E)	1,27
									Nilai Efisiensi (NE)	**53,18**

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil penghitungan efisiensi Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan adalah sebesar 1,27. Dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar itu dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019 cukup efisien.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2019 diperoleh nilai capaian secara keseluruhan berhasil. Beberapa keberhasilan yang menonjol dari pencapaian sasaran ini yaitu:

a. Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2019 untuk semua komoditas pangan dikategorikan **sangat berhasil** dengan capaian koefisien variasi (cv) masing-masing komoditas sebagai berikut:

(1) CV harga komoditas gabah di tingkat produsen 3,34% dari target 10%, dengan capaian kinerja 294,43%, dan CV harga beras di tingkat konsumen 0,55% dari target 10%, dengan capain kinerja 1.814,73%;

(2) CV harga komoditas jagung di tingkat produsen 5,22% dari target 10%, dengan capaian kinerja 191,40%, dan CV ditingkat konsumen 1,01% dari target 10%, dengan capaian kinerja 988,78%;

(3) CV harga komoditas kedelai di tingkat produsen 0,88% dari target 10%, dengan capaian kinerja 782,03%, dan CV ditingkat konsumen 2,80% dari target 10%, dengan capaian kinerja 368,75%;

(4) CV harga komoditas bawang merah di tingkat produsen 18,06% dari target 25%, dengan capaian kinerja 138,43%, dan CV ditingkat konsumen 16,35% dari target 10%, dengan capaian kinerja 152,87%;

(5) CV harga komoditas cabai di tingkat produsen 29,98% dari target 30%, dengan capaian kinerja 100,07%, dan CV ditingkat konsumen 29,89% dari target 10%, dengan capaian kinerja 100,36%;

(6) CV harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen 0,97% dari target 10%, dengan capaian kinerja 1.026,81%; dan

(7) CV harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen 3,35% dari target 10%, dengan capaian kinerja 298,36%.

b. Pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka pencapaian stabilitas harga pangan:

(1) Pada tahun 2019 telah diberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat sebanyak 1.325 gapoktan melalui 4000 Toko Tani Indonesia untuk mendukung upaya stabilisasi harga gabah, cabe merah keriting dan bawang merah di tingkat petani dan konsumen.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi pasokan dan harga pangan melalui panel harga pangan pada tahun 2019 menjangkau seluruh propinsi di Indonesia, yaitu di 34 provinsi di 500 kabupaten/kota atau tercapai 100% atau dikategorikan **berhasil**. Kegiatan

panel harga dengan terus meningkat dan dapat diperoleh data/informasi pasokan dan harga pangan strategis baik tingkat produsen maupun konsumen yang lebih up date, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan/ kebijakan terkait permasalahan pangan.

(3) Rata-rata stok cadangan beras pemerintah selama 4 tahun terakhir sebesar 1.727.375 ton mengalami peningkatan signifikan, dengan total CBP yang dikuasai pemerintah pada tahun 2019 sebesar 2.024.006 ton. Sementara itu jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi pada Tahun 2019 di 26 provinsi sebesar 4.414.18 ton, sedangkan cadangan pangan pemerintah di 231 kabupaten sebesar 6.738,1 ton. Stok cadangan pangan masyarakat yang berada di Lumbung Pangan Masyarakat pada Tahun 2019 mencapai 2.945 ton setara beras atau 4.600 ton setara gabah.

4.2 Upaya yang Dilakukan

Upaya penguatan stabilisasi harga pangan pokok dan strategis di tingkat produsen dan konsumen akan terus dilakukan melalui langkah penguatan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta peningkatan peran koordinatif Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam rangka meningkatkan peranserta dan sinergitas seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis.

Untuk mengelola dan menyalurkan bahan pangan ke TTI wilayah Jabodetabek LUPM bekerjasama dengan instansi/lembaga distribusi dan logistik serta mengembangkan TTI di wilayah masing-masing LUPM. Sesuai dengan perkembangan teknologi digital, telah dikembangan e-commerce TTI.

Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan antara lain: (a) Penyempurnaan/perbaikan software panel harga; (b) Penyebarluasan sosialisasi kegiatan panel harga pangan bagi stakeholder terkait, baik di pusat maupun daerah; (c) Peningkatan volume laporan dan ketepatan waktu laporan; (d) Validasi data panel yang akan dikirim oleh petugas enumerator; (e) Pemantauan harga komoditas spesifik tertentu sesuai kebutuhan/kepentingan daerah; dan (f) Meningkatkan koordinasi antara petugas enumerator dengan BKP daerah (provinsi) dan BKP Pusat.

Untuk mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah dilakukan beberapa upaya seperti: (1) Sosialisasi cadangan pangan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan, cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat, (2) Melakukan apresiasi cadangan pangan terutama untuk mendorong aparat provinsi/kabupaten/kota dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3)

Berkoodinasi dengan pendamping kabupaten dan petugas provinsi dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan cadangan pangan masyarakat maupun pemerintah.

4.3 Rekomendasi

1. Pembangunan data base perlu peningkatan kinerja aparat provinsi dalam pengolahan (validasi) dan analisis data serta pemanfaatan hasil analisisnya dalam penyusunan rekomendasi kebijakan harga pangan baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Pengembangan TTIC ke depan perlu penyedia system informasi berbasis e-commerce untuk mendapatkan keakuratan informasi kebutuhan, pasokan dan stok bahan pangan.
3. Untuk mendukung kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat, perlu dialokasikan bantuan pemerintah untuk pengisian lumbung pangan pada tahun 2020 sebanyak 300 unit LPM dan usulan anggaran DAK tahun 2021 untuk pembangunan fisik lumbung sejumlah 500 unit dengan rincian 200 unit LPM berada di wilayah sentra dan 300 unit di wilayah rentan rawan pangan.

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

NOMOR 989/Kpts.OT.050/J.3/12/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka evaluasi program dan kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019, perlu menyusun Laporan Kinerja (Lakin) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
b. bahwa agar penyusunan Lakin Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dapat terlaksana dengan baik, perlu membentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

Scanned by CamScanner

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/-PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 780/Kpts/-KP.230/11/2018 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TAHUN 2019.

Scanned by CamScanner

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

I. Pengarah : Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan.

II. Ketua : Kepala Bidang Harga Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan.

III. Sekretaris I : Kepala Bidang Cadangan Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;

IV. Sekretaris II : Kepala Bidang Distribusi Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan.

V. Anggota :

1. Kepala Sub Bidang Analisis Harga Produsen, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
2. Kepala Sub Bidang Analisis Harga Konsumen, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
3. Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan Pemerintah, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
4. Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan Masyarakat, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
5. Kepala Sub Bidang Jaringan Distribusi Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
6. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Distribusi Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
7. Dini Nuraeni, SP, M.P, Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda Badan Ketahanan Pangan;
8. Denny Eswant Kosasih, SP, M.Si, Analis Ketahanan Pangan Muda, Badan Ketahanan Pangan;

Scanned by CamScanner

9. Ari Wahyuningsih, STP, M.Si,
   Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama, Badan Ketahanan Pangan;
10. Rizki Khoirunisa Kumalasari, S.Kom,
    Analis Ketahanan Pangan Pertama, Badan Ketahanan Pangan;
11. Razif Agung Permana, SP,
    Calon Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, Badan Ketahanan Pangan;
12. Diena Amalya, SP,
    Calon Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, Badan Ketahanan Pangan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. mengumpulkan data untuk penyusunan Lakin Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019;
2. melakukan analisis terhadap data untuk penyusunan Lakin Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019;
3. menyusun Lakin Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2019;
4. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pengarah.

KEEMPAT : Tim bertugas selama 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Tahun 2019.

Scanned by CamScanner

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2019

KEPALA PUSAT
DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN,

RISFAHERI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
2. Bendahara Pengeluaran Badan Ketahanan Pangan;
3. Yang bersangkutan.

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : http://bkp.deptan.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Risfaheri
Jabatan : Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Hendriadi
Jabatan : Kepala Badan Ketahanan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Februari 2019

Pihak Kedua

Agung Hendriadi

Pihak Pertama

Risfaheri

Screenshot

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen	1-1-Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen	10 %
		1-2-Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen	10 %
		1-3-Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen	10 %
		1-4-Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di konsumen	10 %
		1-5-Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen	10 %
		1-6-Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat konsumen	30 %
		1-7-Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat konsumen	25 %

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Rp. 229,831,460,000

Jakarta, 25 Februari 2019

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Agung Hendriadi

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Risfaheri

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAXSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : http/bkp.deptan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maino Dwi Hartono
Jabatan : Kepala Bidang Harga Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Risfaheri
Jabatan : Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2019

Pihak Kedua

Risfaheri

Pihak Pertama

Maino Dwi Hartono

Screenshot

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG HARGA PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen	1-1-Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen	10 %
		1-1-Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen	10%
		1-1-Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen	10 %
		1-1-Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan konsumen	25%
		1-1-Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen	30 %
		1-1-Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen	10%
		1-1-Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen	10%

Kepala Pusat Distribusi dan
Cadangan Pangan

Risfaheri

Jakarta, 04 Januari 2019
Kepala Bidang Harga Pangan

Maino Dwi Hartono

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : http://bkp.deptan.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Inti Pertiwi Nashwari
Jabatan : Kepala Bidang Distribusi Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Risfaheri
Jabatan : Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2019

Pihak Kedua

Risfaheri

Pihak Pertama

Inti Pertiwi Nashwari

Screenshot

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG DISTRIBUSI PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen	1-1-Rasio jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina terhadap provinsi di seluruh Indonesia	100 %

Jakarta, 04 Januari 2019

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Risfaheri

Kepala Bidang Distribusi Pangan

Inti Pertiwi Nashwari

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035-7805641, FAKSIMILI (021) 7886536
WEBSITE : http://bkp.deptan.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nita Yulianis
Jabatan : Kepala Bidang Cadangan Pangan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Risfaheri
Jabatan : Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2019

Pihak Kedua

Risfaheri

Pihak Pertama

Nita Yulianis

Scanned by CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG CADANGAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah lumbung pangan masyarakat (akumulatif)	Jumlah lumbung pangan masyarakat (akumulatif)	443 unit
2	Jumlah Provinsi yang mengelola cadangan pangan pemerintah	Jumlah Provinsi yang mengelola cadangan pangan pemerintah	26 Provinsi
3	Jumlah Kab/Kota yang mengelola cadangan pangan pemerintah	Jumlah Kab/Kota yang mengelola cadangan pangan pemerintah	150 Kab/Kota

Jakarta, 04 Januari 2019

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Risfaheri

Kepala Bidang Cadangan Pangan

Nita Yulianis

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : http://bkp.deptan.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arifayani Rachmani
Jabatan : Kepala Sub Bidang Analisis Harga Pangan Konsumen

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maino Dwi Hartono
Jabatan : Kepala Bidang Harga Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Maino Dwi Hartono	Arifayani Rachmani

Screenshot

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBBIDANG ANALISIS HARGA PANGAN KONSUMEN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen	1-1-Koefisien variasi harga komoditas beras di tingkat konsumen	10 %
		1-2-Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat konsumen	10 %
		1-3-Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat konsumen	10 %
		1-4-Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat konsumen	25 %
		1-5-Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat konsumen	10 %
		1-6-Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen	30 %
		1-7-Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen	10 %

Jakarta, 04 Januari 2019

Kepala Bidang Harga Pangan

Maino Dwi Hartono

Kepala Sub Bidang Analisis Harga Pangan Konsumen

Arifayani Rachmani

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : http://bkp.deptan.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lalang Ken Handita
Jabatan : Kepala Sub Bidang Analisis Harga Pangan Produsen

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maino Dwi Hartono
Jabatan : Kepala Bidang Harga Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Maino Dwi Hartono	Lalang Ken Handita

Screenshot

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBBIDANG ANALISIS HARGA PANGAN PRODUSEN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis di tingkat produsen	5-1-Koefisien variasi harga komoditas gabah dan beras di tingkat produsen	10 %
		5-2-Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen	10 %
		5-3-Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen	10 %
		5-4-Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen	25 %
		5-5-Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen	30 %

Jakarta, 04 Januari 2019

Kepala Bidang Harga Pangan

Maino Dwi Hartono

Kepala Sub Bidang Analisis Harga Pangan Produsen

Lalang Ken Handita

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : http://bkp.deptan.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yudhi Harsatriadi Sandyatma
Jabatan : Kepala Sub Bidang Jaringan Distribusi Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Inti Pertiwi Nashwari
Jabatan : Kepala Bidang Distribusi Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Inti Pertiwi Nashwari	Yudhi Harsatriadi Sandyatma

Screenshot

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBBIDANG JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Rasio Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina terhadap provinsi di seluruh indonesia	1-1-Jumlah toko tani indonesia	4,000 Unit

Jakarta, 04 Januari 2019

Kepala Bidang Distribusi Pangan

Inti Pertiwi Nashwari

Kepala Sub Bidang Jaringan Distribusi Pangan

Yudhi Harsatriadi Sandyatma

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : http://bkp.deptan.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ai Nirwani
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kelembagaan Distribusi Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Inti Pertiwi Nashwari
Jabatan : Kepala Bidang Distribusi Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Inti Pertiwi Nashwari	Ai Nirwani

Screenshot

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBBIDANG KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Rasio jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina terhadap provinsi di seluruh indonesia	1-1-Jumlah lembaga distribusi yang dibina secara nasional	34 Unit

Jakarta, 04 Januari 2019

Kepala Bidang Distribusi Pangan

Inti Pertiwi Naswari

Kepala Sub Bidang Kelembagaan Distribusi Pangan

Ai Nirwani

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : http://bkp.deptan.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Imron Fuadi
Jabatan : Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan Pemerintah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nita Yulianis
Jabatan : Kepala Bidang Cadangan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Juni 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Nita Yulianis	Muhammad Imron Fuadi

Screenshot

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBBIDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Provinsi yang mengelola cadangan pangan pemerintah	1-1-Jumlah Provinsi yang mengelola cadangan pangan pemerintah	26 Provinsi
1	Jumlah Kab/Kota yang mengelola cadangan pangan pemerintah	1-1-Jumlah Kab/Kota yang mengelola cadangan pangan pemerintah	150 Kab/Kota

Jakarta, 11 Juni 2019

Kepala Bidang Cadangan Pangan

Nita Yulianis

Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan Pemerintah

Muhammad Imron Fuadi

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : http://bkp.deptan.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febrina Cholida
Jabatan : Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nita Yulianis
Jabatan : Kepala Bidang Cadangan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Nita Yulianis	Febrina Cholida

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBBIDANG CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah lumbung pangan masyarakat (akumulatif)	1-1-Jumlah lumbung pangan masyarakat (akumulatif)	443 Unit

Jakarta, 01 Oktober 2019

Kepala Bidang Cadangan Pangan

Nita Yulianis

Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan Masyarakat

Febrina Cholida

SOP PENYUSUNAN LAKIN PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Sekretaris Badan	Kapus DCP	Ketua Tim Penyusun Lakin PDCP	Anggota Tim Lakin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan pangan menerima nota dinas/surat dari sesba untuk menyusun Lakin dan menindaklanjuti dengan mendesposisikan kepada ketua Lakin PDCP					Surat Sekretaris Badan	15 menit		
2	Ketua Tim LAKIN membagi tugas kepada Anggota Tim Lakin untuk menyiapkan bahan penyusunan Lakin, pengolahan data dan analisis capaian kinerja T-1					Disposisi dari Kapus DCP	15 menit	Pembagian Tugas, Rekapitulasi, Pengolahan dan Analisis Data	
3	Anggota tim lakin menyusun draft LAKIN PDCP dan melaporkan hasil pekerjaan kepada ketua tim penyusun Lakin untuk dikoreksi selanjutnya					Draft Lakin PDCP	7 hari	Draft Lakin PDCP	
4	Ketua Tim mengkoreksi draft LAKIN PDCP dan melaporkan ke Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan pangan					Draft Lakin PDCP	3 hari	Draft LAKIN PDCP	
5	Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan pangan memeriksa draft LAKIN PDCP, jika setuju menandatangani LAKIN tersebut jika tidak menyerahkan kembali ke ketua tim untuk diperbaiki dan menugaskan ketua tim LAKIN membuat nota dinas ke sekretaris Badan					Draft Lakin PDCP	1 hari	LAKIN PDCP	
6	Ketua tim LAKIN PDCP membuat nota dinas Kapus DCP ke Sekretaris Badan terkait penyampaian LAKIN PDCP					LAKIN PDCP	15 menit	Nota Dinas	
7	LAKIN PDCP disampaikan ke Sekretaris Badan					Dokumen LAKIN PDCP	1 hari	Dokumen LAKIN PDCP	

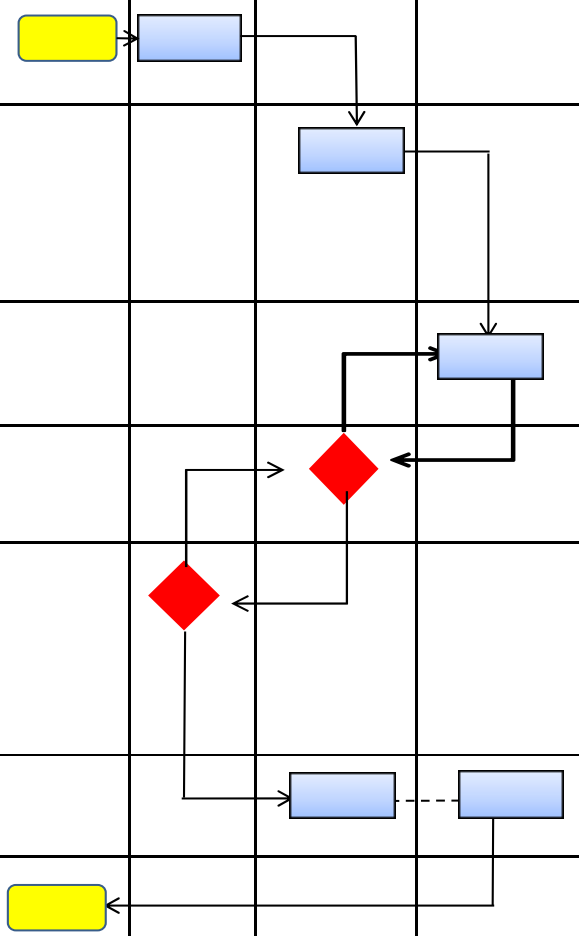

Keterangan: TIM Lakin PDCP terdiri dari: Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan pejabat fungsional Lingkup PDCP yang menangani Lakin PDCP

Perkembangan Harga Pangan Pokok/Strategis di Tingkat Produsen Tahun 2019

NO	Komoditas	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Min	Max	Rerata	CV
1	Gabah Kering Panen	4.889	4.810	4.563	4.441	4.504	4.497	4.572	4.654	4.727	4.798	4.825	4.856	4.441	4.889	4.678	3,34
2	Jagung Pipilan Kering	4.392	4.423	3.833	3.847	3.852	3.869	3.852	3.874	3.925	3.938	3.931	3.998	3.833	4.423	3.978	5,22
3	Kedelai Biji Kering	6.691	6.711	6.813	6.784	6.810	6.801	6.858	6.845	6.891	6.802	6.730	6.818	6.691	6.891	6.796	0,88
4	Bawang Merah	18.720	15.872	19.540	25.233	22.849	22.706	21.060	18.080	14.104	14.592	18.134	21.520	14.104	25.233	19.368	18,06
5	Cabai Merah Keriting	14.298	13.653	14.629	17.819	22.535	29.986	39.627	39.830	33.659	28.407	25.979	23.083	13.653	39.830	25.292	29,98

	Perkembangan Harga Pangan Pokok/Strategis di Tingkat Konsumen Tahun 2019																
NO	Komoditas	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Min	Max	Rerata	CV
1	Beras Medium	11.161	11.167	11.091	11.004	11.011	11.042	11.032	11.044	11.028	11.073	11.126	11.135	11.004	11.167	11.076	0,55
2	Jagung Pipilan Kering	7.092	7.184	7.082	7.022	7.032	6.962	6.996	7.002	7.048	7.065	7.097	7.069	6.962	7.184	7.054	1,01
3	Kedelai Biji Kering	9.472	9.416	9.550	9.617	10.144	10.120	10.111	10.064	10.000	10.004	10.026	9.997	9.416	10.144	9.877	2,80
4	Bawang Merah	29.440	26.562	31.464	38.273	36.385	37.030	33.386	27.876	23.050	23.962	28.374	33.039	23.050	38.273	30.737	16,35
5	Cabai Merah Keriting	28.225	25.370	26.964	30.174	36.289	49.210	57.609	64.311	49.512	43.338	40.567	35.115	25.370	64.311	40.557	29,89
6	Daging Sapi Murni	119.223	119.178	118.890	119.111	120.916	121.817	120.258	120.367	120.214	120.423	120.862	121.283	118.890	121.817	120.212	0,97
7	Gula Pasir Lokal/Curah	12.074	12.059	12.226	12.338	12.994	13.104	13.037	13.002	12.952	12.985	13.117	13.169	12.059	13.169	12.755	3,35

PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
Jln. Harsono RM No. 3 Gedung E Lt.6 R.628
Ragunan, Pasar Minggu – Jakarta Selatan

fppt.com